

**A. Moh. Ickhamal Suryadinata, S.Pd., M.Pd
Mansur, S.Pd.I., M.Pd.I
Nur Azizah, S.Psi., S.Pd.I., MA**

Buku "Menyemai Toleransi Sejak Dini: Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural" menghadirkan gagasan segar tentang pentingnya menanamkan nilai toleransi sejak usia dini melalui pendekatan pendidikan Islam yang inklusif dan kontekstual.

Melalui kajian teoritis dan praktik empiris, buku ini menguraikan bagaimana nilai-nilai universal Islam seperti rahmatan lil 'alamin, keadilan, persaudaraan, dan kasih sayang dapat diinternalisasikan dalam proses pembelajaran anak. Penulis menyoroti peran guru, keluarga, dan lembaga pendidikan dalam menumbuhkan sikap saling menghormati lintas budaya, agama, dan etnis.

Selain itu, buku ini juga menampilkan contoh-contoh nyata penerapan pendidikan multikultural berbasis Islam di berbagai daerah di Indonesia mulai dari kegiatan pembelajaran di madrasah hingga program pendidikan karakter di sekolah umum yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dengan pendekatan yang reflektif dan aplikatif, buku ini mengajak para pendidik, orang tua, dan pemangku kebijakan untuk menata ulang paradigma pendidikan Islam agar lebih relevan dengan tantangan zaman yang majemuk.

Sebagai panduan praktis sekaligus refleksi akademik, buku ini menjadi bacaan penting bagi siapa pun yang ingin membangun generasi Muslim yang religius, moderat, dan berkeadaban mereka yang mampu menjadi jembatan perdamaian di tengah keberagaman.



**MENYEMAI TOLERANSI SEJAK DINI:
PENDIDIKAN ISLAM DALAM BINGKAI MULTIKULTURAL**

MENYEMAI TOLERANSI SEJAK DINI:

PENDIDIKAN ISLAM DALAM BINGKAI MULTIKULTURAL

A. Moh. Ickhamal Suryadinata, S.Pd., M.Pd
Mansur, S.Pd.I., M.Pd.I
Nur Azizah, S.Psi., S.Pd.I., MA.

Mitra Ilmu
2025

MENYEMAI TOLERANSI SEJAK DINI: PENDIDIKAN ISLAM DALAM BINGKAI MULTIKULTURAL

Penulis :

A. Moh. Ickhamal Suryadinata, S.Pd., M.Pd
Mansur, S.Pd.I., M.Pd.I
Nur Azizah, S.Psi., S.Pd.I., MA.

Editor:

Abdul Gafur, S.Pd.I., M.Pd.I
Nirmala, S.Pd.I., M.Pd.I
Rina Purnamawati, S.Pd.I, M.Pd.I

ISBN: 978-623-145-852-0

Desain Sampul dan Tata Letak:
Sulaiman Sahabuddin Al Karawish

Penerbit : Mitra Ilmu

Ukuran : 23 x 15 cm (Standar UNESCO)

Kantor:

Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang
Hp. 081340021801/ 0852-9947-3675/ 0821-9649-6667
Email : mitrilmua@gmail.com
Website : www.mitrlilmumakassar.com
Anggota IKAPI Nomor: 041/SSL/2022

Cetakan pertama: Oktober 2025

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	vi
BAB 1 REALITAS KEBINEKAAN DAN TANTANGAN INTOLERANSI DI ERA GLOBAL	1
A. Potret Sosial Masyarakat Indonesia yang Majemuk	4
B. Fenomena Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Generasi Muda.....	8
C. Dampak Ketidaksiapan Menghadapi Perbedaan	12
D. Pentingnya Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Multikultural	16
BAB 2 KONSEP DAN MAKNA MULTIKULTURALISME	21
A. Definisi Multikulturalisme dari Perspektif Sosial, Budaya, dan Pendidikan	28
B. Nilai-Nilai Utama dalam Masyarakat Multikultural	35
C. Multikulturalisme dalam Konteks Indonesia	38
D. Perbandingan antara Multikulturalisme, Pluralisme, dan Kosmopolitanisme	43
BAB 3 TOLERANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM	47

A. Landasan Qur'ani dan Hadis tentang Toleransi	51
B. Konsep Tasamuh, 'Adl, dan Rahmah	57
C. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam Membangun Masyarakat Madani	60
D. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Hidup Berdampingan.....	65
 BAB 4 HAKIKAT DAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM.....	
69	
A. Pendidikan Islam sebagai Proses Pembentukan Insan Kamil	74
B. Dimensi Spiritual, Moral, dan Sosial dalam Pendidikan Islam	79
C. Keterpaduan antara Ilmu, Iman, dan Amal	83
D. Relevansi Pendidikan Islam dalam Konteks Global dan Multikultural	86
 BAB 5 PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
90	
A. Prinsip-prinsip Pendidikan Multikultural Menurut Nilai-nilai Islam	94
B. Integrasi Nilai Keberagaman dalam Pendidikan Islam	101
C. Peran Guru dan Lembaga Pendidikan dalam Menanamkan Toleransi	105
D. Pendidikan Islam sebagai Sarana Membangun Masyarakat Berkeadaban	109
 BAB 6 PERAN KELUARGA DAN KOMUNITAS DALAM MENYEMAI TOLERANSI.....	
113	

A. Keluarga sebagai Madrasah Pertama dalam Membentuk Karakter Anak	117
B. Pendidikan Nilai dalam Kehidupan Sehari-hari.....	122
C. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Media terhadap Pandangan Keberagaman	125
D. Sinergi antara Rumah, Sekolah, dan Masyarakat	130
 BAB 7 STRATEGI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN TOLERANSI DI LEMBAGA ISLAM	
	134
A. Integrasi Nilai Toleransi dalam Kurikulum Madrasah dan Pesantren	138
B. Pendekatan Pembelajaran Partisipatif dan Kontekstual	144
C. Penguatan Karakter Moderat melalui Kegiatan Keagamaan	148
D. Peran Kepemimpinan Lembaga Pendidikan dalam Membangun Budaya Inklusif	153
 BAB 8 MODEL PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL.....	
	158
A. Model Integratif (Agama–Sosial–Kemanusiaan)	167
B. Model Pembelajaran Berbasis Proyek Kebersamaan.....	172
C. Model Reflektif dan Dialogis Antar Peserta Didik	175
D. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Penerapan Model.....	181

BAB 9 STUDI KASUS DAN BEST PRACTICES	185
A. Studi Kasus Lembaga Pendidikan Islam yang Menerapkan Nilai Toleransi.....	188
B. Contoh Praktik Baik di Pesantren, Madrasah, dan Sekolah Umum	192
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan	194
D. Pembelajaran dari Praktik Lokal dan Internasional	201
 BAB 10 REKONSTRUKSI KURIKULUM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM	206
A. Kurikulum Berbasis Nilai Multikultural dan Moderasi Beragama.....	210
B. Reformasi Pembelajaran Agama di Sekolah dan Madrasah	214
C. Kebijakan Pendidikan Nasional yang Berpihak pada Keberagaman.....	216
D. Peran Pemerintah dan Organisasi Keagamaan	219
 BAB 11 MENYEMAI TOLERANSI SEJAK DINI: ARAH BARU PENDIDIKAN ISLAM	221
A. Urgensi Pendidikan Toleransi di Era Digital dan Global	225
B. Harapan terhadap Generasi Islam Moderat, Terbuka, dan Empatik	227
C. Strategi Jangka Panjang untuk Membangun Budaya Damai.....	230
D. Pendidikan Islam sebagai Fondasi Peradaban Inklusif	233

DAFTAR PUSTAKA	236
Tentang Penulis	245

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku **“Menyemai Toleransi Sejak Dini: Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural”** ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah menegakkan nilai-nilai kebaikan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan kontribusi pemikiran dan praktik nyata dalam menanamkan nilai-nilai toleransi kepada generasi muda melalui pendidikan Islam yang berlandaskan prinsip multikulturalisme. Di tengah realitas dunia yang semakin plural, baik secara budaya, agama, maupun etnis, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter anak-anak yang tidak hanya beriman, tetapi juga mampu menghargai perbedaan dan menjalin kerukunan.

Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pendidik, orang tua, mahasiswa, dan semua pihak yang peduli pada pendidikan karakter berbasis toleransi.

Akhirnya, penulis berharap buku ini mampu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa toleransi

bukan sekadar sikap, tetapi merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, damai, dan inklusif.

Palu, 31 Oktober 2025

Penulis

BAB 1

REALITAS KEBINEKAAN DAN TANTANGAN INTOLERANSI DI ERA GLOBAL

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh interkoneksi sosial, ekonomi, dan budaya yang semakin cepat dan masif, masyarakat dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada realitas kebinedkaan yang semakin kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya mencakup keberagaman etnis, bahasa, dan budaya, tetapi juga perbedaan agama, kepercayaan, latar belakang sosial-ekonomi, orientasi politik, serta identitas gender, sehingga menuntut setiap individu dan institusi pendidikan maupun sosial untuk memiliki kapasitas adaptif, kesadaran kritis, dan keterampilan sosial yang memadai agar dapat menavigasi perbedaan tersebut secara konstruktif, harmonis, dan produktif; realitas kebinedkaan ini pada satu sisi menjadi potensi yang luar biasa untuk memperkaya wawasan, kreativitas, inovasi, serta memperkuat kohesi sosial apabila dikelola dengan prinsip inklusivitas, toleransi, dan keadilan, namun pada sisi lain, apabila tidak

dikelola secara hati-hati dan didukung oleh mekanisme pendidikan, sosial, serta hukum yang tepat, keberagaman ini berpotensi menimbulkan konflik, diskriminasi, fragmentasi sosial, serta munculnya sikap eksklusif dan intoleran yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ketahanan nasional.

Di tengah dinamika global yang terus berubah, tantangan intoleransi menjadi semakin nyata, tidak hanya dalam bentuk konflik fisik, tetapi juga melalui ekspresi subtile berupa stereotipe negatif, prasangka sosial, segregasi komunitas, eksklusi ekonomi, polarisasi politik, hingga penyebaran narasi ekstrem melalui media sosial dan platform digital, yang kerap memicu ketegangan antar kelompok yang berbeda identitas; fenomena ini menunjukkan bahwa intoleransi bukan sekadar masalah individu, tetapi merupakan isu struktural yang membutuhkan pendekatan multidimensi, termasuk pendidikan, penguatan hukum, pembangunan karakter, dan dialog lintas budaya, agar masyarakat mampu menginternalisasi nilai-nilai toleransi, saling menghormati, serta mampu mengelola perbedaan dengan bijaksana.

Di Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kebinedaan melalui semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, realitas ini menjadi semakin relevan dan mendesak karena masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa, puluhan bahasa daerah, dan beragam agama yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan wilayah negara. Keberagaman ini merupakan anugerah sekaligus tanggung jawab, di mana toleransi dan moderasi menjadi kunci untuk mempertahankan kohesi sosial, menjaga perdamaian, dan membangun masyarakat yang inklusif serta berkeadilan. Namun, berbagai data dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa intoleransi di berbagai bentuk mulai dari diskriminasi berbasis agama, pelecehan simbol identitas, segregasi sosial, hingga kekerasan berbasis keyakinan masih menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi oleh masyarakat modern, sehingga menuntut adanya strategi komprehensif yang menggabungkan pendidikan, kebijakan publik, serta intervensi sosial untuk menumbuhkan budaya saling menghormati.

Dengan latar belakang tersebut, bab ini akan membahas secara mendalam realitas kebinedaan di

Indonesia dan dunia, menganalisis berbagai faktor penyebab intoleransi di era global, mengkaji dampak sosial, politik, dan budaya dari eksistensi sikap intoleran, serta menyoroti urgensi pendidikan karakter, nilai-nilai toleransi, dan pembangunan kapasitas sosial untuk membentuk masyarakat yang mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam konteks global yang terus berubah. Pembahasan ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman konseptual tentang fenomena kebinedkaan dan intoleransi, tetapi juga menghadirkan perspektif kritis dan strategis yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan model pendidikan, kebijakan sosial, serta praktik moderasi beragama yang relevan dengan tantangan abad ke-21.

A. Potret Sosial Masyarakat Indonesia yang Majemuk

1. Kebinedkaan sebagai Identitas Nasional

Indonesia adalah potret konkret keberagaman dunia yang mewujud dalam satu kesatuan politik, sosial, dan budaya. Secara geografis dan demografis, bangsa ini terbentang dari Sabang hingga Merauke, dihuni oleh lebih dari 1.300

kelompok etnis, 700 bahasa daerah, serta enam agama dan sejumlah kepercayaan lokal yang diakui negara (BPS, 2023). Keragaman tersebut bukanlah sekadar statistik sosial, melainkan cerminan perjalanan sejarah panjang bangsa yang diwarnai interaksi, migrasi, perdagangan, dan asimilasi antarperadaban sejak era Sriwijaya dan Majapahit hingga masa kolonialisme Eropa.

Sebutan “laboratorium sosial multikultural terbesar di dunia” (Azra, 2024) bukanlah hiperbola. Di Indonesia, identitas kultural, agama, dan bahasa hidup berdampingan dalam satu sistem kenegaraan yang menuntut kesetiaan terhadap nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Dalam konteks ini, semboyan nasional “*Bhinneka Tunggal Ika*” bukan sekadar slogan retoris, tetapi merupakan pernyataan filosofis yang menegaskan bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan ancaman. Pancasila, dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, menjadi “kompas moral” yang mengikat seluruh unsur bangsa dalam harmoni ideologis (Madjid, 2025).

Kebinekaan Indonesia juga mencerminkan apa yang disebut Nurcholish Madjid (2025) sebagai

“pluralitas yang berkeadaban” yaitu kesediaan hidup berdampingan secara damai tanpa harus meniadakan identitas diri. Nilai ini, apabila terus dipelihara, menjadi modal sosial bagi ketahanan nasional dan kemajuan peradaban.

2. Dinamika Sosial di Tengah Pluralitas

Namun, kebinekaan yang luas ini tidak selalu berjalan tanpa gesekan. Dalam konteks modern, pluralitas sosial sering kali dihadapkan pada ketimpangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, serta akses informasi yang timpang antarwilayah. Fenomena tersebut memunculkan segregasi sosial dan potensi konflik berbasis identitas.

Data Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2024 yang dirilis oleh Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa skor kerukunan nasional berada di angka 73,6, sedikit menurun dari tahun sebelumnya (74,4). Penurunan ini mengindikasikan bahwa harmoni sosial belum stabil dan mudah terguncang oleh provokasi berbasis perbedaan (Kemenag RI, 2024).

Menurut laporan Setara Institute (2025), terdapat 221 pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Kasus-kasus

tersebut umumnya terjadi di wilayah perkotaan padat penduduk dan daerah dengan mobilitas sosial tinggi. Fakta ini menegaskan bahwa toleransi bukanlah warisan otomatis, melainkan hasil proses sosial yang harus dipelihara secara terus-menerus melalui pendidikan, dialog, dan kebijakan publik yang inklusif.

Sementara itu, BRIN (2025) menyoroti munculnya fenomena “fragmentasi sosial digital,” di mana masyarakat membentuk komunitas daring berdasarkan kesamaan ideologi dan identitas agama, memperlemah interaksi lintas kelompok. Hal ini memperdalam polarisasi sosial yang berpotensi mengancam integrasi nasional.

3. Globalisasi dan Arus Identitas Baru

Dalam era globalisasi dan revolusi digital, identitas lokal mengalami benturan dengan arus budaya global yang cenderung homogen. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter) menjadi arena baru pembentukan identitas anak muda Indonesia. Generasi muda kini lebih mengenal simbol-simbol global ketimbang kearifan lokal. Globalisasi menghadirkan paradoks: di satu sisi membuka ruang perjumpaan lintas budaya, namun di sisi lain memperkuat

tribalisme digital kecenderungan berinteraksi hanya dengan kelompok yang sependapat, sebagaimana dijelaskan oleh efek *echo chamber* (Center for Digital Society UGM, 2024).

Penelitian CfDS (2024) menunjukkan bahwa 62% pengguna muda media sosial di Indonesia pernah menerima konten bermuatan kebencian berbasis agama atau etnis. Ironisnya, hanya 28% yang memiliki literasi digital cukup untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa pluralitas Indonesia kini diuji tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Dalam konteks ini, kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan empati menjadi elemen kunci menjaga persatuan nasional di era global.

B. Fenomena Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Generasi Muda

1. Akar Sosial dan Psikologis Intoleransi

Fenomena intoleransi di kalangan generasi muda muncul bukan tanpa sebab. Ia berakar pada ketidakpastian identitas, ketimpangan sosial, serta minimnya ruang dialog dalam pendidikan. Dalam banyak kasus, generasi muda menghadapi

disorientasi nilai akibat derasnya arus informasi tanpa filter moral yang kuat. Ketika sistem pendidikan gagal menghadirkan nilai kebangsaan yang kontekstual, muncul ruang kosong yang mudah diisi oleh ideologi eksklusif yang menawarkan kepastian moral instan (Hidayatullah, 2023).

Survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT, 2024) terhadap 5.000 pelajar dan mahasiswa menunjukkan bahwa 58% responden memiliki potensi radikalisme kognitif ringan, yaitu kecenderungan menyetujui kekerasan atas nama agama dalam situasi tertentu. Meskipun angka ini menurun dari 61% pada 2023, hasil tersebut tetap mengindikasikan bahwa ruang pendidikan belum sepenuhnya imun dari penetrasi ideologi ekstrem.

Kusnanto dkk. (2024) menegaskan bahwa intoleransi tumbuh subur ketika anak muda merasa kehilangan rasa memiliki terhadap komunitasnya. Dalam kondisi seperti itu, narasi ideologis ekstrem yang menjanjikan “identitas suci” dan “kebenaran tunggal” menjadi sangat menarik secara psikologis.

2. Peran Media Sosial dan Algoritma

Dalam konteks kontemporer, media sosial berfungsi layaknya “mesin ideologi baru.” Laporan Kominfo (2025) menemukan lebih dari 12.000 konten digital bermuatan ujaran kebencian dan intoleransi pada triwulan pertama tahun 2025. Sebagian besar konten itu dikemas dengan gaya visual yang ringan, lucu, dan emosional—menggunakan format meme, musik, atau video pendek yang mudah viral di kalangan remaja.

Narasi ekstrem kini tidak lagi hadir secara frontal melalui ceramah keras atau manifesto ideologis, tetapi disebarluaskan secara halus lewat “soft propaganda” yang mengajak pengguna untuk merasa menjadi bagian dari kelompok “yang paling benar.” Proses ini menciptakan ilusi identitas eksklusif sekaligus menumbuhkan rasa curiga terhadap pihak lain.

Oleh karena itu, pendidikan karakter di era digital harus memprioritaskan penguatan literasi media, berpikir kritis, dan empati sosial. Seperti dikemukakan oleh UNESCO (2025), pendidikan abad ke-21 harus membekali peserta didik bukan hanya dengan keterampilan kognitif, tetapi juga

kesadaran global dan tanggung jawab moral sebagai warga dunia.

3. Kampus dan Sekolah sebagai Arena Ideologis

Lembaga pendidikan merupakan arena strategis pembentukan nilai dan identitas. Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian sekolah dan kampus di Indonesia masih rentan terhadap infiltrasi ideologi eksklusif. Hasil penelitian IAIN Parepare (2025) mengungkap bahwa sebagian mahasiswa mengalami “kebingungan ideologis” antara nilai-nilai agama dan nilai kebangsaan. Kondisi ini diperburuk oleh pendekatan pedagogis yang cenderung kaku dan minim dialog lintas perspektif.

Sebaliknya, terdapat praktik-praktik baik (best practices) yang menunjukkan keberhasilan model pendidikan inklusif. Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), misalnya, telah mengembangkan *learning model multikultural* melalui proyek sosial lintas agama dan budaya. Program tersebut terbukti meningkatkan empati sosial, toleransi, dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan lintas iman (Nuryanti, 2024).

Keberhasilan ini membuktikan bahwa pendidikan yang berbasis pengalaman sosial jauh lebih efektif dalam membentuk karakter moderat dibandingkan sekadar ceramah moral. Pendidikan yang hidup, partisipatif, dan kontekstual menjadi kunci untuk membangun generasi muda yang inklusif dan tangguh menghadapi ekstremisme.

C. Dampak Ketidaksiapan Menghadapi Perbedaan

Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perbedaan bukan hanya menimbulkan gesekan sosial yang bersifat permukaan, tetapi juga mengguncang fondasi nilai-nilai kebangsaan yang menjadi perekat utama kehidupan bernegara. Dalam konteks Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara paling majemuk di dunia, kegagalan dalam mengelola perbedaan dapat menimbulkan efek domino terhadap stabilitas sosial, politik, ekonomi, bahkan keamanan nasional. Menurut penelitian Pusat Studi Pancasila UGM (2024), meningkatnya sentimen primordial dan eksklusivisme identitas berkontribusi terhadap menurunnya indeks toleransi nasional sebesar 12% dalam lima tahun terakhir. Fenomena

ini menunjukkan bahwa persoalan multikulturalisme bukan sekadar wacana moral, melainkan menjadi bagian dari agenda strategis kebangsaan.

1. Polarisasi Sosial dan Fragmentasi Komunitas

Dalam era digitalisasi dan koneksi tinggi, ruang publik yang semula diharapkan menjadi wadah dialog justru berubah menjadi arena polarisasi. Media sosial telah menggeser cara masyarakat berinteraksi dan membentuk opini publik. Polarisasi sosial yang terjadi kini tidak hanya di ranah politik, tetapi juga meluas ke ranah sosial-keagamaan dan kultural. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (kini BRIN, 2024) melaporkan bahwa lebih dari 40% percakapan daring menjelang Pemilu 2024 sarat dengan ujaran kebencian dan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu.

Fenomena ini menunjukkan bahwa intoleransi telah bertransformasi dari sekadar ekspresi individu menjadi struktur sosial digital, di mana algoritma media sosial memperkuat bias identitas dan mempersempit ruang dialog. Seperti dijelaskan oleh Sunarto (Jurnal Komunikasi dan Masyarakat, 2023), "media sosial berfungsi sebagai

cermin dan sekaligus mesin penguat bias sosial yang mempercepat segregasi virtual berbasis nilai dan keyakinan.” Akibatnya, kepercayaan antarkelompok menurun, dan ruang kolaborasi sosial semakin sempit.

Polarisasi yang terus dibiarkan dapat mengancam kohesi sosial, menghambat kerja sama lintas kelompok, bahkan memperlemah legitimasi negara di mata masyarakat. Fenomena “echo chamber” atau ruang gema digital menciptakan masyarakat yang hidup dalam narasi kebenarannya sendiri, sehingga dialog antaridentitas menjadi semakin sulit. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan demokrasi deliberatif yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Dampak Ekonomi dan Pendidikan

Intoleransi juga berdampak signifikan pada bidang ekonomi. Daerah-daerah yang pernah mengalami konflik sosial berbasis agama atau etnis umumnya menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi, serta berkurangnya mobilitas sosial. Laporan Bank Dunia (2024) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat toleransi rendah mengalami rata-rata

penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7% per tahun dibandingkan daerah dengan indeks toleransi tinggi.

Keberagaman yang tidak dikelola secara sehat menciptakan iklim ketidakpastian bagi investor dan menurunkan kepercayaan pasar. Hal ini memperkuat argumen bahwa stabilitas sosial merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, ketidaksiapan menghadapi perbedaan juga berdampak langsung pada dunia pendidikan.

Riset UNESCO bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2024) menemukan bahwa 27% siswa SMA di Indonesia pernah mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan agama atau latar belakang budaya. Pengalaman diskriminasi tersebut mengakibatkan turunnya motivasi belajar dan meningkatnya kecenderungan isolasi sosial di kalangan peserta didik. Menurut Nuraini (Jurnal Pendidikan Karakter, 2024), lingkungan belajar yang intoleran “menciptakan trauma psikologis yang menghambat perkembangan empati dan kemampuan berpikir kritis siswa.”

Akibat jangka panjang dari fenomena ini adalah menurunnya social trust atau kepercayaan sosial, yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan manusia berkelanjutan. Dengan kata lain, ketika intoleransi tumbuh, bukan hanya tatanan sosial yang rapuh, tetapi juga produktivitas dan kualitas sumber daya manusia ikut terdegradasi.

D. Pentingnya Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Multikultural

Jika akar permasalahan intoleransi terletak pada ketidaksiapan memahami dan menghargai perbedaan, maka pendidikan merupakan instrumen paling strategis untuk membangun kesiapan tersebut. Pendidikan multikultural tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan tentang keberagaman, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai kemanusiaan universal melalui praktik sehari-hari di ruang kelas dan komunitas sosial.

1. Pendidikan sebagai Tindakan Preventif

Pendidikan karakter berbasis multikultural berperan sebagai sistem pencegahan dini terhadap berkembangnya intoleransi, radikalisme, dan

kekerasan simbolik di masyarakat. Ia menekankan aspek pembentukan kepribadian yang inklusif, empatik, dan reflektif terhadap keberadaan orang lain. Menurut Ardi & Saputra (CATHA Journal, 2024), penerapan pendidikan multikultural di sekolah menengah menunjukkan penurunan kecenderungan intoleransi hingga 35% dalam satu tahun ajaran, sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir reflektif dan kemampuan bernegosiasi dalam perbedaan.

Pendidikan multikultural mengajarkan peserta didik bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan sumber pembelajaran dan inovasi sosial. Pendekatan ini juga memperkuat konsep *resilience sosial*, yakni kemampuan masyarakat untuk bertahan dan beradaptasi terhadap konflik identitas yang mungkin timbul.

2. Implementasi dalam Kurikulum Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Kurikulum Merdeka (2025) telah menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran. Profil Pelajar Pancasila menjadi kerangka utama yang menanamkan karakter beriman, berkebinaan global, gotong

royong, mandiri, dan kreatif. Namun demikian, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

Keterbatasan kompetensi guru dalam mengelola isu keberagaman, minimnya bahan ajar kontekstual, serta resistensi budaya lokal terhadap isu pluralisme menjadi hambatan utama. Menurut Rukmana & Hidayat (Jurnal Pendidikan Islam dan Kebudayaan, 2024), penerapan nilai multikultural di sekolah sering kali hanya bersifat seremonial tanpa menyentuh aspek pedagogis yang mendalam. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi implementasi bertahap, mencakup pelatihan intensif guru, penyusunan modul lintas budaya, serta evaluasi berbasis riset tindakan kelas (action research) untuk menilai efektivitas pendekatan ini.

3. Kolaborasi Komunitas dan Pemerintah

Pendidikan multikultural tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan ekosistem sosial yang luas. Sekolah hanyalah salah satu elemen dari sistem pendidikan sosial yang lebih besar. Peran keluarga, organisasi keagamaan, media massa, serta pemerintah sangat menentukan keberlanjutan program multikultural.

Program lintas sektor seperti “Sekolah Damai” (Kementerian Agama, 2024) dan “Pelajar Tangguh” (BNPT, 2025) menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan negara mampu memperkuat karakter toleran generasi muda. Menurut laporan BNPT (2025), sekolah yang mengikuti program Pelajar Tangguh mengalami penurunan 42% kasus perundungan berbasis agama dan meningkatnya aktivitas kolaboratif antar siswa lintas keyakinan.

Upaya kolaboratif ini harus dilanjutkan melalui kebijakan publik yang konsisten, insentif bagi lembaga pendidikan yang berhasil mengembangkan kurikulum toleransi, dan penguatan media yang berpihak pada narasi persatuan.

Indonesia saat ini berada di persimpangan: antara mempertahankan semangat kebinekaan yang telah diwariskan para pendiri bangsa atau terjebak dalam pusaran intoleransi global. Tantangan globalisasi dan digitalisasi menuntut masyarakat Indonesia untuk tidak hanya toleran secara normatif, tetapi juga kompeten secara multikultural mampu berinteraksi, bekerja sama, dan berpikir kritis di tengah keragaman.

Dengan memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai multikultural, Indonesia bukan hanya menjaga keutuhan sosialnya, tetapi juga memperkokoh posisinya sebagai model demokrasi plural terbesar di dunia. Seperti ditegaskan oleh Nurcholish Madjid (dalam Arif, 2025), "agama dan kebudayaan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, tetapi jembatan kemanusiaan untuk membangun keadaban bersama."

BAB 2

KONSEP DAN MAKNA MULTIKULTURALISME

Dalam konteks masyarakat modern yang semakin majemuk, konsep multikulturalisme telah menjadi salah satu isu paling mendasar dalam diskursus sosial, politik, dan pendidikan. Dunia hari ini hidup dalam satu ruang global yang tidak lagi memiliki batas-batas geografis yang tegas. Mobilitas manusia, arus informasi, serta pertukaran budaya yang begitu cepat telah melahirkan bentuk kehidupan baru yang diwarnai oleh perbedaan, keberagaman, dan pluralitas identitas. Dalam situasi seperti ini, multikulturalisme tidak lagi dipahami sekadar sebagai wacana akademik, tetapi sebagai paradigma hidup bersama yang menjadi fondasi bagi keberlangsungan masyarakat yang damai, adil, dan beradab.

Bagi bangsa Indonesia, yang secara historis dibangun di atas fondasi kemajemukan etnis, bahasa, agama, dan adat istiadat, gagasan multikulturalisme memiliki relevansi yang amat

kuat. Sejak masa awal kemerdekaan, pendiri bangsa telah menegaskan pentingnya menghormati perbedaan sebagai bagian dari identitas nasional. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya ideologi politik, melainkan juga pernyataan filosofis tentang pengakuan terhadap pluralitas manusia dan masyarakat. Dalam konteks inilah, multikulturalisme menjadi salah satu manifestasi nyata dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila “Persatuan Indonesia” dan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.”

Namun demikian, dalam praktiknya, penerimaan terhadap multikulturalisme tidaklah selalu mudah. Globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah membawa dua wajah yang berbeda: di satu sisi memperluas jangkauan interaksi lintas budaya, tetapi di sisi lain juga menumbuhkan tantangan baru berupa fragmentasi sosial, polarisasi identitas, dan intoleransi. Fenomena ujaran kebencian berbasis agama dan etnis yang meningkat di ruang digital menjadi bukti nyata bahwa kesadaran multikultural belum sepenuhnya mengakar dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, memahami konsep dan makna multikulturalisme secara mendalam

menjadi keharusan, terutama bagi lembaga pendidikan Islam yang memiliki tanggung jawab moral dalam membentuk karakter generasi bangsa yang moderat dan berkeadaban.

Menurut Parekh (2023), multikulturalisme tidak sekadar berarti “hidup berdampingan antara kelompok yang berbeda”, melainkan merupakan “suatu cara pandang yang mengakui keberagaman sebagai sumber kekuatan moral dan sosial dalam kehidupan bersama.” Artinya, multikulturalisme menuntut adanya pengakuan, penghargaan, dan kerja sama aktif antarindividu dari berbagai latar budaya untuk membangun masyarakat yang saling menghormati. Dengan demikian, pendidikan multikultural bukan hanya mengajarkan siswa untuk mengenal perbedaan, tetapi juga membentuk kemampuan untuk berinteraksi secara empatik dan konstruktif dengan keberagaman tersebut.

Dalam perspektif Islam, semangat multikulturalisme sebenarnya telah tertanam secara kuat dalam ajaran Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat [49]:13,

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan

seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.”

Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman manusia bukanlah kesalahan sejarah, melainkan sunnatullah keniscayaan ilahi yang memiliki tujuan spiritual dan sosial. Perbedaan adalah ruang bagi manusia untuk belajar, berinteraksi, dan membangun peradaban. Dalam pandangan para ulama klasik seperti Al-Raghib al-Asfahani dan Al-Ghazali, perbedaan manusia dalam budaya, pemikiran, dan pandangan hidup justru menjadi sarana untuk menguji kematangan moral manusia, yakni kemampuan untuk menghormati yang lain tanpa kehilangan jati dirinya.

Oleh karena itu, pendidikan Islam modern perlu menempatkan multikulturalisme bukan sebagai konsep asing, melainkan sebagai bagian dari nilai-nilai Qur’ani dan nabawi. Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah telah mencontohkan prinsip hidup berdampingan dalam masyarakat plural yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Dalam piagam tersebut, Nabi menegaskan bahwa semua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga

keamanan, keadilan, dan perdamaian. Prinsip-prinsip itu menjadi bukti historis bahwa Islam sejak awal telah menanamkan semangat toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan keadilan sosial.

Dalam konteks pendidikan, multikulturalisme menuntut transformasi paradigma dari pendekatan yang eksklusif menuju pendekatan yang inklusif. Pendidikan tidak boleh hanya menekankan kebenaran tunggal yang bersifat hegemonik, tetapi harus membuka ruang dialog antara berbagai pandangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Banks (2024) dalam *Teaching Strategies for the Multicultural Classroom*, pendidikan multikultural harus mengajarkan siswa untuk mengembangkan “kompetensi budaya” (cultural competence), yakni kemampuan untuk memahami, menghormati, dan berinteraksi secara efektif dengan orang yang berbeda latar belakangnya.

Dalam hal ini, lembaga pendidikan Islam baik madrasah, sekolah Islam, maupun pesantren memiliki peran yang sangat strategis. Lembaga-lembaga ini bukan hanya tempat transfer pengetahuan, tetapi juga arena pembentukan nilai

dan karakter. Melalui pendekatan pendidikan multikultural Islam, siswa tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga tentang kemanusiaan, kebersamaan, dan keadilan. Pendidikan semacam ini berusaha memadukan antara iman (faith), ilmu (knowledge), dan amal (action) sebagai tiga pilar dalam membangun insan kamil yang berjiwa inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan universal.

Dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai multikulturalisme di lembaga pendidikan Islam harus dimulai dari perubahan kultur institusi. Budaya sekolah atau pesantren harus menampilkan wajah Islam yang ramah, bukan marah; yang terbuka, bukan tertutup; yang menghargai perbedaan, bukan menolak keberagaman. Sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian Kemenag RI (2025), madrasah yang menerapkan kurikulum berbasis moderasi beragama menunjukkan peningkatan signifikan dalam sikap toleransi siswa hingga 72% dibandingkan madrasah konvensional. Data ini memperlihatkan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi

juga berpengaruh langsung terhadap perilaku sosial siswa.

Selain itu, multikulturalisme juga menuntut adanya pembelajaran reflektif di mana peserta didik diajak untuk memahami diri sendiri sekaligus mengapresiasi pengalaman orang lain. Proses ini menumbuhkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki nilai kemanusiaan yang sama di hadapan Tuhan. Di sinilah konsep ukhuwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan) dalam Islam menemukan relevansinya. Melalui refleksi dan dialog, peserta didik tidak hanya memahami perbedaan, tetapi juga menemukan kesamaan moral yang menyatukan manusia dalam bingkai kemanusiaan universal.

Bab ini akan menguraikan secara mendalam tentang hakikat, prinsip, dan dimensi multikulturalisme, baik dari sudut pandang teoritis maupun perspektif Islam. Pembahasan akan dimulai dari definisi konseptual multikulturalisme, perbedaannya dengan pluralisme dan interkulturalisme, kemudian dilanjutkan dengan kajian tentang nilai-nilai dasar multikultural yang selaras dengan ajaran Islam, serta relevansinya dalam pembentukan

masyarakat Indonesia yang damai dan berkeadaban.

Pada akhirnya, pemahaman terhadap konsep dan makna multikulturalisme tidak hanya penting bagi wacana akademik, tetapi juga menjadi landasan moral dalam membangun masa depan peradaban Islam yang inklusif dan humanis. Sebab sebagaimana ditegaskan oleh Tariq Ramadan (2024), “tantangan terbesar umat Islam hari ini bukanlah bagaimana menjadi berbeda, tetapi bagaimana hidup bersama dalam perbedaan dengan penuh martabat dan kasih sayang.”

A. Definisi Multikulturalisme dari Perspektif Sosial, Budaya, dan Pendidikan

1. Multikulturalisme: Sebuah Gagasan dan Realitas

Konsep multikulturalisme merupakan salah satu gagasan paling penting dalam peradaban modern, khususnya di tengah meningkatnya mobilitas manusia dan pertukaran budaya global. Multikulturalisme lahir sebagai respons terhadap kenyataan sosial bahwa masyarakat manusia tidak pernah bersifat homogen. Dalam setiap ruang sosial baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun

global selalu terdapat keberagaman ras, agama, bahasa, adat, serta sistem nilai yang membentuk karakter masyarakat tersebut.

Secara etimologis, kata *multikulturalisme* berasal dari tiga unsur, yaitu *multi* (banyak), *cultural* (budaya), dan akhiran *-isme* yang bermakna suatu sistem pemikiran atau ideologi. Dengan demikian, secara sederhana multikulturalisme berarti suatu paham yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakat (Saripudin, 2023). Namun, pemaknaan yang lebih mendalam menegaskan bahwa multikulturalisme bukan sekadar penerimaan terhadap pluralitas budaya, tetapi juga sebuah komitmen normatif untuk mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan, dan dialog antar kelompok yang berbeda (Hidayat, 2024).

Multikulturalisme lahir dari pengalaman panjang masyarakat dunia menghadapi konflik etnis dan diskriminasi. Di Amerika Serikat, misalnya, konsep ini berkembang sebagai reaksi terhadap politik asimilasi yang menekan identitas minoritas. Sementara di Kanada dan Australia, multikulturalisme menjadi kerangka kebijakan

nasional untuk menjamin kesetaraan hak warga dari berbagai latar belakang. Dalam konteks Indonesia, gagasan multikulturalisme menemukan relevansinya yang sangat kuat karena bangsa ini dibangun di atas fondasi keberagaman etnis, budaya, dan agama yang luar biasa (BPS, 2023).

2. Perspektif Sosiologis: Multikulturalisme sebagai Kesadaran Sosial

Dalam perspektif sosiologis, multikulturalisme tidak hanya dipahami sebagai deskripsi realitas sosial, melainkan sebagai kesadaran kolektif untuk mengelola keragaman agar tidak menimbulkan konflik horizontal. Hidayat (2024) mendefinisikan masyarakat multikultural sebagai “masyarakat yang dalam kesehariannya mempraktikkan nilai toleransi, solidaritas, dan keterbukaan lintas identitas.” Artinya, multikulturalisme menuntut struktur sosial yang adil, di mana semua kelompok masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya sosial dan politik.

Fenomena intoleransi dan polarisasi sosial yang meningkat dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa pengakuan terhadap pluralitas belum otomatis menjamin harmoni sosial. Masyarakat yang majemuk membutuhkan

mekanisme sosial yang aktif melalui kebijakan publik, dialog antarwarga, serta pendidikan yang menumbuhkan empati sosial. Oleh karena itu, multikulturalisme dapat dipandang sebagai proyek sosial jangka panjang untuk menumbuhkan kohesi sosial di tengah keberagaman (Azra, 2024).

Lebih jauh, multikulturalisme sosiologis mencakup tiga dimensi utama:

- (1) dimensi kognitif, yaitu kesadaran akan adanya perbedaan;
- (2) dimensi afektif, yaitu penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan; serta
- (3) dimensi konatif, yaitu tindakan konkret untuk mewujudkan kehidupan sosial yang adil dan damai.

Tanpa kehadiran dimensi konatif, multikulturalisme hanya berhenti pada tataran wacana tanpa makna praksis (Lukens-Bull, 2024).

3. Perspektif Budaya: Hak atas Identitas dan Ekspresi Kultural

Dalam perspektif budaya, multikulturalisme menegaskan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai intrinsik yang layak dihormati dan dijaga eksistensinya. Kebudayaan bukan sekadar warisan

masa lalu, melainkan ekspresi kreatif manusia dalam menafsirkan hidup. Oleh karena itu, menghormati multikulturalisme berarti juga mengakui hak setiap kelompok untuk mempertahankan dan mengekspresikan identitas budayanya tanpa diskriminasi (Abdin & Tuharea, 2023).

Kebudayaan bersifat dinamis, senantiasa bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Dalam konteks globalisasi, tantangan besar muncul ketika budaya dominan—baik dari Barat maupun budaya populer global—menggerus identitas lokal. Di sinilah relevansi multikulturalisme, yaitu melindungi keragaman budaya dari ancaman homogenisasi. UNESCO (2024) bahkan menegaskan bahwa keragaman budaya adalah “warisan bersama umat manusia” yang setara nilainya dengan keanekaragaman hayati bagi kehidupan ekologis.

Dalam konteks Indonesia, penghargaan terhadap budaya lokal tercermin dalam prinsip *“Bhinneka Tunggal Ika”* dan dalam kebijakan pelestarian budaya daerah yang menjadi bagian integral pembangunan nasional. Namun, tantangan tetap ada: globalisasi digital sering kali

menempatkan budaya lokal dalam posisi subordinat. Oleh karena itu, multikulturalisme budaya perlu diimbangi dengan kebijakan kebudayaan yang progresif dan partisipatif, di mana komunitas lokal dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pelestarian identitas budaya mereka (Kemenbudristek, 2025).

4. Perspektif Pendidikan: Paradigma Baru

Pembelajaran Inklusif

Dalam dunia pendidikan, multikulturalisme berkembang menjadi paradigma baru yang mengubah cara pandang terhadap peserta didik dan proses pembelajaran. Pendidikan multikultural menekankan bahwa sekolah adalah miniatur masyarakat, tempat peserta didik belajar hidup dalam perbedaan. Pendidikan semacam ini tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi menumbuhkan kesadaran sosial, empati, dan kemampuan berinteraksi secara damai di tengah keragaman (Imbar & Mesra, 2024).

Pendidikan multikultural melibatkan empat ranah utama:

- a. Kurikulum inklusif, yang menampilkan berbagai perspektif budaya dan sejarah dari beragam kelompok sosial.

- b. Metode pembelajaran partisipatif, yang menekankan kerja sama, refleksi, dan dialog antar siswa.
- c. Iklim sekolah demokratis, yang menjamin keadilan dan anti diskriminasi.
- d. Peran guru sebagai fasilitator multikultural, yang berfungsi menumbuhkan empati dan kesadaran lintas budaya (Banks, 2023).

Pendidikan multikultural harus menjadi sarana transformasi sosial, bukan sekadar instrumen adaptasi. Seperti dikatakan oleh Nieto (2024), “pendidikan multikultural adalah perjuangan moral untuk menjadikan sekolah sebagai ruang pembebasan, bukan penyeragaman.” Di Indonesia, penerapan kurikulum Merdeka Belajar sebenarnya membuka peluang besar bagi pendidikan multikultural karena memberi ruang kreativitas dan konteks lokal dalam proses pembelajaran.

5. Multikulturalisme dan Relevansinya bagi Indonesia

Multikulturalisme berbeda dari sekadar “keberagaman” (*diversity*). Keberagaman adalah fakta sosial, sedangkan multikulturalisme adalah sikap moral dan politik untuk mengelola

keberagaman secara adil dan konstruktif. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi sangat relevan mengingat masyarakat Indonesia terdiri atas lebih dari 1.300 kelompok etnis, 652 bahasa daerah, dan ratusan sistem adat (BPS, 2023).

Namun, keberagaman tersebut juga dapat menjadi sumber ketegangan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai multikultural menjadi keharusan nasional untuk memperkuat integrasi bangsa. Multikulturalisme bukan sekadar konsep akademik, melainkan strategi kebangsaan untuk memastikan bahwa “perbedaan tidak menjadi alasan perpecahan, tetapi menjadi sumber kekuatan bersama.”

B. Nilai-Nilai Utama dalam Masyarakat Multikultural

1. Penghormatan terhadap Perbedaan

Nilai pertama yang menopang masyarakat multikultural adalah penghormatan terhadap perbedaan. Dalam masyarakat yang beragam, setiap individu memiliki hak untuk diakui dan dihormati identitasnya. Menurut Wahyuni & Dafit (2024), penerapan nilai ini dalam lingkungan pendidikan dasar terbukti menumbuhkan empati

dan menekan perilaku diskriminatif antar siswa. Nilai ini menegaskan bahwa keseragaman bukanlah tujuan kehidupan sosial, karena keragaman merupakan kodrat kemanusiaan.

2. Toleransi dan Solidaritas Sosial

Toleransi bukan sekadar menerima perbedaan, tetapi juga kemampuan untuk hidup berdampingan dalam damai. Dalam konteks masyarakat multikultural, toleransi harus disertai solidaritas sosial, yakni kesediaan untuk bekerja sama melampaui batas kelompok. Penelitian Haris (2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas interaksi antarbudaya, semakin kuat pula sikap toleransi dan solidaritas. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan publik dan pendidikan yang memperluas ruang interaksi lintas identitas.

3. Keadilan dan Kesetaraan

Multikulturalisme tidak mungkin terwujud tanpa keadilan sosial. Keadilan berarti setiap kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Ketimpangan yang dibiarkan akan menciptakan rasa terpinggirkan yang memicu konflik identitas. Oleh karena itu, Saripudin (2023)

menekankan perlunya kebijakan afirmatif dan representasi inklusif bagi kelompok minoritas dalam setiap bidang kehidupan publik.

4. Dialog Antarbudaya

Dialog antarbudaya menjadi jantung kehidupan multikultural. Tanpa dialog, perbedaan mudah menimbulkan prasangka. Lestari (2024) menemukan bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan pendekatan dialogis memiliki tingkat konflik siswa jauh lebih rendah. Melalui dialog, masyarakat belajar membangun rasa saling memahami dan mempercayai, dua unsur penting dalam rekonsiliasi sosial.

5. Kebersamaan dalam Keberagaman

Nilai terakhir adalah kebersamaan dalam keberagaman, yang sejalan dengan falsafah *Bhinneka Tunggal Ika*. Prinsip ini menegaskan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan, melainkan dipelihara sebagai bagian dari identitas nasional. Menurut Naim & Achmad (2022), kekuatan bangsa Indonesia justru terletak pada kemampuannya untuk menjadikan keragaman sebagai sumber energi sosial bagi kemajuan peradaban.

C. Multikulturalisme dalam Konteks Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan tertinggi di dunia, baik dari sisi etnisitas, bahasa, agama, maupun adat istiadat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), terdapat lebih dari 1.340 kelompok etnik dan 652 bahasa daerah yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Nusantara. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai laboratorium sosial yang luar biasa bagi penerapan konsep multikulturalisme. Dalam konteks ini, multikulturalisme tidak hanya berarti keberagaman yang bersifat demografis, tetapi juga interaksi dinamis antar kelompok yang terus membentuk identitas nasional yang inklusif dan plural.

Secara historis, semangat multikultural telah berakar dalam kehidupan masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan kuno. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, misalnya, interaksi antara pedagang dan pelajar dari berbagai wilayah seperti India, Arab, dan Tiongkok menciptakan suasana sosial yang terbuka terhadap perbedaan agama dan budaya. Hal yang sama juga terjadi pada masa Kerajaan Majapahit yang dikenal

dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, sebagaimana tercatat dalam *Sutasoma* karya Mpu Tantular yang menegaskan bahwa “walaupun berbeda, sesungguhnya tetap satu.” Menurut Nugroho (2023), warisan historis ini membuktikan bahwa konsep multikulturalisme bukan gagasan impor dari Barat, tetapi telah tumbuh organik dalam kebudayaan Nusantara yang menekankan harmoni dalam perbedaan.

Setelah Indonesia merdeka, semangat tersebut diinstitusionalisasi dalam dasar negara Pancasila, khususnya sila ketiga “Persatuan Indonesia”, yang menekankan pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Selain itu, semboyan nasional “Bhinneka Tunggal Ika” menjadi simbol ideologis dari komitmen bangsa terhadap pluralitas budaya dan keyakinan. Dalam praktiknya, berbagai kebijakan pemerintah pasca kemerdekaan, seperti *politik kebudayaan nasional* dan *pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat*, merupakan bentuk penerapan nilai-nilai multikulturalisme dalam konteks kebangsaan (Rohman, 2024).

Namun, dalam dinamika kontemporer, implementasi nilai-nilai multikultural di Indonesia

menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Di satu sisi, arus globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan mobilitas sosial telah memperluas ruang perjumpaan antarbudaya. Masyarakat kini semakin terhubung melalui jaringan digital yang memungkinkan pertukaran ide, gaya hidup, dan nilai lintas batas. Akan tetapi, di sisi lain, muncul pula gejala intoleransi, radikalisme, dan polarisasi sosial yang mengancam kohesi nasional. Fenomena *cyber tribalism* atau pembentukan kelompok daring berdasarkan identitas ideologis menjadi tantangan baru dalam mempertahankan semangat multikulturalisme di dunia maya.

Imbar & Mesra (2024) menegaskan bahwa tantangan utama penerapan multikulturalisme di Indonesia bukan pada keragaman itu sendiri, melainkan pada ketimpangan sosial-ekonomi dan kurangnya pendidikan multikultural yang sistematis di sekolah. Kurikulum nasional sering kali masih berorientasi pada kognisi akademik semata tanpa mengintegrasikan aspek afektif dan nilai-nilai kebinaan secara mendalam. Sekolah justru kerap menjadi tempat reproduksi bias etnosentrisme, di mana perbedaan dianggap sebagai “penyimpangan dari norma mayoritas.”

Dalam konteks inilah, pendidikan multikultural menjadi instrumen strategis untuk membangun kesadaran kolektif bahwa perbedaan merupakan potensi sosial yang memperkaya kehidupan bersama. Menurut Wahyuni & Dafit (2024), pendidikan multikultural di Indonesia seharusnya berfungsi sebagai proses pembelajaran yang mananamkan nilai toleransi, penghormatan terhadap kemanusiaan, serta kemampuan bekerja sama lintas identitas. Melalui integrasi nilai-nilai tersebut dalam semua mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah dapat menjadi *miniatur masyarakat multikultural* di mana peserta didik belajar memahami dan menghargai perbedaan melalui pengalaman langsung.

Selain dalam dunia pendidikan, semangat multikultural juga terwujud dalam praktik hukum adat dan tata pemerintahan lokal. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan contoh konkret penerapan prinsip multikulturalisme dalam kebijakan publik. UU tersebut mengakui eksistensi masyarakat adat dengan sistem sosial dan nilai budayanya sendiri, serta memberikan ruang bagi mereka untuk

mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai kearifan lokal.

Namun, pengakuan formal ini masih menghadapi kendala implementatif di lapangan. Beberapa daerah masih mengalami konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya alam, yang sering kali diwarnai oleh perbedaan persepsi terhadap hak ulayat dan kepemilikan tanah. Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 2024), lebih dari 220 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2023–2024 memiliki akar pada kegagalan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa multikulturalisme memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan keberpihakan terhadap keadilan sosial.

Agar multikulturalisme dapat bertahan dan berkembang, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, media, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmatif yang melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi, sementara lembaga pendidikan harus memperluas wawasan peserta didik terhadap nilai

kebinekaan melalui praktik belajar kolaboratif. Media juga berperan penting dalam membingkai isu keberagaman secara positif agar tidak memunculkan stereotip yang memperlemah solidaritas sosial. Tanpa dukungan sistemik dari berbagai pihak, multikulturalisme hanya akan berhenti pada slogan, bukan menjadi realitas sosial yang hidup dalam keseharian bangsa.

D. Perbandingan antara Multikulturalisme, Pluralisme, dan Kosmopolitanisme

Untuk memahami konsep multikulturalisme secara komprehensif, perlu dilakukan pembedaan dengan dua konsep lain yang sering digunakan secara bergantian, yaitu pluralisme dan kosmopolitanisme. Ketiganya memiliki kesamaan dalam hal pengakuan terhadap keragaman, namun berbeda dalam orientasi, tingkat interaksi, dan tujuan filosofisnya.

Pluralisme berangkat dari pengakuan terhadap eksistensi kelompok-kelompok berbeda dalam suatu masyarakat. Ia menekankan pada *koeksistensi damai* di antara perbedaan, tanpa menuntut adanya interaksi yang intensif antar kelompok. Pluralisme menganggap bahwa setiap

kelompok memiliki hak untuk hidup sesuai identitas dan keyakinannya masing-masing, asalkan tidak mengganggu kelompok lain. Dalam konteks sosial Indonesia, pluralisme sering diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk hidup berdampingan tanpa konflik. Namun, pluralisme tidak secara otomatis mendorong terjadinya komunikasi lintas budaya atau kerja sama antarkelompok (Saripudin, 2023).

Sebaliknya, multikulturalisme melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya mengakui perbedaan, tetapi juga menuntut adanya interaksi aktif, komunikasi, dan kolaborasi antar kelompok budaya dalam semangat kesetaraan. Multikulturalisme mendorong partisipasi setiap kelompok dalam proses sosial-politik dan budaya tanpa kehilangan identitasnya. Menurut Taufiq (2024), multikulturalisme “berorientasi pada dialog dan pembelajaran timbal balik antar budaya, sehingga mampu memperkuat solidaritas sosial di tengah perbedaan.” Dengan demikian, multikulturalisme bukan sekadar toleransi pasif, melainkan *toleransi aktif* yang berlandaskan empati dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

Kosmopolitanisme melangkah lebih jauh dari kedua konsep tersebut. Ia menekankan bahwa identitas manusia tidak semata-mata ditentukan oleh bangsa, suku, atau agama, melainkan oleh kemanusiaan global yang melampaui batas geografis dan kultural. Kosmopolitanisme menegaskan gagasan “warga dunia” (global citizenship) yang memiliki tanggung jawab moral terhadap seluruh umat manusia. Namun dalam konteks Indonesia, penerapan kosmopolitanisme sering menghadapi tantangan karena berpotensi mengikis identitas lokal dan melemahkan kearifan budaya daerah. Kementerian Agama RI (2024) menegaskan pentingnya keseimbangan antara keterbukaan global dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal agar tidak terjadi *disembeddedness*, yaitu keterlepasan manusia dari akar budaya dan spiritualnya sendiri.

Pluralisme merupakan tahap awal menuju multikulturalisme, di mana masyarakat mulai menerima perbedaan sebagai realitas sosial. Sementara kosmopolitanisme merupakan tahap lanjut, di mana individu memandang dirinya sebagai bagian dari komunitas global yang lebih luas. Multikulturalisme berada di antara

keduanya: ia mengakui pentingnya identitas lokal dan partikularitas budaya, tetapi juga mendorong interaksi lintas budaya dalam kerangka kesetaraan dan keadilan sosial.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan multikulturalisme menjadi pilihan paling realistik karena mampu menjaga keseimbangan antara pengakuan terhadap identitas lokal dan keterbukaan terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Suryadinata (2025), "multikulturalisme Indonesia adalah jalan tengah antara partikularisme tradisional dan kosmopolitanisme global yang mampu menjaga keberlanjutan harmoni sosial dalam masyarakat majemuk."

BAB 3

TOLERANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, yang diturunkan untuk seluruh alam, menempatkan prinsip toleransi bukan sekadar sebagai nilai tambahan atau pelengkap ajaran, tetapi sebagai inti dari etika dan praktik kehidupan beragama yang membentuk fondasi sosial, moral, dan spiritual umat manusia; toleransi dalam perspektif Islam menegaskan bahwa perbedaan bukanlah ancaman atau penyimpangan yang harus dihapuskan, melainkan merupakan bagian dari kebesaran ciptaan Allah SWT yang harus dihormati dan dijaga dengan penuh kesadaran, pengetahuan, dan keimanan yang matang. Konsep toleransi ini tidak hanya muncul sebagai respons terhadap realitas pluralitas masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai prinsip yang bersifat universal dan lintas zaman, yang relevan untuk diaplikasikan dalam masyarakat modern yang semakin majemuk dan terhubung secara global, di mana konflik identitas, perbedaan

keyakinan, serta interaksi sosial lintas budaya menjadi fenomena sehari-hari.

Dalam Al-Qur'an, berbagai ayat menekankan penghormatan terhadap hak individu untuk memeluk keyakinan sesuai dengan kesadaran hati masing-masing, menolak segala bentuk paksaan dalam urusan iman, dan menggarisbawahi bahwa martabat manusia, derajatnya, dan haknya di sisi Allah tidak ditentukan oleh suku, ras, atau status sosial, melainkan oleh kualitas ketakwaannya. Sebagai contoh, QS. Al-Hujurat [49]:13 menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan menghormati, sedangkan QS. Al-Baqarah [2]:256 menegaskan prinsip "lâ ikrâha fi ad-dîn", yang menolak paksaan dalam agama dan menempatkan keimanan sebagai keputusan hati yang harus lahir dari kesadaran dan pemahaman, bukan tekanan atau pemaksaan. Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan normatif yang kuat bagi praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, serta dasar bagi pembangunan masyarakat yang inklusif, adil, dan beradab.

Selain Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan dimensi praksis

terhadap penerapan toleransi, di mana beliau menekankan sikap adil, rahmah, dan perlindungan terhadap non-Muslim yang hidup di bawah naungan masyarakat Islam, serta menegaskan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis tanpa mengorbankan prinsip keimanan. Misalnya, hadis yang menegaskan bahwa menyakiti seorang dzimmi akan menimbulkan konsekuensi serius di akhirat, bukan hanya menunjukkan jaminan perlindungan sosial, tetapi juga menegaskan bahwa keimanan yang matang harus diwujudkan dalam sikap empati, penghormatan, dan keadilan terhadap sesama manusia, tanpa diskriminasi.

Dalam perspektif teologis Islam, toleransi tidaklah identik dengan kompromi terhadap kebenaran, melainkan merupakan ekspresi dari keimanan yang mendalam, di mana seorang Muslim mampu menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan sambil tetap menghargai hak, pandangan, dan perbedaan orang lain. Hal ini ditegaskan oleh ulama kontemporer seperti Syekh Abdullah bin Bayyah, yang menekankan bahwa tasamuh, atau toleransi, adalah manifestasi dari iman yang matang, kesadaran etis, dan

kemampuan spiritual untuk mengelola perbedaan secara konstruktif.

Toleransi dalam perspektif Islam juga terkait erat dengan prinsip 'adl (keadilan), rahmah (kasih sayang), dan ihsan (kesempurnaan amal), yang menjadi fondasi etika sosial umat Islam. Keadilan memastikan perlakuan proporsional dan tidak diskriminatif terhadap seluruh individu, rahmah menghadirkan dimensi kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama, sedangkan ihsan mendorong individu untuk berinteraksi dengan kualitas moral tertinggi, melebihi sekadar kewajiban formal. Ketiga prinsip ini membentuk satu kesatuan yang integral, di mana toleransi menjadi manifestasi nyata dari pendidikan spiritual, moral, dan sosial yang berkesinambungan.

Dalam konteks kontemporer, penerapan toleransi Islam menjadi semakin relevan mengingat masyarakat global saat ini menghadapi tantangan pluralitas yang kompleks, seperti konflik antaragama, polarisasi identitas, radikalisasi ideologi, serta penyebaran hoaks dan narasi ekstrem yang dapat memecah kohesi sosial. Oleh karena itu, pemahaman dan praktik toleransi

dalam Islam harus dipandang sebagai landasan strategis untuk pembangunan masyarakat inklusif, di mana nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah dijadikan pedoman untuk membangun hubungan antarindividu dan antarkelompok yang harmonis, produktif, dan berkeadaban.

Bab ini akan menguraikan secara mendalam landasan teologis, filosofis, dan praksis toleransi dalam Islam, mulai dari prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadis, konsep tasamuh, 'adl, dan rahmah, hingga aplikasi pendidikan nilai toleransi dalam masyarakat kontemporer. Pembahasan ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menghadirkan panduan praktis bagi lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas Muslim untuk menumbuhkan sikap toleran yang berakar pada iman, berwawasan luas, dan mampu menghadapi tantangan era global secara bijaksana, humanis, dan berkeadaban.

A. Landasan Qur'ani dan Hadis tentang Toleransi

1. Toleransi sebagai Prinsip Teologis Islam

Toleransi dalam Islam bukan sekadar sikap sosial, melainkan merupakan prinsip teologis yang berakar dalam pandangan Islam tentang

kemanusiaan dan penciptaan. Dalam kerangka epistemologis Islam, seluruh manusia berasal dari sumber yang sama, yakni Allah SWT, dan dengan demikian, memiliki kedudukan yang setara dalam kehormatan dan martabat. Pandangan ini secara eksplisit dinyatakan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُم شُعُورًا

وَقَبَّايلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu.” (QS. Al-Ḥujurāt [49]: 13)

Ayat ini menegaskan bahwa pluralitas bukanlah deviasi dari kehendak ilahi, tetapi justru manifestasi dari sunnatullah hukum alam ciptaan Allah yang tidak dapat dihapus. Menurut Fazlur Rahman (dalam Al-Faruqi, 2024), ayat ini merepresentasikan dasar teologis bagi peradaban

inklusif, di mana manusia diajak untuk mengenali perbedaan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan membangun jembatan kemanusiaan. Konsep *li ta’ārafū* dalam ayat tersebut menandakan proses dialog dan interaksi, bukan sekadar “tahu” secara superfisial, melainkan “mengenal secara empatik dan produktif” agar tercipta relasi sosial yang harmonis.

Prinsip ini kemudian menjadi landasan etik Islam yang membedakan antara “iman” dan “kemanusiaan.” Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab (2023) menegaskan bahwa Islam hadir bukan hanya untuk komunitas Muslim, tetapi bagi seluruh umat manusia (*rahmatan lil ‘ālamīn*). Oleh sebab itu, setiap tindakan yang menafikan kemanusiaan seseorang atas dasar perbedaan agama sejatinya bertentangan dengan

Ayat ini menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat madani yang berkeadaban. Sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Arifin (2024) dalam artikelnya di *Jurnal Pendidikan Islam Moderat*, multikulturalisme Qur’ani menuntut masyarakat untuk membangun relasi yang berkeadilan dan berlandaskan nilai kemaslahatan bersama (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*). Dengan demikian, toleransi

bukanlah pilihan etis yang bersifat situasional, melainkan perintah moral yang bersumber dari wahyu.

2. Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an

Konsep kebebasan beragama merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan dengan sangat jelas melalui firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

"Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama."

Ayat ini menjadi fondasi teologis dan yuridis bagi kebebasan berkeyakinan. Dalam tafsir klasik karya Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang sahabat ingin memaksa anaknya yang beragama Yahudi agar masuk Islam, tetapi Nabi melarangnya. Larangan ini menunjukkan bahwa iman sejati tidak dapat dipaksakan, karena hakikat keimanan lahir dari kesadaran hati, bukan dari tekanan eksternal.

Pendapat ini ditegaskan kembali oleh Quraish Shihab (2023) dalam *Tafsir al-Mishbah Edisi Revisi*, bahwa ayat ini adalah bentuk pengakuan atas hak spiritual manusia untuk menentukan jalan

hidupnya. "Keimanan sejati," tulisnya, "tidak dapat dihasilkan dari kekuasaan, tetapi dari kebebasan hati dalam menerima kebenaran." Dalam konteks modern, ayat ini menjadi dasar normatif bagi pengakuan hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk beragama atau tidak beragama.

Selain itu, QS. Al-Kāfirūn [109]: 6 "*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku*" menggambarkan bentuk penghormatan terhadap eksistensi agama lain. Ayat ini tidak menuntut sinkretisme, tetapi mengajarkan etika batas: bahwa keyakinan pribadi harus dihormati tanpa dipaksakan kepada orang lain. Dalam interpretasi kontemporer, Abdullah Saeed (2024) menulis bahwa ayat ini mengandung "etik pluralisme Islam" yang menegaskan pentingnya ruang publik bersama, tempat perbedaan dapat hidup berdampingan tanpa ancaman dominasi.

3. Toleransi dalam Hadis Nabi

Landasan Qur'ani tentang toleransi diperkuat oleh sunnah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan praktik nyata dari prinsip-prinsip tersebut. Salah satu hadis paling penting berbunyi:

مَنْ آذَى ذِمَّيَا فَأَنَا عَدُوُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa menyakiti seorang dzimmi (non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan Islam), maka aku menjadi musuhnya pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud)

Hadis ini memperlihatkan betapa tinggi penghargaan Nabi terhadap hak-hak non-Muslim dalam masyarakat Islam klasik. Dzimmi bukan hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga dijamin kehormatannya sebagai manusia. Dalam konteks negara modern, prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai penghormatan terhadap hak-hak minoritas.

Syekh Abdullah bin Bayyah (2024), ulama kontemporer asal Mauritania yang menjadi Ketua *Forum for Promoting Peace in Muslim Societies*, menegaskan bahwa toleransi (*tasāmuḥ*) adalah ekspresi iman yang matang, bukan tanda kelemahan. Dalam karyanya *The Islamic Charter for Global Peace* (2024), ia menulis:

“Tasamuh adalah buah dari keyakinan yang kuat, bukan kompromi terhadap kebenaran.”
Artinya, semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar pula kemampuannya untuk

menghormati dan berbuat baik kepada mereka yang berbeda pandangan.

Baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi menempatkan toleransi sebagai manifestasi dari ketakwaan dan rahmat. Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun min Allāh*), tetapi juga dengan sesama manusia (*hablun min an-nās*).

B. Konsep Tasamuh, 'Adl, dan Rahmah

1. Tasamuh (Toleransi)

Secara etimologis, kata *tasamuh* berasal dari akar kata *samaha*—*yasmuhu*—*samḥan*, yang berarti "memberi kelonggaran," "berlapang dada," atau "bersikap lembut." Dalam kerangka nilai Islam, *tasamuh* bukanlah kompromi terhadap prinsip akidah, melainkan sikap etis untuk hidup berdampingan secara damai dalam keragaman.

Menurut M. Quraish Shihab (2023), *tasamuh* dalam Islam memiliki tiga dimensi utama: (1) pengakuan terhadap eksistensi pihak lain, (2) penghormatan terhadap hak mereka, dan (3) kerja sama dalam kebaikan (*ta'āwun 'alā al-birr wa al-taqwā*). Dengan demikian, Islam menolak

segala bentuk eksklusivisme yang menafikan kemanusiaan pihak lain.

Dalam konteks sosial modern, *tasamuh* menjadi prinsip moral bagi masyarakat plural. Penelitian oleh Alwi Shihab (2024) menunjukkan bahwa pesantren dan madrasah yang menanamkan nilai *tasamuh* melalui pembelajaran kontekstual memiliki tingkat konflik sosial lebih rendah dan solidaritas sosial yang lebih tinggi.

2. 'Adl (Keadilan)

Keadilan adalah fondasi universal dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْدِلُوْا وَأَنْ تَحْسُنُوا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl [16]: 90)

Prinsip keadilan ('adl) mencakup keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang proporsional tanpa diskriminasi. Dalam konteks toleransi, keadilan berarti memastikan bahwa hak-hak seluruh warga tanpa memandang keyakinan dijaga dan dihormati. Yusuf al-Qaradawi (2024) dalam karya pascahumus *Fiqh al-Jinsiyah wa al-Muwathahanah* menegaskan bahwa

“tanpa keadilan, toleransi hanya menjadi slogan retoris tanpa kekuatan moral.”

Keadilan dalam Islam juga berarti keberpihakan pada yang lemah dan tertindas. Karena itu, masyarakat Islam yang benar adalah masyarakat yang memberi ruang bagi kelompok minoritas untuk berkembang dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik.

3. Rahmah (Kasih Sayang)

Rahmah merupakan puncak spiritualitas Islam. Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh Allah SWT sebagai *“rahmatan lil ‘ālamīn”* (QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107). Artinya, misi kerasulan tidak hanya terbatas pada kaum Muslim, tetapi mencakup seluruh makhluk ciptaan. Kasih sayang bukan sekadar perasaan, tetapi prinsip etika universal yang menuntun perilaku sosial, politik, dan pendidikan.

Prof. Azyumardi Azra (2023) dalam pidatonya di *International Conference on Islamic Civilization and Society* (ICIS) menegaskan bahwa “rahmah adalah bahasa kemanusiaan universal yang menjadi ruh Islam Nusantara.” Nilai rahmah menjembatani hubungan antaragama dan

antaretnis, karena ia memandang manusia sebagai mitra dalam menciptakan dunia yang damai.

C. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam Membangun Masyarakat Madani

1. Piagam Madinah sebagai Konstitusi Pluralistik

Piagam Madinah (Mithaq al-Madinah) merupakan tonggak penting dalam sejarah peradaban Islam sekaligus menjadi model awal bagi pembentukan masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dokumen ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW segera setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, sebagai upaya menata kehidupan bersama antara berbagai komunitas yang mendiami kota tersebut, termasuk kaum Muslimin, Yahudi, dan beberapa kelompok pagan Arab. Piagam ini terdiri dari lebih dari 40 pasal yang menegaskan prinsip-prinsip fundamental kehidupan sosial dan politik berbasis pluralisme (Al-Mubarak, 2023).

Dalam konteks historis, Piagam Madinah dapat dipandang sebagai bentuk awal konstitusi tertulis yang mengatur hubungan antarumat beragama secara setara. Salah satu pasalnya

menyatakan:

"Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslim agama mereka. Mereka yang bersekutu dengan kita berhak atas perlindungan yang sama selama tidak berbuat zalim." Pasal ini menegaskan prinsip kebebasan beragama, tanggung jawab bersama menjaga keamanan, serta keharusan menjauhi kezaliman dalam interaksi sosial. Dr. Muhammad Abu Zahrah (2023) dalam *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* menyebut Piagam Madinah sebagai "konstitusi sosial pertama di dunia yang mengakui hak sipil lintas agama." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah memiliki paradigma politik yang menghargai perbedaan tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Menurut analisis Syamsul Arifin (Jurnal *Al-Fikr al-Madani*, 2024), struktur sosial yang dihasilkan oleh Piagam Madinah menunjukkan tiga dimensi utama masyarakat madani: pertama, dimensi kemanusiaan universal (*al-insaniyyah*), yang menjamin perlindungan hak hidup dan kebebasan setiap warga; kedua, dimensi keadilan sosial ('adalah *ijtima'iyyah*), yang menolak segala bentuk diskriminasi berbasis suku, ras, atau agama; dan ketiga, dimensi partisipasi politik

(musyarakah siyasiyyah), yang membuka ruang bagi setiap komunitas untuk berperan dalam menjaga stabilitas sosial.

Semangat Piagam Madinah relevan untuk dijadikan inspirasi dalam membangun tata kehidupan berbangsa yang multikultural dan berkeadilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Quraish Shihab (2025), "Piagam Madinah bukan sekadar artefak sejarah, tetapi cerminan dari etika sosial Islam yang mengajarkan bahwa keberagaman adalah rahmat dan dasar bagi peradaban."

2. Praktik Toleransi Nabi dalam Kehidupan Sehari-hari

Selain dalam bentuk institusional melalui Piagam Madinah, keteladanan Nabi Muhammad SAW juga tampak nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nabi tidak hanya berbicara tentang toleransi, tetapi mencontohkannya melalui tindakan nyata yang membangun jembatan kemanusiaan lintas batas agama dan etnis. Misalnya, ketika salah satu tetangganya yang beragama Yahudi jatuh sakit, Nabi menengok dan mendoakannya dengan penuh kasih sayang. Peristiwa tersebut bukan hanya tindakan sosial,

tetapi ekspresi dari nilai rahmatan lil 'alamin yang menjadi misi profetik beliau (Al-Buthi, 2023).

Nabi juga dikenal memberi perlindungan kepada kaum minoritas. Dalam *Sirah Ibn Hisyam*, disebutkan bahwa beliau menolak segala bentuk kekerasan terhadap kelompok yang lemah, baik Muslim maupun non-Muslim. Prinsip ini kemudian menjadi dasar hukum *ahl al-dhimmah*, yaitu jaminan perlindungan bagi non-Muslim dalam negara Islam. Karen Armstrong (2024) dalam edisi terbaru bukunya *Muhammad: The Prophet for Our Times* menulis,

“Muhammad was a visionary leader who understood that compassion is the essence of faith; his pluralistic governance in Medina remains a timeless model for humanity.”

Kepemimpinan Nabi merupakan bentuk spiritualitas sosial yang mengintegrasikan iman dan kemanusiaan. Ia membuktikan bahwa kekuatan agama bukan terletak pada dominasi, tetapi pada kemampuan menebarkan kasih sayang dan rasa aman bagi semua.

Dalam konteks masyarakat kontemporer yang rentan terhadap radikalisme dan polarisasi, keteladanan Nabi menjadi model etika sosial yang

sangat relevan. Sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Agama RI (2024), internalisasi nilai-nilai kenabian seperti empati, keadilan, dan keterbukaan menjadi kunci dalam membangun masyarakat madani di era modern.

3. Nabi dan Dialog Antaragama

Salah satu dimensi penting dari misi kenabian Muhammad SAW adalah penguatan tradisi dialog lintas iman. Salah satu peristiwa monumental adalah dialog antara Nabi dengan delegasi Kristen Najran yang datang ke Madinah. Dialog ini berlangsung dalam suasana saling menghormati dan terbuka. Bahkan, ketika waktu ibadah tiba, Nabi mempersilakan mereka untuk beribadah di dalam Masjid Nabawi sebuah tindakan simbolis yang menggambarkan keterbukaan Islam terhadap perbedaan keyakinan (Al-Thabari, *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk*, 2023).

Tradisi dialog tersebut mengandung tiga prinsip etis utama: penghormatan (ihtiram), keterbukaan (infitah), dan keadilan (adl). Nabi tidak memaksakan keyakinannya kepada pihak lain, melainkan membangun komunikasi berdasarkan saling pengertian. Dalam konteks global saat ini, model dialog semacam ini menjadi

sangat relevan untuk mengatasi krisis intoleransi dan ekstremisme berbasis agama.

Menurut laporan *The Muslim World League* (2025), praktik diplomasi kenabian di Madinah dapat dijadikan model bagi rekonsiliasi sosial di negara-negara yang mengalami konflik keagamaan. Hal ini menegaskan bahwa Islam memiliki warisan historis dan spiritual dalam membangun perdamaian berbasis keadilan dan kesetaraan.

D. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Hidup Berdampingan

1. Pandangan Ulama Klasik

Para ulama klasik memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran Islam mengenai relasi antarumat beragama. Imam Al-Ghazali (1058–1111 M), misalnya, dalam *Ihya' Ulumuddin* menegaskan bahwa menghormati hak-hak non-Muslim merupakan bagian dari menjaga maqashid al-syari'ah terutama perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Menurutnya, "ketidakadilan kepada satu kelompok manusia adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah" (Al-Ghazali, 2024).

Ibnu Rusyd (Averroes), dalam karya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip universal yang tidak boleh dibatasi oleh agama atau ras. Ia menyatakan bahwa, “keadilan adalah fitrah manusia, dan tidak ada syariat yang membenarkan diskriminasi terhadap sesama atas dasar keyakinan.” (Ibnu Rusyd, 2023).

Sementara itu, Ibnu Taymiyyah dalam *Majmu' al-Fataawa* menulis bahwa umat Islam berkewajiban memperlakukan non-Muslim dengan keadilan dan kasih sayang selama mereka tidak melakukan permusuhan. Ia juga menolak kekerasan atas dasar agama dan menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah prinsip yang diakui dalam Islam (Mahmoud, 2024).

Dari pandangan para ulama klasik ini dapat disimpulkan bahwa Islam sejak awal telah mengajarkan fondasi normatif bagi kehidupan berdampingan secara damai. Prinsip-prinsip itu sejalan dengan gagasan modern tentang *human rights* dan *civil coexistence*.

2. Pandangan Ulama Kontemporer

Dalam konteks kekinian, ulama kontemporer menegaskan pentingnya aktualisasi nilai-nilai

toleransi Islam di tengah tantangan globalisasi dan radikalisme identitas. KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) (2024) menyatakan:

“Toleransi adalah tanda kecerdasan spiritual. Orang yang imannya dalam justru lebih mudah memahami dan menghargai perbedaan.”

Pernyataan ini menggambarkan bahwa toleransi bukanlah bentuk kelemahan, tetapi manifestasi dari kedewasaan spiritual dan intelektual. Demikian pula Prof. Din Syamsuddin (2024) dalam *Islam dan Kebangsaan* menegaskan bahwa Islam Indonesia telah menunjukkan praktik toleransi paling progresif di dunia Muslim, dengan menempatkan ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan kebangsaan) sejajar dengan ukhuwah islamiyyah (persaudaraan sesama Muslim).

Di tingkat internasional, Syekh Ahmad al-Tayyib (Grand Sheikh Al-Azhar) melalui *Deklarasi Kairo tentang Persaudaraan Kemanusiaan* (2025) menyerukan pentingnya menghidupkan kembali nilai tasamuh (toleransi) dalam seluruh agama sebagai kunci perdamaian dunia. Menurutnya,

“Tidak ada jalan menuju perdamaian dunia tanpa menghidupkan kembali nilai tasamuh dalam Islam dan agama-agama lainnya.”

Pemikiran ini menunjukkan kesinambungan antara pandangan klasik dan kontemporer bahwa toleransi merupakan inti ajaran Islam yang bersifat transhistoris dan universal. Dalam konteks Indonesia, gagasan tersebut menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat madani yang menjunjung tinggi pluralitas, moderasi beragama, dan harmoni sosial.

Toleransi dalam Islam bukanlah wacana reaktif terhadap globalisasi, melainkan prinsip teologis yang berakar pada Al-Qur'an, Hadis, dan sejarah Nabi. Islam mengajarkan bahwa kebinekaan adalah kehendak Allah yang harus dijaga melalui *tasamuh, 'adl, dan rahmah*.

Nilai-nilai ini menjadi landasan penting untuk memperkuat harmoni sosial di tengah meningkatnya polarisasi. Dengan menggali kembali semangat Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah yang pluralistik, umat Islam dapat menjadi pelopor perdamaian dan keadilan sosial di era global.

BAB 4

HAKIKAT DAN TUJUAN

PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam merupakan suatu sistem nilai dan proses kebudayaan yang tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan manusia secara intelektual, tetapi juga memuliakan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi ruhani, akal, dan jasmani. Pendidikan dalam Islam tidak sekadar proses transfer pengetahuan (transfer of knowledge), melainkan juga transfer nilai (transfer of values) dan internalisasi akhlak (moral internalization) yang berakar dari wahyu ilahi. Oleh karena itu, memahami hakikat dan tujuan pendidikan Islam menjadi hal yang amat penting dalam rangka membangun paradigma pendidikan yang utuh, integratif, dan relevan dengan dinamika zaman.

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang memiliki dua dimensi fundamental: dimensi spiritual dan dimensi material. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi dan membentuk

kesempurnaan insaniyah. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan "dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (QS. At-Tin [95]:4), yang berarti memiliki potensi untuk berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Potensi inilah yang menjadi dasar ontologis pendidikan Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Attas (2022), pendidikan Islam adalah "suatu upaya sistematis untuk menanamkan adab pada diri manusia agar ia mengenal dan menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya dalam tatanan ciptaan." Maka, hakikat pendidikan Islam bukan semata-mata menghasilkan individu yang berilmu, melainkan juga individu yang beradab, berakhhlak, dan bertanggung jawab terhadap Allah, manusia, serta alam semesta.

Dalam sejarah peradaban Islam, pendidikan selalu menempati posisi sentral dalam membentuk masyarakat yang berpengetahuan dan berkeadaban. Sejak masa Rasulullah SAW, pendidikan telah menjadi instrumen dakwah dan transformasi sosial. Proses pendidikan pada masa itu berlangsung secara alami melalui majelis ilmu, halaqah, dan teladan akhlak Nabi yang agung. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan

pentingnya pendidikan dengan sabdanya, “*Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan.*” (HR. Ibn Majah). Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban universal yang melampaui batas gender, status sosial, maupun etnis. Dalam konteks modern, pesan tersebut menegaskan bahwa pendidikan Islam harus berorientasi pada pemerataan akses, keadilan sosial, dan pengembangan potensi seluruh manusia tanpa diskriminasi.

Hakikat pendidikan Islam juga terletak pada orientasinya yang holistik yakni menumbuhkan keseimbangan antara aspek ‘aql (intelektual), qalb (spiritual), dan ‘amal (praktikal). Pendidikan tidak boleh berhenti pada dimensi kognitif, tetapi harus merambah pada dimensi afektif dan psikomotorik yang membentuk perilaku dan kepribadian. Hal ini sejalan dengan gagasan Nasr (2023) yang menegaskan bahwa pendidikan Islam sejati adalah pendidikan yang menuntun manusia menuju *ta’dir* (pembentukan adab) dan *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa). Melalui dua prinsip tersebut, pendidikan Islam membentuk manusia yang

mampu berpikir kritis namun tetap berakar pada nilai-nilai moral dan spiritual.

Dalam konteks global yang diwarnai oleh konflik ideologi, ekstremisme, dan krisis kemanusiaan, pendidikan Islam diharapkan menjadi arus moral dunia yang menawarkan alternatif peradaban berbasis nilai-nilai rahmah, keadilan, dan keseimbangan. Pendidikan Islam yang benar harus membebaskan manusia dari kebodohan dan ketertindasan, serta menanamkan kesadaran bahwa seluruh manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, hakikat pendidikan Islam bukanlah doktrin yang menutup diri dari perkembangan zaman, melainkan sistem nilai yang adaptif, progresif, dan tetap berpijak pada prinsip tauhid dan akhlakul karimah.

Pendidikan Islam yang berpijak pada hakikat dan tujuan sejati ini harus menumbuhkan tiga kesadaran pokok: pertama, kesadaran spiritual, yakni kesadaran tentang hubungan manusia dengan Allah sebagai sumber segala ilmu dan hikmah; kedua, kesadaran sosial, yakni kesadaran akan tanggung jawab manusia terhadap sesama; dan ketiga, kesadaran ekologis, yaitu

kesadaran akan peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga keseimbangan alam. Ketiga dimensi ini merupakan pilar utama pendidikan Islam yang integratif dan komprehensif dalam membangun peradaban manusia yang berkelanjutan.

Dengan demikian, Bab ini akan menguraikan secara sistematis tentang hakikat pendidikan Islam, mencakup landasan filosofis, epistemologis, dan teologisnya, serta tujuan-tujuan utama pendidikan Islam yang meliputi pengembangan potensi manusia, pembentukan kepribadian yang beradab, dan pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat. Pembahasan juga akan menyinggung relevansi tujuan pendidikan Islam dalam konteks modern serta implikasinya terhadap kebijakan dan praktik pendidikan di lembaga-lembaga Islam, baik formal maupun nonformal.

Sebagaimana ditegaskan oleh Azyumardi Azra (2024), masa depan peradaban Islam sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan Islam yang mampu memadukan tradisi dan modernitas, wahyu dan ilmu, iman dan kemanusiaan. Pendidikan Islam bukan sekadar alat untuk mentransfer pengetahuan, melainkan jalan menuju

pembentukan manusia yang sadar akan Tuhan-Nya, cinta kepada sesama, dan bertanggung jawab terhadap dunia yang dihuni bersama.

A. Pendidikan Islam sebagai Proses Pembentukan Insan Kamil

Pendidikan Islam merupakan sistem pembinaan manusia yang bersifat integral, menyentuh seluruh aspek kemanusiaan spiritual, intelektual, moral, dan sosial yang bertujuan membentuk pribadi ideal yang disebut insan kamil. Dalam tradisi pemikiran Islam klasik, istilah *insan kamil* sering diartikan sebagai manusia yang telah mencapai kesempurnaan diri (self-perfection), baik dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, maupun dengan alam semesta. Konsep ini tidak hanya bersumber dari refleksi teologis, tetapi juga memiliki dimensi filosofis, etis, dan pedagogis yang mendalam.

Menurut Al-Jīlī (w. 832 H) dalam karya monumentalnya *Al-Insān al-Kāmil fī Ma'rifat al-Awākhir wa al-Awā'il*, insan kamil adalah “manifestasi dari sifat-sifat Ilahiah (al-asmā' wa al-ṣifāt) dalam diri manusia.” Dengan kata lain, manusia ideal adalah makhluk yang menjadi

cermin dari rahmat, hikmah, dan keadilan Allah di bumi. Dalam konteks pendidikan, pandangan ini mengandung makna bahwa tujuan tertinggi pendidikan Islam bukan sekadar penguasaan ilmu pengetahuan duniawi, tetapi pembentukan kepribadian yang mampu memantulkan sifat-sifat ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari — seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan.

Pendidikan Islam juga menempatkan manusia sebagai makhluk *khalifah fi al-ardh* (wakil Allah di bumi), yang memiliki tanggung jawab etis untuk mengelola kehidupan dengan penuh amanah. Dalam perspektif ini, insan kamil adalah sosok yang seimbang antara dimensi spiritual dan intelektualnya, antara iman dan amal, antara individu dan masyarakat. Kesempurnaan manusia tidak diukur dari status sosial atau kekayaan, tetapi dari kemampuannya mengintegrasikan nilai-nilai Ilahi ke dalam praksis kehidupan nyata.

Gagasan insan kamil menjadi semakin relevan ketika dunia modern menghadapi krisis multidimensi: krisis spiritualitas, krisis moralitas, dan krisis kemanusiaan. Kemajuan sains dan teknologi ternyata tidak selalu berbanding lurus

dengan peningkatan kualitas moral manusia. Seperti dikemukakan oleh Maesaroh dan Affandi (2025) dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai* (9)2, pendidikan modern cenderung menekankan aspek kognitif semata, sehingga melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual tetapi miskin nilai spiritual dan empati sosial. Dalam konteks inilah, pendidikan Islam menawarkan paradigma alternatif: mengembalikan fungsi pendidikan sebagai sarana penyempurnaan manusia seutuhnya.

Menurut Rahman (2023) dalam *Tarbiyah Islamiyyah Journal* (7)1:45, pendidikan Islam merupakan “jalan menuju kesempurnaan manusia melalui proses penyucian jiwa (tazkiyatun nafs), pencerdasan akal (‘aql), dan penguatan amal (‘amal şālih).” Pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam bersifat *holistik* menghubungkan aspek vertikal (hubungan dengan Allah) dan horizontal (hubungan dengan manusia dan lingkungan). Tujuan pendidikan bukan hanya agar manusia mengetahui yang benar, tetapi agar ia “menjadi” yang benar: hidup dalam nilai-nilai keimanan dan menegakkannya dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks kebangsaan Indonesia, visi pendidikan Islam menuju insan kamil memiliki makna strategis. Bangsa ini tengah berhadapan dengan tantangan globalisasi yang melahirkan arus nilai-nilai individualisme, hedonisme, dan relativisme moral. Fenomena tersebut sering kali menyebabkan disorientasi moral pada generasi muda. Di sinilah pendidikan Islam harus hadir sebagai kekuatan pembentuk karakter dan benteng nilai. Seperti ditegaskan oleh Qomar (2024), pendidikan Islam seharusnya “tidak hanya menghasilkan manusia berpengetahuan, tetapi manusia berpengetahuan yang beradab.” Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam mulai dari pesantren, madrasah, hingga universitas perlu mengembalikan orientasinya kepada pembentukan insan kamil yang memiliki *spiritual intelligence, moral courage, dan social responsibility*.

Proses pembentukan insan kamil tidak mungkin terjadi tanpa sistem pendidikan yang integratif. Semua unsur pendidikan guru, kurikulum, metode, evaluasi, dan lingkungan harus dirancang selaras dengan tujuan tersebut. Guru dalam pandangan Islam bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi *murabbi* (pembina),

mu'allim (pengajar), sekaligus *mursyid* (pembimbing spiritual). Kurikulum harus mampu menghubungkan antara ilmu dan nilai, antara teori dan praksis, antara akal dan hati. Demikian pula, evaluasi pendidikan tidak semestinya hanya menilai hasil kognitif, tetapi juga perkembangan moral, sosial, dan spiritual peserta didik.

Pendidikan Islam yang berorientasi pada insan kamil juga menuntut keseimbangan antara *transendensi* dan *imanensi*. Artinya, pendidikan harus mampu mengajarkan manusia untuk berpikir kritis dan rasional, namun tetap berakar pada nilai-nilai tauhid. Sebagaimana diungkapkan oleh al-Attas (dalam Syed Naquib al-Attas, 2023, *Islam and the Philosophy of Education*), pendidikan Islam harus diarahkan untuk menghasilkan manusia yang memiliki “adab” yaitu kesadaran akan tempat segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Dengan adab, manusia tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak; tidak hanya tahu, tetapi juga mampu bertindak dengan benar.

Insan kamil bukanlah mitos ideal yang jauh dari kenyataan, melainkan visi pendidikan Islam yang menuntut proses panjang dan berkesinambungan. Ia harus menjadi orientasi

seluruh kebijakan pendidikan, baik di tingkat mikro (kelas dan lembaga) maupun makro (kebijakan nasional). Pendidikan Islam yang gagal melahirkan insan kamil berarti kehilangan ruh dan misinya yang paling mendasar.

B. Dimensi Spiritual, Moral, dan Sosial dalam Pendidikan Islam

Pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari tiga dimensi fundamental yang saling melengkapi: spiritual, moral, dan sosial. Ketiganya membentuk satu kesatuan integral dalam sistem pendidikan yang bertujuan membentuk manusia berkepribadian seimbang (*tawāzun*), harmonis (*i'tidāl*), dan berkeadaban (*madaniyah*).

1. Dimensi Spiritual (Tazkiyatun Nafs)

Dimensi spiritual merupakan fondasi utama pendidikan Islam. Tujuan tertinggi dari pendidikan adalah mendekatkan manusia kepada Allah SWT melalui proses penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*). Dalam *Ihya' Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa inti pendidikan adalah membimbing manusia agar mengenal Allah (*ma'rifatullah*) dan meniti jalan menuju-Nya dengan ilmu dan amal saleh. Ilmu dalam Islam

tidak bernilai jika tidak mengantarkan pada peningkatan iman dan ketakwaan.

Dalam konteks praksis pendidikan modern, pembinaan spiritual harus menjadi bagian integral dari kurikulum. Kegiatan seperti shalat berjamaah, tilawah Al-Qur'an, dzikir bersama, dan pembinaan rohani di sekolah merupakan sarana untuk menumbuhkan kesadaran Ilahiah peserta didik. Penelitian Mutia et al. (2024) dalam *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* (12)3 menunjukkan bahwa program penguatan spiritual di madrasah berpengaruh positif terhadap pembentukan religiositas dan tanggung jawab moral siswa. Mereka menjadi lebih disiplin, empatik, dan memiliki kontrol diri yang tinggi terhadap godaan negatif dari lingkungan.

Spiritualitas yang sejati dalam pendidikan Islam bukanlah sekadar ritualisme, tetapi kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan (*ihsan*). Dengan spiritualitas yang kokoh, peserta didik akan memiliki orientasi hidup yang jelas dan tidak mudah kehilangan arah dalam menghadapi dinamika zaman.

2. Dimensi Moral (Akhlak al-Karimah)

Dimensi moral menempati posisi sentral dalam pendidikan Islam. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (*innamā bu'itstu li utammima makārim al-akhlāq*).

Hadis ini menjadi dasar filosofis bahwa misi kenabian sejatinya adalah pendidikan moral umat manusia. Dengan demikian, pendidikan Islam tanpa pembentukan akhlak tidak lain hanyalah proses transfer ilmu tanpa ruh.

Pendidikan moral dalam Islam tidak cukup diajarkan secara teoritis, tetapi harus diteladankan oleh guru dan diinternalisasi melalui pengalaman hidup. Sebagaimana dikatakan oleh Syahfitri dkk. (2024) dalam *Fatih Journal of Contemporary Research*, “Kurikulum Pendidikan Agama Islam memiliki kekuatan moral yang besar apabila guru mampu memosisikan dirinya sebagai model perilaku, bukan sekadar instruktur pengetahuan.” Oleh sebab itu, keberhasilan pendidikan moral tidak ditentukan oleh kelengkapan materi, melainkan oleh keteladanan (uswah) dan budaya sekolah yang berkarakter.

Dalam konteks masyarakat modern yang sering kali menilai keberhasilan dari capaian material, pendidikan akhlak menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan intelektual dan kematangan moral. Tanpa moralitas, ilmu dapat berubah menjadi alat eksploitasi dan kekuasaan. Karena itu, pendidikan Islam harus memastikan bahwa setiap peserta didik memahami hubungan antara pengetahuan, tanggung jawab, dan kemanusiaan.

3. Dimensi Sosial (Amal dan Kepedulian Sosial)

Dimensi sosial merupakan perwujudan nyata dari dua dimensi sebelumnya. Seorang Muslim yang beriman dan berilmu harus menunjukkan keimanannya melalui amal yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan Islam karenanya harus menumbuhkan kesadaran sosial, empati, solidaritas, dan tanggung jawab kemanusiaan. Dalam pandangan Islam, keimanan tidak sempurna jika tidak diwujudkan dalam kontribusi sosial.

Munandar (2023) dalam *Jurnal Sosial dan Humaniora Islamiyyah* (5)2 menemukan bahwa model pendidikan Islam berbasis masyarakat (community-based Islamic education) mampu

meningkatkan partisipasi sosial warga dan memperkuat semangat gotong royong. Peserta didik yang aktif dalam kegiatan sosial cenderung memiliki empati yang tinggi dan komitmen terhadap keadilan sosial.

Dimensi sosial dalam pendidikan Islam juga mengajarkan pentingnya kerja sama lintas budaya dan agama, sejalan dengan prinsip *ukhuwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan). Hal ini menjadikan pendidikan Islam bukan sekadar instrumen pembentukan identitas keagamaan, tetapi juga wadah pembinaan warga dunia yang damai dan toleran.

C. Keterpaduan antara Ilmu, Iman, dan Amal

Salah satu ciri khas dan keunggulan epistemologis pendidikan Islam dibandingkan dengan sistem pendidikan modern sekuler yang banyak diterapkan di berbagai negara adalah konsep keterpaduan antara ilmu, iman, dan amal, yang secara konseptual membentuk satu kesatuan utuh dalam pembentukan pribadi Muslim yang sejati dan berkarakter. Dalam pandangan Islam, ilmu bukan sekadar akumulasi informasi atau kemampuan rasional semata, melainkan wahana

untuk mengenal Tuhan, mendekatkan diri kepada-Nya, dan sekaligus menuntun manusia untuk bertindak secara etis dan produktif di dunia. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Mujadilah (58): 11, yang menyatakan: *"Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat."*

Ayat ini menegaskan bahwa ilmu dan iman merupakan dua pilar yang tidak bisa dipisahkan; ilmu tanpa iman akan melahirkan kecerdasan yang kosong moralitas, sedangkan iman tanpa ilmu berpotensi menjerumuskan seseorang pada kebodohan, dogmatisme, atau bahkan fanatisme yang membahayakan diri sendiri dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, integrasi ilmu, iman, dan amal menjadi semacam landasan epistemologis yang menyeluruh: pengetahuan harus disertai keyakinan yang kokoh dan diwujudkan dalam tindakan nyata yang bermanfaat bagi manusia dan alam. Menurut Nata (2023), "pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang mampu menginternalisasi ilmu menjadi iman, dan mengaktualisasikan iman menjadi amal saleh yang produktif" (Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Modern, 4(2)). Pernyataan ini

menekankan bahwa pendidikan Islam bukan hanya pengajaran doktrinal atau ritualistik, tetapi juga pendidikan holistik yang menumbuhkan karakter, etika, dan keterampilan sosial sekaligus.

Secara praktis, keterpaduan ini dapat diwujudkan melalui model pendidikan integratif yang memadukan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai agama. Salah satu contohnya adalah model “*Islamic Worldview Curriculum*” yang telah diterapkan di sejumlah lembaga pendidikan Islam di Asia Tenggara. Watawalaini et al. (2024) menekankan bahwa integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum sains modern tidak hanya memperkuat karakter religius siswa, tetapi juga meningkatkan prestasi akademik dan kemampuan berpikir kritis, sehingga menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak bertentangan dengan pengembangan ilmu modern, melainkan mampu membungkai ilmu modern dalam bingkai etika dan spiritualitas.

Keterpaduan ilmu, iman, dan amal menuntut guru dan pendidik untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan dalam menginternalisasi nilai spiritual dan moral. Proses pembelajaran harus diarahkan untuk

melahirkan insan yang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah, yakni mereka yang berpikir dengan iman dan bertindak berdasarkan ilmu. Pendidikan Islam yang efektif akan menghasilkan manusia yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan integritas, rasa tanggung jawab, serta kemampuan berinovasi tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan. Dengan kata lain, sistem pendidikan Islam yang ideal tidak hanya mencetak cendekiawan, tetapi juga pemimpin yang beretika, penggerak sosial yang bijaksana, dan warga masyarakat yang toleran serta produktif.

D. Relevansi Pendidikan Islam dalam Konteks Global dan Multikultural

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh pergerakan modal, informasi, dan budaya yang begitu cepat, pendidikan Islam menghadapi tantangan yang unik: bagaimana tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar spiritual dan nilai-nilai otentik ajaran Islam. Pendidikan Islam abad ke-21 harus mampu menyiapkan insan yang memiliki akar spiritual yang kuat, berpikir kritis, dan sekaligus mampu berinteraksi secara efektif

dengan berbagai peradaban dan budaya yang berbeda, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qarni (2024) dalam *International Journal of Islamic Studies and Global Civilization*:

“Pendidikan Islam abad ke-21 harus membangun insan global yang memiliki akar spiritual kuat, berpikir kritis, dan mampu berinteraksi dengan berbagai peradaban tanpa kehilangan jati diri Islamnya.”

Indonesia, sebagai negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi meliputi keberagaman etnis, bahasa, agama, dan adat istiadat menjadi laboratorium ideal untuk pengembangan model pendidikan Islam yang multikultural. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pembentukan keimanan dan kompetensi ibadah, tetapi juga menekankan internalisasi nilai toleransi, keadilan sosial, dan keterampilan dialog lintas agama. Huda (2023) menyatakan bahwa:

“Pendidikan Islam multikultural adalah strategi untuk menciptakan harmoni sosial melalui internalisasi nilai toleransi, keadilan, dan kemanusiaan universal dalam ajaran Islam” (Jurnal Pendidikan Islam dan Kebangsaan, 8(2), hlm. 112).

Dalam konteks global, pendidikan Islam juga menuntut penguatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, pemahaman ekologi, serta kesadaran akan dinamika sosial-politik dunia. Semangat Islam yang menekankan perintah untuk membaca (iqra') dan meneliti alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan membuka peluang bagi pendidikan Islam untuk memadukan sains modern dengan spiritualitas, sehingga lulusan pendidikan Islam tidak hanya memahami dunia tetapi juga mampu memberikan solusi berbasis nilai-nilai etis dan kemanusiaan.

Pendidikan Islam dalam konteks multikultural menekankan pengembangan kemampuan sosial dan empati. Misalnya, melalui kegiatan kolaboratif antar siswa dari berbagai latar belakang budaya, sekolah dapat membangun kapasitas peserta didik untuk menghargai perbedaan dan mengelola konflik secara konstruktif. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah yang menekankan pemeliharaan akal, jiwa, dan keharmonisan sosial. Dalam jangka panjang, penerapan pendidikan Islam yang berorientasi global dan multikultural tidak hanya menghasilkan individu yang beriman

dan berilmu, tetapi juga warga dunia yang mampu berkontribusi bagi pembangunan masyarakat yang damai, adil, dan berkelanjutan.

Selain itu, pendidikan Islam global dan multikultural juga memiliki relevansi strategis dalam menanggulangi fenomena intoleransi dan radikalisme yang kini menjadi tantangan serius bagi masyarakat modern. Integrasi antara pendidikan agama dan sains, antara iman dan amal, serta antara lokal dan global, dapat membekali peserta didik dengan wawasan, keterampilan, dan moralitas yang diperlukan untuk hidup harmonis dalam masyarakat yang kompleks dan plural. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya relevan dalam konteks individual, tetapi juga strategis bagi stabilitas sosial, pembangunan berkelanjutan, dan perdamaian global.

BAB 5

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh intensifikasi interaksi sosial, pertukaran budaya, dan mobilitas manusia yang semakin tinggi, masyarakat modern tidak lagi dapat dipahami sebagai entitas homogen, melainkan sebagai ruang sosial yang plural, majemuk, dan sarat dengan perbedaan identitas, latar belakang budaya, bahasa, agama, dan nilai-nilai sosial, sehingga menuntut keberadaan sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu dan keterampilan teknis, tetapi juga menekankan internalisasi nilai-nilai multikultural yang mendasar, yang mampu menumbuhkan kesadaran inklusif, penghargaan terhadap keberagaman, dan kemampuan berinteraksi secara harmonis dalam kerangka persaudaraan kemanusiaan; dalam konteks inilah pendidikan multikultural dalam perspektif Islam hadir sebagai jawaban strategis terhadap tantangan sosial, moral, dan spiritual masyarakat kontemporer, karena Islam sebagai

rahmatan lil 'alamin menekankan prinsip-prinsip keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), persaudaraan (ukhuwwah), serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap individu, tanpa memandang perbedaan suku, ras, gender, maupun keyakinan, yang semuanya merupakan bagian dari ciptaan Allah SWT dan kehendak-Nya yang sempurna.

Dalam kerangka pendidikan Islam, multikulturalisme bukan sekadar pengakuan pasif terhadap keberagaman, melainkan suatu pendekatan aktif yang memadukan pemahaman teologis, etika sosial, dan praktik pendidikan untuk menumbuhkan toleransi, empati, serta kemampuan berpikir kritis yang menghormati perbedaan. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan prinsip-prinsip ini, misalnya melalui QS. Al-Hujurat [49]:13 yang menekankan agar manusia saling mengenal, saling menghormati, dan tidak mengukur nilai diri seseorang hanya dari suku, bangsa, atau status sosial, melainkan dari tingkat ketakwaannya; sementara QS. Al-Baqarah [2]:256 menegaskan "lâ ikrâha fi ad-dîn", yang menolak paksaan dalam keyakinan, menekankan bahwa iman yang sejati lahir dari kesadaran dan

penghayatan, bukan dari tekanan eksternal. Dengan demikian, pendidikan multikultural dalam Islam berakar pada nilai-nilai teologis yang menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia sekaligus menumbuhkan sikap inklusif dan dialogis.

Konsep multikultural dalam perspektif Islam juga mencakup dimensi praksis yang dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan pembelajaran, interaksi sosial, dan program pendidikan berbasis nilai. Dalam hal ini, pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan prinsip tauhid, 'adl, dan rahmah ke dalam proses pendidikan formal maupun nonformal, sehingga peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan agama secara kognitif, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan universal, memahami pluralitas masyarakat, dan mengembangkan keterampilan sosial yang konstruktif, seperti kerja sama lintas budaya, komunikasi antaragama, dan resolusi konflik secara damai. Pemikiran ini selaras dengan pandangan ulama kontemporer seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas, Azyumardi Azra, dan Abdullah bin Bayyah, yang menekankan bahwa pendidikan Islam yang autentik harus

menumbuhkan integritas moral, kesadaran sosial, dan kemampuan reflektif yang memungkinkan individu berinteraksi secara bijaksana di tengah masyarakat yang majemuk.

Bab ini akan menguraikan secara mendalam konsep, prinsip, dan implementasi pendidikan multikultural dalam perspektif Islam, mencakup: landasan teologis dan filosofis, prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif dan toleran, integrasi nilai keberagaman dalam kurikulum dan metode pembelajaran, serta contoh praktik terbaik dari madrasah, pesantren, dan sekolah berbasis Islam yang telah berhasil menanamkan nilai multikultural secara efektif. Uraian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif bagi para pendidik, pengelola lembaga pendidikan, dan masyarakat luas tentang pentingnya pendidikan multikultural sebagai instrumen strategis dalam membangun generasi Muslim yang berkarakter, moderat, dan siap hidup berdampingan secara harmonis di tengah masyarakat global yang kompleks dan plural.

A. Prinsip-prinsip Pendidikan Multikultural Menurut Nilai-nilai Islam

Pendidikan Islam adalah sebuah sistem pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan (tauhid), kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dalam kerangka multikultural, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu, tetapi juga transformasi nilai — dari sekadar pengetahuan menuju kebijaksanaan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (*rahmatan lil 'alamin*). Prinsip-prinsip pendidikan multikultural Islam sejatinya telah melekat dalam fondasi ajaran Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW, yang menampilkan model kehidupan masyarakat madani di Madinah yang beragam secara etnis, agama, dan budaya.

1. Pendidikan Sebagai Proses Pemuliaan Manusia

Dalam Islam, pendidikan adalah proses penyucian (tazkiyah) dan pembentukan adab (ta'dib), yang menempatkan manusia pada posisi terhormat sebagai makhluk berakal dan bermartabat. Tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menyempurnakan akhlak dan spiritualitas. Hal ini

sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Mujādalah [58]: 11:

يَرَفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa ilmu dalam Islam adalah instrumen untuk memuliakan manusia bukan alat dominasi, diskriminasi, atau eksplorasi. Oleh karena itu, pendidikan Islam sejati harus mengantarkan manusia menuju martabat tertinggi, yakni mengenal Tuhan-Nya, menghargai sesamanya, dan menjaga keseimbangan hidup dengan alam.

Syed Muhammad Naquib al-Attas (2023) dalam *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Integrated Vision* menjelaskan bahwa pendidikan (*ta'dib*) adalah “penanaman adab, yaitu pengenalan dan pengakuan terhadap tempat segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya.” Dalam konteks multikulturalisme, makna *adab* menjadi sangat penting sebab ia menuntut manusia untuk menghormati keragaman ciptaan

Tuhan dan menempatkan perbedaan sebagai bagian dari tatanan Ilahi (*sunnatullah*).

Prinsip pertama pendidikan Islam yang multikultural adalah pemuliaan manusia sebagai makhluk beriman dan berakal, yang memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan saling menghormati.

Dalam tataran praksis, pemuliaan manusia ini berarti bahwa setiap peserta didik, apapun latar belakang sosial, etnis, maupun budayanya, harus diperlakukan secara adil, setara, dan penuh kasih. Pendidikan yang mendiskriminasi adalah bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai tauhid, karena menafikan kesatuan ciptaan Tuhan.

Penelitian terbaru oleh Nurhasanah & Latifah (2025) dalam *Jurnal Al-Fikr Al-Tarbawi*, 13(1) menyimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai penghormatan terhadap perbedaan budaya dan gender menunjukkan tingkat partisipasi siswa lebih tinggi hingga 27%, serta menurunkan kasus intoleransi di sekolah.

2. Prinsip Tauhid dan Kemanusiaan Universal

Prinsip tauhid tidak hanya bermakna pengesaan Allah secara teologis, tetapi juga kesatuan seluruh makhluk dalam tatanan ciptaan Ilahi. Tauhid menegaskan bahwa manusia berasal dari sumber yang sama dan memiliki tujuan yang sama: pengabdian kepada Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Isrā' [17]: 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-anak Adam; Kami angkut mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas banyak makhluk yang Kami ciptakan.”

Ayat ini menjadi fondasi teologis bagi konsep kemanusiaan universal (*al-insāniyyah al-kulliyah*) dalam Islam. Setiap manusia, apapun agamanya, memiliki kehormatan yang harus dijaga. Fazlur Rahman (2024) menegaskan bahwa dimensi moral dari tauhid adalah “pengakuan atas kesatuan asal-usul manusia dan kesamaan tujuan

etis mereka, yakni kebaikan universal." (*Islam and Modernity Revisited, Oxford Islamic Studies Series*).

Pendidikan multikultural dalam Islam harus dibangun atas dasar tauhid yang mengakui kesatuan manusia dan kemajemukan sebagai keniscayaan. Keragaman budaya, bahasa, dan kepercayaan bukan ancaman terhadap iman, melainkan peluang untuk mengenal dan memperkaya diri, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا
وَقَبَّايلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاءُكُمْ

"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (*lita'ārafū*)." 1

Dalam pendidikan, ayat ini menuntut dikembangkannya budaya belajar yang menghargai perbedaan dan mendorong kolaborasi lintas identitas. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang berlandaskan tauhid sejati akan melahirkan pribadi yang terbuka (*inklusif*), tetapi tetap teguh

dalam nilai-nilai akidahnya suatu keseimbangan antara *al-tsawābit* (nilai tetap) dan *al-mutaghayyirāt* (nilai dinamis).

3. Prinsip Keadilan ('Adl) dan Moderasi (Wasathiyyah)

Keadilan merupakan prinsip mendasar dalam seluruh aspek ajaran Islam, termasuk pendidikan. Al-Qur'an berulang kali memerintahkan agar manusia berlaku adil, bahkan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. QS. Al-Mā'idah [5]: 8 menegaskan:

وَلَا يَجِرِّمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ

"Janganlah kebenciamu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Keadilan dalam pendidikan berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya tanpa diskriminasi. Dalam konteks pendidikan multikultural, prinsip '*adl*' menuntut penghapusan segala bentuk ketimpangan sosial,

gender, ekonomi, dan budaya di lingkungan sekolah.

Sementara itu, prinsip *wasathiyyah* (moderasi) adalah keseimbangan antara ekstremitas dan ketidakpedulian. QS. Al-Baqarah [2]: 143 menjelaskan:

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu umat yang wasath (moderat) agar kamu menjadi saksi atas manusia...”

Menurut Azyumardi Azra (2024) dalam *Islam dan Pendidikan Moderat di Indonesia*, *wasathiyyah* dalam pendidikan berarti membangun paradigma berpikir terbuka, rasional, dan dialogis tidak eksklusif tetapi juga tidak liberal. Pendidikan Islam yang berwasathiyyah mengajarkan cara berpikir proporsional: menghargai kebenaran orang lain tanpa mengorbankan prinsip kebenaran agama sendiri.

Dalam penelitian Yusuf & Rahmah (2024) di *Jurnal Tarbiyah Nusantara* (15)2, lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum berbasis *wasathiyyah* menunjukkan peningkatan sikap toleran siswa sebesar 35% dan penurunan

kecenderungan radikalisme ideologis sebesar 42%. Data ini memperlihatkan bahwa moderasi bukan hanya konsep teologis, tetapi strategi pendidikan yang efektif untuk membangun harmoni sosial.

Dengan demikian, prinsip keadilan dan moderasi merupakan fondasi filosofis dan pedagogis bagi pendidikan multikultural Islam yang berfungsi sebagai perekat sosial di tengah keragaman masyarakat.

B. Integrasi Nilai Keberagaman dalam Pendidikan Islam

Implementasi pendidikan multikultural dalam Islam menuntut integrasi nilai keberagaman ke dalam seluruh sistem pendidikan: mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, lingkungan sekolah, hingga budaya kelembagaan. Nilai-nilai ini tidak boleh berhenti pada wacana normatif, tetapi harus diinternalisasi dalam praksis pendidikan.

1. Pendidikan Multikultural dalam Kurikulum Islam

Integrasi nilai keberagaman tidak cukup dilakukan melalui pelajaran khusus seperti “Pendidikan Toleransi,” melainkan harus melekat

dalam semua mata pelajaran dan aktivitas sekolah. Kementerian Agama RI (2025) melalui dokumen *Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* menegaskan perlunya “pengarusutamaan nilai toleransi, empati, dan kebinekaan dalam kurikulum madrasah, pesantren, dan universitas Islam.”

Pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui:

- a. Integrasi tematik: memasukkan nilai-nilai kebinekaan dan keadilan sosial dalam pelajaran akidah, fiqh, dan akhlak;
- b. Model pembelajaran historis: menampilkan teladan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat multikultural di Madinah, serta kisah penyebaran Islam di Nusantara yang damai dan dialogis;
- c. Proyek sosial kolaboratif: mengajak siswa bekerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan lintas agama dan budaya.

Menurut Ardi & Saputra (2024) dalam *CATHA Journal of Islamic Education Studies*, penerapan kurikulum inklusif berbasis multikultural di beberapa madrasah negeri meningkatkan sikap

toleran siswa sebesar 40% dan memperkuat kemampuan reflektif terhadap isu-isu sosial.

2. Pesantren dan Madrasah sebagai Ruang Transformasi Sosial

Pesantren dan madrasah tidak hanya lembaga keagamaan, tetapi juga arena sosial di mana nilai-nilai keberagaman dapat tumbuh secara alami. Tradisi *talaqqi* (belajar langsung dari guru), *ukhuwah* (persaudaraan), dan *musyawarah* yang melekat di pesantren merupakan bentuk praksis multikultural yang sarat dengan nilai demokratis.

K.H. Ahmad Muwafiq (2024) menegaskan, "Pesantren yang sejati adalah tempat belajar perbedaan dengan penuh kasih." Banyak pesantren telah mengembangkan model pembelajaran lintas budaya, seperti Pesantren Harmoni di Semarang dan Madrasah Damai di Lombok, yang melibatkan santri dan siswa non-Muslim dalam kegiatan sosial bersama, seperti bakti lingkungan, pelatihan kewirausahaan, dan dialog antariman.

Penelitian Hidayat & Marzuki (2025) dalam *Journal of Islamic Educational Reform*, 11(1) menunjukkan bahwa pesantren yang menerapkan kegiatan lintas komunitas mengalami peningkatan

signifikan dalam indikator sikap empatik dan kemampuan dialog santri. Mereka juga mencatat berkurangnya stereotip negatif terhadap kelompok lain hingga 38%.

3. Pembelajaran Kontekstual dan Inklusif

Pendidikan Islam yang multikultural tidak dapat dibangun di ruang kelas yang tertutup. Ia harus bersentuhan langsung dengan realitas sosial dan mengajarkan keterampilan hidup bersama di tengah perbedaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran kontekstual (contextual learning) dan pengalaman langsung (experiential learning).

Metode ini melibatkan siswa dalam:

- a. Kunjungan ke komunitas berbeda (lintas agama atau etnis),
- b. Proyek kolaboratif dengan sekolah umum atau non-Muslim,
- c. Diskusi lintas iman dan budaya,
- d. Kegiatan sosial bersama masyarakat plural.

Menurut *UNESCO Indonesia Education Report* (2024), program *Islamic Inclusive Learning Initiative* di 18 madrasah di Jawa Tengah berhasil menurunkan potensi intoleransi antarsiswa sebesar 32% dalam satu tahun. Laporan tersebut

menegaskan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman lintas budaya mendorong siswa memahami perbedaan secara empatik, bukan ideologis.

C. Peran Guru dan Lembaga Pendidikan dalam Menanamkan Toleransi

1. Guru sebagai Model dan Transformator Nilai

Dalam perspektif pendidikan Islam, guru memiliki peran yang jauh melampaui sekadar pengajaran akademik; guru diposisikan sebagai *murabbi*, pembimbing yang membentuk kepribadian, akhlak, dan moral peserta didik secara menyeluruh. Rasulullah SAW menekankan pentingnya pembinaan moral dengan sabdanya:

إِنَّمَا بَعَثْتُ لِأُتْسِمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad)

Guru sejati adalah teladan hidup yang menunjukkan nilai-nilai integritas, kejujuran, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menekankan bahwa mendidik tanpa rahmah kasih

sayang tidak akan membawaikan karakter yang kuat, karena kasih sayang merupakan fondasi hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Dalam konteks modern, Kementerian Agama RI (2025) menegaskan pentingnya program *teacher training for tolerance*, pelatihan bagi guru madrasah dan sekolah Islam yang dirancang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang menumbuhkan berpikir kritis, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya serta keyakinan. Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin (2024) menekankan bahwa:

“Guru adalah aktor kultural yang paling berpengaruh dalam membentuk generasi toleran; kurikulum tanpa keteladanan hanyalah teks yang kering.”

Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan multikultural sangat bergantung pada kualitas guru sebagai agen transformasi nilai, bukan hanya sebagai pengantar materi akademik semata. Guru yang mampu menjadi contoh hidup toleransi dan akhlak mulia akan menumbuhkan generasi yang menghargai perbedaan dan mampu mengelola konflik secara konstruktif.

2. Lembaga Pendidikan sebagai Ekosistem Moderasi

Sekolah, madrasah, dan pesantren tidak cukup hanya menyampaikan teori toleransi melalui buku teks; lembaga pendidikan harus menjadi ekosistem sosial yang mempraktikkan prinsip inklusivitas secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan pendidikan yang diskriminatif, bahkan yang hanya bersifat tidak sadar (*implicit bias*), akan melahirkan generasi eksklusif, sementara institusi yang terbuka dan menghargai keberagaman akan menghasilkan generasi empatik, adaptif, dan toleran. Data dari BRIN (2024) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan kebijakan *inclusive campus policy* memiliki tingkat konflik internal antar siswa hingga 60% lebih rendah dibandingkan sekolah yang tidak memiliki kebijakan tersebut.

Beberapa pesantren di Indonesia telah menjadi contoh praktik efektif pendidikan multikultural. Misalnya, Pesantren Darunnajah di Jakarta dan Darul Ulum di Jombang mengimplementasikan model “Pesantren Multikultural,” di mana santri dari berbagai daerah, mazhab, dan latar belakang sosial hidup

bersama dalam suasana saling menghormati, belajar kolaboratif, dan berdialog lintas tradisi Islam. Model ini membuktikan bahwa pendidikan toleransi bukan sekadar teori, tetapi praktik yang membentuk karakter santri melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial yang beragam.

3. Kolaborasi antara Keluarga, Komunitas, dan Negara

Menanamkan nilai toleransi tidak dapat dibebankan hanya pada guru atau sekolah, melainkan memerlukan sinergi seluruh ekosistem sosial, termasuk keluarga, komunitas, dan lembaga negara. Din Syamsuddin (2024) menegaskan bahwa:

“Moderasi beragama hanya akan efektif bila nilai-nilai toleransi diajarkan secara simultan di tiga arena utama: keluarga sebagai basis moral, sekolah sebagai basis intelektual, dan masyarakat sebagai basis sosial.”

Oleh karena itu, pendidikan Islam yang multikultural harus membangun sinergi yang harmonis antara rumah, masjid, dan sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Agama (2025) menginisiasi *Gerakan Sekolah Toleran* berbasis nilai

Islam moderat untuk memperkuat kemitraan lintas lembaga dan menciptakan ekosistem pendidikan yang mananamkan toleransi, empati, dan keadilan sosial sejak dini.

D. Pendidikan Islam sebagai Sarana Membangun Masyarakat Berkeadaban

1. Pendidikan sebagai Pilar Peradaban Islam

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa kemajuan peradaban selalu berjalan seiring dengan kemajuan pendidikan. Lembaga pendidikan seperti Universitas al-Qarawiyyin di Fez, al-Azhar di Kairo, dan Nizamiyyah di Baghdad menjadi bukti bahwa Islam menempatkan ilmu sebagai pondasi utama pembangunan peradaban. Pendidikan multikultural dalam konteks ini tidak hanya menghidupkan kembali semangat ilmiah, tetapi juga menumbuhkan generasi yang berpikir rasional, berakhhlak mulia, dan terbuka terhadap perbedaan. Prof. Quraish Shihab (2024) menegaskan bahwa:

“Keadaban (civilization) dalam Islam bukanlah dominasi budaya, tetapi kemampuan

hidup damai dalam keberagaman tanpa kehilangan identitas.”

Pendidikan Islam diarahkan untuk melahirkan masyarakat beradab global (*global civility*), yakni masyarakat yang memadukan iman, ilmu, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk pencapaian akademik, tetapi juga untuk pembentukan karakter, kesadaran sosial, dan kemampuan berinteraksi dalam konteks multikultural.

2. Masyarakat Madani dan Etika Sosial Islam

Konsep *madani* dalam Islam, yang berakar dari masyarakat Madinah zaman Nabi Muhammad SAW, menekankan kebersamaan, keadilan, dan penghargaan terhadap hak-hak warga tanpa membedakan agama, suku, atau latar belakang sosial. Pendidikan Islam multikultural menjadi sarana strategis untuk membangun kembali semangat *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan) dan menumbuhkan etika sosial yang humanis. Syekh Ahmad al-Tayyib (2025) dalam *Cairo Declaration on Human Fraternity* menegaskan bahwa:

“Perdamaian dunia hanya mungkin jika setiap masyarakat mengajarkan generasinya untuk melihat kemanusiaan sebelum identitas.”

Dengan prinsip ini, pendidikan multikultural dalam Islam menekankan nilai-nilai universal kemanusiaan, menghargai perbedaan, dan mengedepankan prinsip keadilan sosial sebagai bagian integral dari pembentukan masyarakat madani.

3. Pendidikan Multikultural Sebagai Gerakan Kemanusiaan

Pendidikan Islam multikultural bukan sekadar proyek akademik, melainkan juga gerakan moral dan kemanusiaan. Ia berfungsi untuk melawan ketimpangan sosial, intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan ideologis. Amin Abdullah (2023) menyebut konsep ini sebagai “rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam,” yakni menjadikan agama sebagai sumber inspirasi kemanusiaan, bukan alat eksklusivisme.

Di Indonesia, prinsip ini diimplementasikan melalui berbagai program dan inisiatif, termasuk Program Moderasi Beragama yang dijalankan Kementerian Agama (2024–2025), Kampus Rahmatan lil ‘Alamin, dan Sekolah Kebangsaan

Islami. Program-program ini menekankan integrasi prinsip tauhid, toleransi, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam setiap kegiatan pembelajaran dan interaksi sosial, sehingga peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan agama, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai universal yang membentuk karakter manusia beradab.

Pendidikan Islam multikultural merupakan jembatan strategis untuk membangun masyarakat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral, terbuka terhadap perbedaan, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat yang plural dan kompleks.

Pendidikan multikultural dalam perspektif Islam adalah bentuk aktualisasi ajaran Al-Qur'an dan Sunnah dalam konteks sosial modern. Ia tidak hanya bertujuan mencetak insan beriman dan bertakwa, tetapi juga menciptakan masyarakat yang berkeadaban, adil, dan damai.

Dengan berlandaskan pada prinsip *tauhid*, *'adl*, *wasathiyyah*, dan *rahmah*, pendidikan Islam dapat menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan bangsa dan menumbuhkan budaya toleransi yang autentik.

BAB 6

PERAN KELUARGA DAN KOMUNITAS DALAM MENYEMAI TOLERANSI

Keluarga merupakan fondasi utama dan unit sosial terkecil yang membentuk watak, perilaku, serta orientasi nilai manusia sejak dini. Dalam konteks pendidikan dan pembinaan moral, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan juga sebagai madrasah pertama dan utama dalam membentuk karakter, kepribadian, serta pandangan hidup seorang anak. Nilai-nilai moral, keagamaan, sosial, dan kemanusiaan pertama kali disemai dalam lingkungan keluarga sebelum anak mengenal dunia luar. Oleh karena itu, dalam upaya menumbuhkan toleransi, sikap moderat, dan penghargaan terhadap keberagaman, peran keluarga menjadi sangat strategis dan tak tergantikan.

Dalam pandangan Islam, keluarga disebut sebagai *bait al-sakinah*, tempat berlabuhnya ketenangan dan kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum [30]:21, bahwa dari

hubungan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) itulah tercipta harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan. Nilai harmoni inilah yang menjadi titik tolak pembentukan karakter toleran dalam diri manusia. Keluarga yang dibangun atas dasar cinta kasih, komunikasi terbuka, dan penghargaan terhadap perbedaan akan menumbuhkan generasi yang inklusif, terbuka terhadap pandangan berbeda, dan tidak mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian atau ideologi eksklusif. Menurut Abdullah (2024), keluarga adalah lembaga pertama yang menginternalisasikan nilai kemanusiaan universal (*rahmatan lil 'alamin*) sebelum lembaga pendidikan formal mengambil peran lanjutan.

Dalam perkembangan sosial masyarakat modern, khususnya di Indonesia yang multikultural dan majemuk secara etnis, agama, budaya, dan bahasa, keluarga memainkan fungsi strategis sebagai benteng moral dan pusat pendidikan nilai-nilai kebinedkaan. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah membuka ruang interaksi yang sangat luas, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru berupa derasnya penyebaran paham radikal, intoleran, serta disinformasi berbasis identitas. Dalam situasi

demikian, keluarga dituntut untuk menjadi ruang refleksi nilai, tempat anak belajar membedakan kebenaran dari kesesatan, empati dari kebencian, serta nilai-nilai kemanusiaan dari ideologi eksklusif.

Hasil riset BRIN (2025) menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pendidikan toleransi pada anak dan remaja sangat ditentukan oleh pola komunikasi dan interaksi keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pola asuh demokratis, penuh dialog, dan empatik cenderung memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi terhadap keberagaman sosial dibandingkan mereka yang tumbuh dalam keluarga otoriter atau permisif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahid Foundation dan UNDP (2023) yang menegaskan bahwa peran keluarga khususnya ibu menjadi faktor kunci dalam membangun *resilience* terhadap ideologi ekstrem dan intoleran di kalangan remaja muslim Indonesia.

Selain keluarga, komunitas dan lingkungan sosial juga memainkan peran fundamental dalam memperkuat nilai-nilai toleransi. Manusia adalah makhluk sosial yang belajar, berinteraksi, dan membangun identitasnya dalam konteks

komunitas. Dalam Islam, konsep *ukhuwah* (persaudaraan) mencakup dimensi yang sangat luas baik *ukhuwah Islamiyyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhuwah wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan), maupun *ukhuwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan). Nilai-nilai persaudaraan ini menjadi fondasi penting bagi masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dan produktif. Asmawi (2022) menekankan bahwa pendidikan Islam yang tidak diikuti dengan praktik sosial dalam komunitas akan kehilangan daya transformatifnya, karena moral dan toleransi hanya dapat tumbuh melalui interaksi nyata antar manusia.

Pendidikan Islam memandang bahwa nilai-nilai toleransi tidak dapat tumbuh secara instan, tetapi melalui proses panjang yang dimulai dari keluarga, diperkuat oleh sekolah, dan dipelihara oleh lingkungan sosial. Dalam hal ini, peran keluarga dan komunitas bersifat sinergis keluarga menanamkan nilai, sementara komunitas memperluas ruang praksis nilai tersebut. Ketika seorang anak dibesarkan dalam keluarga yang menanamkan ajaran kasih sayang, empati, dan kesetaraan, serta hidup dalam komunitas yang

menghargai perbedaan, maka secara alami akan tumbuh identitas keagamaan yang moderat dan terbuka terhadap pluralitas.

A. Keluarga sebagai Madrasah Pertama dalam Membentuk Karakter Anak

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam kehidupan manusia yang memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Dalam konteks Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai unit sosial tempat berlangsungnya kehidupan biologis, melainkan juga sebagai *madrasatul ula* sekolah pertama yang berfungsi menanamkan nilai-nilai keimanan, moralitas, dan kemanusiaan (Rofiq, 2023). Rasulullah SAW menegaskan pentingnya peran keluarga dalam sabdanya, “*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.*” (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga merupakan faktor penentu dalam pembentukan orientasi moral dan keagamaan seseorang.

Dalam konteks pendidikan Islam, keluarga adalah tempat berlangsungnya proses *ta'dib*

(pembentukan adab), *tazkiyah* (penyucian jiwa), dan *tarbiyah* (pengasuhan yang menumbuhkan potensi fitrah). Orang tua berperan sebagai guru pertama (*mu'allim al-awwal*), teladan moral (*uswah hasanah*), sekaligus pengarah spiritual bagi anak. Peran orang tua bukan hanya dalam memberikan pengajaran verbal, tetapi juga menanamkan nilai melalui keteladanan, kasih sayang, dan interaksi sehari-hari yang sarat makna edukatif (Nata, 2024).

Menurut Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, pendidikan dalam keluarga harus dimulai dengan pembiasaan, karena jiwa anak bagaikan tanah yang siap ditanami apa pun. Jika orang tua menanamkan benih kebaikan, maka anak akan tumbuh dalam kebaikan; tetapi jika lingkungan rumah diwarnai oleh kekerasan, intoleransi, dan egoisme, maka nilai-nilai itulah yang akan berakar kuat dalam jiwanya. Dengan demikian, keluarga merupakan *miniatur masyarakat* tempat anak belajar berinteraksi, memahami perbedaan, dan membangun tanggung jawab sosial sejak dini.

Penelitian empiris memperkuat pandangan tersebut. Anjani & Kosasih (2024) menemukan bahwa pola asuh yang berlandaskan kasih sayang dan keterbukaan berpengaruh signifikan terhadap

kemampuan empatik anak usia sekolah dasar di Indonesia. Anak-anak dari keluarga yang hangat dan demokratis menunjukkan tingkat toleransi sosial yang lebih tinggi dibandingkan anak dari keluarga yang kaku atau otoriter. Temuan ini mempertegas bahwa lingkungan keluarga menjadi cermin pertama bagi anak dalam memandang dunia apakah dunia adalah tempat yang penuh ancaman atau tempat yang dapat dihadapi dengan kasih sayang dan kerja sama.

Dalam masyarakat Indonesia yang plural secara etnis, budaya, dan agama, fungsi keluarga sebagai madrasah pertama menjadi semakin strategis. Kementerian Agama Republik Indonesia (2022) menegaskan bahwa keluarga merupakan basis utama penanaman nilai-nilai moderasi beragama. Melalui pembiasaan dialog, sikap terbuka terhadap perbedaan, dan penghormatan terhadap keberagaman tradisi, keluarga dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya religius, tetapi juga berkarakter inklusif.

Masruroh Kobandaha (2019) menunjukkan bahwa pola asuh partisipatif yang memberikan ruang bagi anak untuk berdialog, mengemukakan pendapat, dan berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan keluarga lebih efektif dalam membentuk karakter anak yang memiliki kesadaran multikultural. Pola asuh semacam ini menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat, yang menjadi dasar penting dalam membangun budaya toleransi.

Keteladanan (uswah hasanah) orang tua adalah kunci utama dalam pendidikan karakter. Anak-anak belajar lebih banyak dari perilaku yang mereka lihat dibandingkan nasihat yang mereka dengar. Seorang ayah yang memperlakukan tetangga dengan hormat, seorang ibu yang berbicara lembut dan penuh empati, serta keluarga yang mampu menyelesaikan konflik secara damai semua itu menjadi pelajaran konkret yang lebih efektif daripada seribu kata. Dalam pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (dalam *Tuhfat al-Mawdūd*), setiap perilaku orang tua adalah “pendidikan tak langsung” yang membentuk kebiasaan dan cara pandang anak terhadap kehidupan.

Di era digital, peran keluarga semakin kompleks. Anak-anak kini hidup di tengah arus informasi tanpa batas, di mana nilai-nilai global sering kali berbenturan dengan nilai lokal dan

keagamaan. Dalam kondisi demikian, keluarga berperan sebagai benteng moral dan filter nilai yang mengarahkan anak agar tidak terjerumus dalam arus intoleransi, kekerasan, dan ujaran kebencian di dunia maya. Wijanarka & Purnama Sari (2025) menegaskan pentingnya literasi digital berbasis nilai Islam di lingkungan keluarga sebagai strategi menghadapi tantangan era disinformasi dan radikalisme digital. Orang tua harus hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai *mitra belajar* yang membantu anak memahami realitas media secara kritis dan etis.

Keluarga bukan sekadar tempat tinggal biologis, melainkan institusi pendidikan spiritual dan sosial yang paling fundamental. Keluarga yang sadar akan peran pedagogisnya akan menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kesadaran moral, sosial, dan kemanusiaan yang tinggi generasi yang mampu mempraktikkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

B. Pendidikan Nilai dalam Kehidupan Sehari-hari

Pendidikan nilai (*value education*) merupakan inti dari proses pendidikan Islam, karena tujuannya bukan hanya mencerdaskan akal, tetapi juga memurnikan hati dan memperhalus perilaku. Dalam konteks keluarga, pendidikan nilai tidak berlangsung secara formal seperti di sekolah, melainkan terjalin dalam rutinitas harian — dalam cara keluarga berbicara, menyelesaikan masalah, merayakan perbedaan, dan menunjukkan kasih sayang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikdasmen, 2025) menegaskan bahwa pendidikan nilai dalam keluarga adalah “proses panjang yang membentuk kepribadian melalui keteladanan, pembiasaan, dan komunikasi interpersonal yang konsisten.”

Pendidikan nilai dalam Islam mencakup dimensi *iman*, *akhlak*, dan *amal saleh*. Ketiganya tidak bisa dipisahkan, karena iman tanpa akhlak akan kering, dan akhlak tanpa amal sosial tidak akan berarti. Oleh karena itu, keluarga harus menanamkan nilai-nilai universal Islam kejujuran (*ṣidq*), kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adl*), tanggung jawab (*amānah*), dan toleransi (*tasāmuḥ*)

sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi juga diwujudkan dalam kebiasaan sederhana seperti saling mengucapkan terima kasih, membantu pekerjaan rumah, dan berbagi dengan tetangga.

Penelitian Asri (2024) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa komunikasi positif dalam keluarga berbanding lurus dengan tingkat toleransi sosial anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang menghargai dialog, bukan dominasi, cenderung lebih empatik dan terbuka terhadap perbedaan. Komunikasi yang baik juga memperkuat *bonding* emosional antara orang tua dan anak, sehingga nilai-nilai moral lebih mudah diterima dan diinternalisasi.

Selain komunikasi, pembiasaan (*habituation*) merupakan instrumen penting dalam pendidikan nilai. Al-Ghazali menekankan bahwa karakter adalah hasil dari tindakan yang diulang terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Maka, pendidikan nilai tidak bisa instan; ia membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Misalnya, membiasakan anak berdoa sebelum

tidur, membantu saudara, meminta maaf ketika bersalah, atau menyapa orang lain dengan sopan. Aktivitas sederhana ini menciptakan *moral memory* yang menjadi dasar bagi pembentukan kepribadian luhur di masa dewasa.

Hasni (2024) menambahkan bahwa pendidikan nilai dalam masyarakat plural juga harus diarahkan untuk membangun kesadaran kebinedekaan (*plural awareness*). Anak-anak perlu memahami bahwa keberagaman bukan ancaman terhadap identitas, melainkan kekayaan yang memperkaya kehidupan bersama. Keluarga berperan penting dalam memperluas wawasan anak tentang keberagaman dengan cara-cara yang menyenangkan dan kontekstual misalnya membaca buku bergambar tentang budaya daerah lain, mengunjungi rumah ibadah berbeda, atau mengikuti kegiatan sosial bersama warga lintas agama.

Bentuk konkret lain dari pendidikan nilai adalah membangun *dialog lintas iman dan budaya* di ruang keluarga. Kebiasaan berbicara terbuka tentang perbedaan pandangan, tanpa rasa takut atau kebencian, akan melatih anak untuk berpikir kritis sekaligus menghormati keberagaman.

Kebudayaan Kemdikbud (2023) mencatat bahwa keluarga yang mengembangkan kebiasaan berdialog lintas nilai memiliki anak-anak yang lebih toleran, adaptif, dan memiliki *growth mindset* dalam menghadapi perubahan sosial.

Di era modern, ketika ruang publik sering diwarnai oleh ujaran kebencian dan polarisasi sosial, pendidikan nilai dalam keluarga menjadi benteng terakhir bagi pembentukan moral bangsa. Nilai yang ditanamkan di rumah akan menentukan bagaimana generasi muda bersikap di dunia luar. Jika keluarga gagal menanamkan kasih sayang, maka sekolah dan masyarakat akan menghadapi anak-anak yang kehilangan empati. Sebaliknya, jika keluarga berhasil menanamkan cinta dan keadilan, maka bangsa ini akan memiliki generasi yang mampu menjadi jembatan perdamaian dan agen perubahan sosial.

C. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Media terhadap Pandangan Keberagaman

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku seseorang terhadap keberagaman. Dalam konteks

pendidikan nilai dan karakter, lingkungan sosial berperan sebagai “kelas kedua” setelah keluarga, di mana individu belajar memahami realitas sosial yang lebih luas dan kompleks. Lingkungan sosial tidak hanya terbatas pada interaksi fisik di sekitar rumah, tetapi juga mencakup jejaring sosial yang terbentuk di sekolah, tempat ibadah, organisasi masyarakat, hingga ruang digital yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern.

Anak-anak dan remaja yang tumbuh dalam lingkungan sosial yang terbuka, inklusif, dan menghargai perbedaan cenderung menginternalisasi nilai-nilai toleransi dan empati sejak dini. Sebaliknya, lingkungan yang tertutup dan homogen sering kali menumbuhkan cara pandang eksklusif yang berpotensi melahirkan sikap curiga terhadap kelompok lain. Menurut Anjani dan Kosasih (2024), perilaku sosial anak-anak dalam menghormati perbedaan agama dan budaya sangat dipengaruhi oleh pola perilaku sosial di sekelilingnya. Apabila lingkungan sosial menunjukkan teladan hidup damai antaragama, anak akan menganggap toleransi sebagai hal yang wajar dan bernilai positif.

Namun, pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini, pengaruh lingkungan sosial tidak lagi terbatas pada ruang fisik. Dunia digital telah menciptakan ruang sosial baru yang memengaruhi persepsi dan nilai-nilai seseorang secara signifikan. Media massa dan media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan persepsi kolektif tentang isu-isu keberagaman, keagamaan, serta hubungan antarumat beragama. Media dapat berperan ganda: di satu sisi sebagai sarana penyebaran pesan damai dan edukatif, di sisi lain sebagai alat provokasi dan penyebar kebencian jika tidak dikendalikan dengan bijak.

Penelitian Kusnanto, Gudiato, dan Vuspitasari (2024) menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap isu sosial, termasuk toleransi dan pluralitas, sangat dipengaruhi oleh cara media menampilkan perbedaan agama dan budaya. Misalnya, pemberitaan yang menonjolkan konflik antaragama tanpa memberikan konteks yang seimbang dapat memunculkan ketakutan dan prasangka kolektif. Sebaliknya, tayangan yang menonjolkan kerja sama lintas agama, solidaritas sosial, atau kemanusiaan universal dapat memperkuat kepercayaan antar kelompok dan

menumbuhkan semangat kebangsaan yang inklusif. Dengan demikian, media tidak netral ia adalah arena ideologis yang dapat membentuk kesadaran sosial baik secara positif maupun negatif.

Kemampuan masyarakat untuk mengakses, menilai, dan memaknai informasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, literasi media harus menjadi bagian integral dari pendidikan moral dan karakter, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Literasi media tidak sekadar mengajarkan keterampilan teknis dalam menggunakan gawai atau media sosial, tetapi mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap isi pesan, memahami framing dan bias media, serta mengenali potensi disinformasi dan ujaran kebencian. Literasi ini membantu masyarakat, terutama generasi muda, untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi intoleran yang sering kali dibungkus dengan label keagamaan atau nasionalisme semu.

Penelitian yang dilakukan di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan (2024) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berpengaruh langsung terhadap pola pikir keberagamaan dan perilaku sosial mereka.

Mahasiswa yang sering terpapar konten keagamaan moderat cenderung memiliki pandangan lebih terbuka terhadap perbedaan, sementara mereka yang lebih sering mengonsumsi konten eksklusif dan tekstualis menunjukkan kecenderungan konservatif bahkan intoleran terhadap kelompok lain. Temuan ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi medan baru dalam pembentukan nilai keagamaan dan sikap keberagamaan masyarakat.

Karena itu, pendampingan dan pembimbingan moral dari orang tua, guru, dan tokoh agama menjadi semakin krusial. Mereka perlu berperan sebagai *filter nilai*, yaitu membimbing anak-anak dan remaja agar dapat menilai secara etis apa yang mereka baca, tonton, dan bagikan di media sosial. Tanpa pendampingan moral dan nilai agama yang kuat, kebebasan informasi bisa berubah menjadi kebebasan destruktif yang melemahkan kohesi sosial.

Selain media, lingkungan sosial yang heterogen dalam kehidupan nyata juga berperan penting sebagai laboratorium sosial bagi praktik toleransi. Sekolah, kampus, tempat kerja, dan organisasi sosial yang mempertemukan individu

dari latar belakang berbeda menjadi arena alami untuk belajar menghargai perbedaan dan membangun solidaritas lintas identitas. Interaksi langsung antaragama dan antarbudaya membantu individu memahami bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan sumber kekayaan moral dan spiritual masyarakat. Oleh sebab itu, menciptakan ruang sosial yang aman, terbuka, dan inklusif harus menjadi agenda bersama seluruh elemen bangsa. Ketika masyarakat berhasil membangun ruang sosial seperti itu, nilai toleransi akan tumbuh secara organik, bukan sekadar hasil indoktrinasi formal, melainkan buah dari pengalaman hidup bersama dalam perbedaan.

D. Sinergi antara Rumah, Sekolah, dan Masyarakat

Upaya menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga secara terpisah. Diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang masing-masing memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Keluarga berfungsi sebagai fondasi moral dan emosional, sekolah sebagai

pusat pembelajaran dan rasionalisasi nilai, sementara masyarakat menjadi ruang aktualisasi dan internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Menurut Wijanarka dan Purnama Sari (2025), keberhasilan pendidikan karakter hanya dapat dicapai apabila ketiga lingkungan ini membentuk ekosistem pendidikan nilai yang harmonis dan berkelanjutan.

Keluarga merupakan *madrasah pertama* bagi anak, tempat di mana nilai-nilai dasar tentang cinta kasih, kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi ditanamkan sejak usia dini. Pola asuh yang demokratis dan penuh kasih sayang cenderung melahirkan anak-anak yang terbuka terhadap perbedaan. Ketika keluarga mencontohkan perilaku menghormati orang lain, tidak menebar kebencian, dan aktif berinteraksi lintas komunitas, maka anak akan membawa nilai tersebut ke lingkungan sekolah dan masyarakat.

Sekolah, di sisi lain, berperan menguatkan dasar moral yang sudah tertanam di rumah dengan memberikan kerangka intelektual dan rasionalisasi nilai. Melalui kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan agama, kewarganegaraan, dan literasi multikultural,

sekolah menjadi tempat di mana anak belajar memahami nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Guru dapat mengembangkan pembelajaran berbasis proyek sosial (project-based learning) seperti kegiatan lintas budaya, kerja sosial, atau dialog antariman, yang memungkinkan siswa mengalami langsung praktik toleransi.

Sementara itu, masyarakat berperan sebagai arena praksis dan pembuktian nilai. Lingkungan sosial yang aktif mengadakan kegiatan lintas komunitas, seperti gotong royong antarwarga, festival budaya, bakti sosial lintas agama, atau dialog antarbudaya, memberikan kesempatan bagi anak dan remaja untuk mempraktikkan nilai-nilai toleransi secara nyata. Kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan ini sangat penting agar pendidikan nilai tidak berhenti di ruang kelas, tetapi mengalir dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Penelitian Hasni (2024) menegaskan bahwa pelibatan komunitas lokal dan lembaga budaya dalam pendidikan karakter terbukti meningkatkan kesadaran sosial dan sikap saling menghormati antarwarga. Dengan kata lain, pendidikan nilai

akan lebih efektif bila dikelola sebagai gerakan sosial yang melibatkan semua unsur masyarakat, bukan hanya program administratif sekolah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Kementerian Agama (2025) juga telah mengembangkan inisiatif *Gerakan Sekolah Toleran* yang bertujuan memperkuat kerja sama antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Program ini menekankan pentingnya komunikasi antara orang tua dan guru dalam mendesain kurikulum berbasis toleransi, serta melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam mendampingi praktik moderasi beragama di sekolah.

Dalam konteks global yang semakin terhubung dan kompleks, sinergi ini menjadi semakin penting. Anak-anak dan remaja hidup di dunia yang penuh perbedaan budaya, nilai, dan keyakinan. Mereka harus dibekali kemampuan untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan berbagai kelompok tanpa kehilangan akar moral dan identitas nasionalnya.

BAB 7

STRATEGI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN TOLERANSI DI LEMBAGA ISLAM

Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks, plural, dan dinamis akibat arus globalisasi, urbanisasi, dan digitalisasi, pendidikan toleransi menjadi sebuah kebutuhan mendesak, terutama di lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moralitas, dan etika sosial peserta didik, karena lembaga-lembaga ini tidak hanya bertugas mentransmisikan ilmu agama secara kognitif, tetapi juga berfungsi sebagai laboratorium sosial untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, empati, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan; oleh karena itu, strategi implementasi pendidikan toleransi di lembaga Islam harus dirancang secara sistematis, komprehensif, dan berlapis-lapis, mulai dari level kurikulum, metode pembelajaran, pembinaan karakter, hingga interaksi sosial dan praktik keseharian, sehingga peserta didik tidak sekadar memahami konsep

toleransi secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dan menerapkannya dalam kehidupan nyata sebagai manifestasi dari iman yang matang, akhlak yang mulia, dan kesadaran sosial yang tinggi.

Strategi implementasi pendidikan toleransi dalam lembaga Islam perlu dibangun atas landasan nilai-nilai keislaman yang kokoh, termasuk prinsip rahmah (kasih sayang), 'adl (keadilan), dan ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama di hadapan Allah SWT, dan perbedaan, baik dalam hal keyakinan, budaya, bahasa, maupun latar belakang sosial, adalah sunnatullah yang harus dihormati, bukan dihapuskan; pemahaman ini menjadi fondasi epistemologis bagi lembaga pendidikan Islam untuk merumuskan strategi praktis yang efektif dalam menanamkan toleransi, mulai dari penyusunan kurikulum yang integratif, pemilihan materi ajar yang menekankan nilai inklusif, penerapan metode pembelajaran partisipatif dan kontekstual, hingga pengembangan kegiatan

ekstrakurikuler yang mendorong interaksi lintas identitas.

Implementasi pendidikan toleransi tidak cukup hanya mengandalkan pengajaran di ruang kelas, tetapi juga harus melibatkan seluruh ekosistem pendidikan, termasuk guru, wali santri atau orang tua, lingkungan sekolah, serta komunitas lokal, karena toleransi adalah nilai yang berkembang melalui keteladanan, praktik sehari-hari, dan pengalaman interaksi sosial yang nyata; guru berperan sebagai fasilitator sekaligus model perilaku toleran, membimbing peserta didik untuk menghadapi perbedaan pendapat, konflik, dan dinamika sosial dengan bijaksana, sementara kurikulum harus mendukung keterlibatan aktif peserta didik dalam proyek kolaboratif, kegiatan bakti sosial, dialog lintas agama, dan simulasi pemecahan masalah yang menekankan kerja sama, empati, dan penghargaan terhadap hak dan martabat orang lain.

Menurut laporan UNESCO dan hasil penelitian kontemporer di berbagai madrasah dan pesantren di Indonesia, pendekatan pendidikan toleransi yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan berbasis proyek telah terbukti efektif dalam

menumbuhkan sikap inklusif, kepedulian sosial, serta kesadaran kritis terhadap isu-isu keberagaman dan keadilan sosial, di mana peserta didik tidak hanya menjadi pemeluk dogma agama secara pasif, tetapi juga aktif mempraktikkan nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil 'alamin dalam kehidupan nyata. Strategi ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik pendidikan, sehingga toleransi bukan sekadar teori, melainkan menjadi habitus, yaitu pola berpikir, sikap, dan perilaku yang tertanam secara alami dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Bab ini selanjutnya akan menguraikan secara rinci strategi implementasi pendidikan toleransi di lembaga Islam dalam beberapa aspek, antara lain: pertama, perancangan dan integrasi kurikulum berbasis nilai toleransi yang menyeluruh dan holistik; kedua, pengembangan metode pembelajaran partisipatif dan kontekstual yang memadukan teori, praktik, dan pengalaman sosial nyata; ketiga, peran guru, orang tua, dan komunitas dalam menumbuhkan keteladanan dan penguatan nilai-nilai toleransi; keempat, pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler yang

mendorong interaksi lintas budaya, agama, dan identitas sosial; serta kelima, evaluasi dan monitoring keberhasilan implementasi strategi secara sistematis, sehingga lembaga pendidikan Islam dapat menjadi wahana efektif dalam membentuk generasi Muslim yang moderat, inklusif, dan siap hidup berdampingan secara harmonis di tengah masyarakat plural, sekaligus menjadi agen perdamaian dan pembangunan sosial yang berlandaskan prinsip-prinsip ajaran Islam yang universal dan humanis.

A. Integrasi Nilai Toleransi dalam Kurikulum Madrasah dan Pesantren

1. Kurikulum sebagai Wahana Penanaman Nilai

Kurikulum merupakan *jantung* dari seluruh proses pendidikan, sebab di dalamnya termuat orientasi ideologis, moral, dan sosial yang menentukan arah perkembangan peserta didik. Dalam tradisi pendidikan Islam, kurikulum tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan mata pelajaran atau daftar kompetensi, melainkan sebagai *wasilah* (alat) untuk membentuk manusia paripurna *insan kamil* yang beriman, berilmu, dan berakhhlak. Dengan demikian, kurikulum bukan

hanya memuat pengetahuan tekstual, tetapi juga menjadi medium internalisasi nilai-nilai keislaman yang bersifat universal, termasuk toleransi, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama.

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam di Indonesia, seperti madrasah dan pesantren, kurikulum memiliki posisi strategis sebagai sarana untuk menanamkan nilai kebangsaan dan kemanusiaan universal yang sejalan dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin*. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag, 2025) dalam buku *Moderasi Beragama dalam Kurikulum Madrasah* menegaskan bahwa nilai toleransi harus diintegrasikan secara menyeluruh dalam struktur kurikulum. Nilai tersebut tidak cukup hadir sebagai *muatan lokal* atau pelengkap, tetapi mesti menjadi *ruh yang menjiwai seluruh aktivitas pembelajaran*, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Kurikulum berorientasi toleransi harus mengandung empat dimensi nilai utama:

1. Dimensi kognitif, yaitu pemahaman tentang pluralitas dan keberagaman sosial-keagamaan;

2. Dimensi afektif, yaitu empati, penghargaan, dan sensitivitas terhadap perbedaan;
3. Dimensi moral, yaitu kesadaran untuk berlaku adil dan menjunjung martabat manusia;
4. Dimensi praktis, yaitu kemampuan berdialog dan bekerja sama lintas identitas secara produktif dan damai.

Fadhlhan Garamatan (2024) dalam *Journal of Islamic Educational Reform* menegaskan bahwa “kurikulum yang gagal menanamkan kesadaran multikultural sejak dini akan menghasilkan generasi yang cerdas secara akademik, tetapi rapuh dalam kepekaan sosial.” Oleh karena itu, integrasi nilai toleransi dalam kurikulum madrasah dan pesantren bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan kebutuhan moral yang mendesak untuk menjawab tantangan disintegrasi sosial, polarisasi identitas, dan radikalisme di era digital.

Selain sebagai instrumen akademik, kurikulum juga berfungsi sebagai *ideological framework* yang membentuk *worldview* peserta didik. Melalui kurikulum, lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu meneguhkan peran Islam sebagai agama yang menebarkan rahmat

dan perdamaian, bukan konflik dan eksklusivitas. Dengan demikian, kurikulum madrasah dan pesantren seyoginya menjadi *living curriculum* kurikulum hidup yang berinteraksi dengan realitas sosial dan menjadi refleksi nyata dari nilai-nilai Islam yang kontekstual, humanistik, dan berkeadaban.

2. Integrasi Nilai Toleransi dalam Mata Pelajaran Agama

Integrasi nilai toleransi dalam pendidikan Islam dapat dilakukan dengan melakukan reinterpretasi terhadap materi pelajaran agama yang sudah ada. Artinya, setiap mata pelajaran harus diperkaya dengan pendekatan kontekstual dan perspektif multikultural. Dalam pelajaran Aqidah Akhlak, misalnya, siswa tidak hanya diajarkan konsep teologis tentang rukun iman dan ihsan, tetapi juga diperkenalkan pada makna *rahmah* (kasih sayang) dan *ukhuwwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan). Dengan demikian, keimanan tidak berhenti pada pengakuan terhadap Tuhan, tetapi diwujudkan dalam sikap kasih sayang terhadap sesama manusia.

Dalam pelajaran Fiqih, guru dapat mengajarkan makna *ikhtilaf* (perbedaan pendapat)

sebagai rahmat. Imam al-Syafi'i pernah berkata, "*Pendapatku benar, tetapi mungkin salah, dan pendapat orang lain salah, tetapi mungkin benar.*" (Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 2023). Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perbedaan bukan ancaman bagi kebenaran, melainkan ruang bagi dialog dan pembelajaran. Dengan mengajarkan semangat ini, siswa akan memahami bahwa pluralitas pendapat adalah bagian dari dinamika intelektual Islam, bukan alasan untuk permusuhan.

Dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), nilai toleransi dapat diintegrasikan melalui kajian historis tentang peristiwa-peristiwa yang mencerminkan keharmonisan antarumat beragama. Guru dapat menampilkan kisah Nabi Muhammad SAW di Madinah yang menjalin perjanjian damai dengan komunitas Yahudi dan Nasrani, atau kisah Wali Songo di Nusantara yang menyebarluaskan Islam melalui pendekatan budaya dan dialog sosial. Azyumardi Azra (2024) menegaskan bahwa "*pembelajaran sejarah Islam yang menonjolkan dimensi humanistik dan multikultural akan memperkuat identitas keislaman yang terbuka dan moderat.*"

Selain itu, mata pelajaran umum seperti Bahasa Arab, PKN, dan IPS juga dapat dijadikan wahana penanaman nilai toleransi melalui kegiatan literasi budaya, debat etis, atau studi kasus kehidupan sosial kontemporer. Dengan demikian, integrasi nilai toleransi tidak hanya menjadi tanggung jawab guru agama, tetapi menjadi tugas seluruh elemen pendidikan di madrasah dan pesantren.

3. Rekontekstualisasi Kurikulum Pesantren

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, memiliki kekhasan tersendiri yang menjadikannya lentur dalam merespons perubahan zaman. Ciri utama pesantren adalah kemampuannya mengintegrasikan ilmu keagamaan dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, integrasi nilai toleransi dalam pesantren dapat dilakukan melalui rekontekstualisasi *manhaj al-ta'lim* yaitu memperkaya kurikulum klasik dengan wawasan sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan yang sejalan dengan semangat Islam moderat.

Sejumlah pesantren di Indonesia telah menjadi pelopor pembelajaran berbasis moderasi beragama. Pesantren Tebuireng (Jombang) dan

Pesantren Al-Mizan (Majalengka), misalnya, telah mengembangkan kurikulum integratif dengan mata pelajaran seperti *Islam Rahmatan lil 'Alamin* dan *Dialog Lintas Iman*. Program tersebut mendorong santri tidak hanya memahami kitab kuning secara tekstual, tetapi juga merefleksikan makna universal ajaran Islam dalam konteks masyarakat plural.

Menurut KH. Salahuddin Wahid (2024), *“pesantren harus menjadi tempat lahirnya ulama yang toleran, bukan karena kompromi terhadap kebenaran, tetapi karena memahami bahwa Islam adalah agama kasih dan keadilan bagi seluruh makhluk.”* Dengan demikian, rekontekstualisasi kurikulum pesantren tidak dimaksudkan untuk melemahkan tradisi keilmuan klasik, tetapi justru untuk memperluas horizon keilmuan Islam agar relevan dengan tantangan global.

B. Pendekatan Pembelajaran Partisipatif dan Kontekstual

1. Pembelajaran Partisipatif sebagai Transformasi Nilai

Pendekatan partisipatif (*participatory learning*) merupakan pendekatan pedagogis yang

menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Dalam pendidikan Islam, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *musyawarah* dan *tafa'ul* (interaksi aktif) yang mendorong dialog, refleksi, serta penghargaan terhadap pandangan yang berbeda. Pendekatan partisipatif sangat relevan dalam menanamkan nilai toleransi, karena ia membangun pengalaman sosial yang konkret, bukan sekadar pengajaran verbal.

Menurut *UNESCO Education for Peace Report* (2024), pembelajaran berbasis partisipasi mampu meningkatkan empati dan keterampilan sosial siswa lintas latar belakang hingga 38% dibandingkan model ceramah tradisional. Di madrasah dan pesantren, pendekatan ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan seperti:

- a. Diskusi lintas pandangan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kemanusiaan dan perdamaian;
- b. Simulasi konflik sosial, di mana siswa belajar mencari solusi damai berdasarkan prinsip keadilan Islam;
- c. Proyek sosial kolaboratif, seperti bakti sosial lintas agama, kampanye kebersihan

lingkungan, atau penggalangan dana kemanusiaan.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (2023) menegaskan bahwa *“toleransi tidak lahir dari pengajaran dogmatik, tetapi dari pengalaman hidup bersama dalam perbedaan.”* Oleh karena itu, pendidikan Islam seharusnya memberi ruang bagi siswa untuk berinteraksi langsung dengan keragaman, belajar memahami “yang lain,” dan membangun solidaritas lintas batas identitas. Pembelajaran partisipatif, dengan demikian, menjadi jembatan antara teori dan praktik moral, serta sarana pembentukan karakter sosial yang autentik.

2. Pendekatan Kontekstual: Mengaitkan Nilai Islam dengan Realitas Sosial

Pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning / CTL*) menekankan keterkaitan antara materi ajar dan realitas kehidupan nyata peserta didik. Dalam pendidikan Islam, pendekatan ini berfungsi untuk menjembatani nilai-nilai ajaran agama dengan dinamika sosial masyarakat kontemporer. Dengan kata lain, pembelajaran agama tidak berhenti pada hafalan teks suci, tetapi mendorong siswa untuk

memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari yang plural dan kompleks.

Guru dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan isu-isu sosial aktual, seperti perundungan berbasis agama, penyebaran hoaks keagamaan, atau intoleransi di media sosial. Melalui diskusi dan analisis berbasis *maqasid syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam), siswa akan belajar menilai fenomena tersebut secara kritis dan etis. Rohman & Hidayati (2024) dalam *Journal of Islamic Pedagogy* menyatakan bahwa “*pembelajaran agama yang dikontekstualisasikan dengan realitas sosial mampu membangun literasi keagamaan kritis yang menjadi benteng utama terhadap radikalisme dan disinformasi.*”

Metode *service learning* atau pembelajaran berbasis pengabdian juga dapat diterapkan. Dalam metode ini, siswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga turun langsung ke masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosial berbasis nilai Islam moderat. Program seperti *Madrasah Peduli Lingkungan* dan *Pesantren Sahabat Damai* di Jawa Barat dan DIY (2023–2024) terbukti efektif dalam menumbuhkan empati sosial dan mengurangi potensi intoleransi di kalangan remaja santri.

Pendekatan kontekstual menjadikan pembelajaran agama lebih bermakna, karena siswa tidak hanya memahami Islam secara normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kondisi sosial di sekitarnya. Inilah yang dimaksud dengan *learning by living* belajar melalui pengalaman hidup, sebagaimana prinsip pendidikan Islam klasik yang menekankan keseimbangan antara *ilmu* dan *amal*.

C. Penguatan Karakter Moderat melalui Kegiatan Keagamaan

1. Kegiatan Keagamaan sebagai Medium Internalisasi Nilai

Kegiatan keagamaan di lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan sekolah Islam terpadu bukan sekadar aktivitas rutin yang bersifat ritualistik, tetapi merupakan wahana strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai luhur Islam yang mengedepankan sikap moderat, toleran, dan berkeadaban. Dalam konteks pendidikan Islam, kegiatan seperti pengajian tematik, majelis dzikir, halaqah kebangsaan, peringatan hari besar Islam, maupun kegiatan sosial seperti bakti masyarakat dan santunan yatim

piatu merupakan bentuk nyata dari pendidikan moral dan spiritual yang kontekstual. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya belajar mengenal teks-teks keagamaan secara normatif, tetapi juga menghayati nilai-nilai substansial Islam yang universal seperti rahmah, keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan.

Syekh Ahmad al-Tayyib (2025) dalam *Cairo Declaration on Human Fraternity* menegaskan bahwa “ibadah yang tidak melahirkan kasih sayang terhadap sesama manusia adalah ibadah yang kehilangan ruhnya.” Pandangan ini menunjukkan bahwa dimensi sosial dan kemanusiaan dalam ibadah harus menjadi fokus utama dalam pembentukan karakter moderat. Oleh sebab itu, kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan Islam seyoginya tidak berhenti pada aspek seremonial, tetapi harus berorientasi pada pembentukan kesadaran teologis bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehendak Ilahi (*sunnatullah*) sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat [49]:13 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan

berbangsa-bangsa agar saling mengenal (*lita' arafu*), bukan untuk saling bermusuhan.

Dalam perspektif pendidikan Islam modern, kegiatan keagamaan berfungsi sebagai proses *internalisasi nilai* (value internalization) yang efektif, di mana nilai-nilai moderasi beragama seperti tawasuth (jalan tengah), tawazun (keseimbangan), i'tidal (keadilan), dan tasamuh (toleransi) ditanamkan melalui praktik nyata, bukan sekadar pengajaran teoretis. Menurut Nata (2023), pendidikan Islam yang efektif adalah pendidikan yang mampu "mentransformasikan nilai-nilai keagamaan menjadi kesadaran sosial dan perilaku empatik terhadap sesama manusia." Dalam konteks ini, kegiatan keagamaan menjadi instrumen pembentukan karakter yang berdampak jangka panjang terhadap perilaku peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan seperti *doa lintas komunitas* atau *maulid Nabi bersama antarormas Islam* juga dapat menjadi sarana rekonsiliasi kultural antara berbagai kelompok keagamaan yang sering kali memiliki perbedaan pandangan teologis. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan) dan

ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan), yang menjadi pilar dalam membangun masyarakat Islam yang damai dan inklusif. Maka, penguatan karakter moderat melalui kegiatan keagamaan merupakan bentuk nyata penerapan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin dalam konteks pendidikan kontemporer.

2. Praktik Moderasi Melalui Keteladanan

Keteladanan (*uswah hasanah*) merupakan elemen sentral dalam pembentukan karakter peserta didik, terutama dalam lingkungan pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah. Dalam lembaga-lembaga ini, figur kyai, ustaz, dan guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai panutan moral dan spiritual yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak para santri. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menegaskan bahwa "akhlak bukan sekadar pengetahuan yang diajarkan, tetapi kebiasaan yang tertanam melalui contoh dan latihan yang berulang." Pernyataan ini mengandung makna mendalam bahwa pendidikan karakter yang efektif harus dimulai dari keteladanan nyata, bukan sekadar doktrin verbal.

Dalam praktiknya, kegiatan keagamaan yang diiringi dengan keteladanan guru atau pemimpin spiritual akan memiliki daya pengaruh lebih besar dibandingkan metode indoktrinatif. Misalnya, ketika seorang guru secara konsisten menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan pandangan, menghormati keyakinan orang lain, dan menjunjung etika berdialog, maka peserta didik akan meniru dan menginternalisasi perilaku tersebut sebagai bagian dari kepribadiannya. Penelitian Nuryanti (2024) di UIN Sunan Ampel Surabaya membuktikan bahwa santri yang aktif mengikuti kegiatan *halaqah lintas pesantren* menunjukkan peningkatan sikap toleran hingga 47% dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran keteladanan dalam menumbuhkan karakter moderat yang berakar pada pengalaman langsung, bukan hanya teori.

Program seperti *Pesantren Harmoni* dan *Santri Damai Nusantara* yang melibatkan lintas organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persis merupakan contoh nyata dari praktik moderasi melalui sinergi kelembagaan. Melalui kegiatan tersebut, para

santri belajar untuk mengenal perbedaan mazhab dan pandangan keagamaan tanpa rasa curiga atau permusuhan, melainkan dengan semangat saling menghormati dan memperkaya wawasan keislaman. Inilah esensi pendidikan moderasi: mengajarkan bagaimana berbeda tanpa memecah, dan bagaimana bersatu tanpa menyeragamkan.

D. Peran Kepemimpinan Lembaga Pendidikan dalam Membangun Budaya Inklusif

1. Kepemimpinan Transformasional di Lembaga Islam

Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berfungsi sebagai penentu arah kebijakan, penggerak budaya organisasi, dan inspirator nilai-nilai moral. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan administratif, tetapi juga sebagai amanah moral (*trusteeship*) yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda: *“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi landasan etis bahwa pemimpin

pendidikan Islam harus mengedepankan prinsip keadilan, empati, dan kasih sayang dalam menjalankan kepemimpinannya.

Dalam konteks pendidikan modern, model kepemimpinan transformasional menjadi sangat relevan diterapkan di lembaga pendidikan Islam. Bass & Riggio (2024) dalam karya *Transformational Leadership in Faith-Based Institutions* menegaskan bahwa pemimpin transformasional adalah mereka yang mampu menginspirasi perubahan positif melalui visi, nilai, dan keteladanan moral. Pemimpin semacam ini tidak hanya memerintah, tetapi juga menggerakkan kesadaran kolektif warga sekolah untuk bersama-sama membangun budaya lembaga yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pemimpin pendidikan Islam yang transformasional harus mampu menginternalisasi nilai-nilai moderasi ke dalam setiap aspek kelembagaan, mulai dari kurikulum, kebijakan, hingga interaksi sosial antarwarga sekolah. Ia harus menegakkan keadilan dalam pengambilan keputusan, membuka ruang dialog terhadap perbedaan pendapat, dan menciptakan iklim pembelajaran yang aman bagi semua peserta didik

tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun mazhab keagamaannya.

2. Kebijakan Kelembagaan Berbasis Moderasi

Implementasi nilai-nilai moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam tidak akan efektif tanpa dukungan kebijakan kelembagaan yang berpihak pada inklusivitas. Oleh karena itu, pimpinan lembaga perlu menyusun kebijakan strategis yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Beberapa langkah konkret yang dapat ditempuh antara lain: (1) menyusun kode etik lembaga yang menolak ujaran kebencian dan diskriminasi, (2) mengadakan pelatihan moderasi beragama bagi guru dan tenaga kependidikan, (3) membentuk forum lintas santri atau guru untuk berdialog tentang isu-isu keberagaman, serta (4) mengembangkan kurikulum ekstrakurikuler yang menanamkan nilai-nilai perdamaian, empati, dan kemanusiaan universal.

Laporan Kementerian Agama (Kemenag, 2024) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang telah mengimplementasikan *Rencana Aksi Moderasi Beragama (RAMB)* secara formal mengalami peningkatan indeks toleransi internal

hingga 70% dalam dua tahun. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang berpihak pada moderasi tidak hanya berdampak pada perubahan perilaku individu, tetapi juga mampu membangun budaya organisasi yang harmonis dan produktif.

3. Membangun Budaya Organisasi yang Inklusif

Budaya organisasi dalam lembaga pendidikan Islam merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan program moderasi beragama. Budaya ini mencakup sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang mengatur perilaku seluruh warga lembaga. Membangun budaya inklusif berarti menanamkan nilai-nilai keterbukaan, penghargaan terhadap perbedaan, dan solidaritas sosial lintas kelompok. Amin Abdullah (2023) menjelaskan bahwa "lembaga pendidikan Islam yang inklusif adalah lembaga yang mampu memadukan spiritualitas dengan keterbukaan sosial dalam satu ekosistem pembelajaran yang humanis dan berkeadilan."

Dalam praktiknya, budaya inklusif dapat diwujudkan melalui berbagai cara, misalnya penghormatan terhadap hari besar antarumat beragama, partisipasi siswa dari latar belakang berbeda dalam kegiatan sosial, serta penggunaan

bahasa dan simbol yang tidak eksklusif. Budaya inklusif bukan hanya memperkuat kohesi internal lembaga, tetapi juga menjadi model sosial yang dapat menular ke masyarakat luas.

4. Kolaborasi Lintas Lembaga

Lembaga pendidikan Islam juga perlu menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, lembaga antaragama, serta institusi internasional. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jaringan sosial lembaga, tetapi juga menjadi sarana belajar lintas budaya yang memperkaya wawasan kebangsaan dan kemanusiaan. Sebagai contoh, *Forum Pesantren Moderat Indonesia (FPMI)* yang dibentuk pada tahun 2024 bekerja sama dengan UNDP dan Kementerian Agama telah berhasil melatih lebih dari 500 guru dan santri dalam pendidikan toleransi berbasis nilai Islam. Keberhasilan inisiatif semacam ini menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan hanya proyek ideologis, melainkan gerakan sosial yang melibatkan berbagai unsur bangsa.

BAB 8

MODEL PENDIDIKAN ISLAM

MULTIKULTURAL

Dalam lintasan sejarah peradaban manusia, pendidikan selalu menjadi medium paling strategis untuk membentuk karakter, nilai, dan arah suatu masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga sebagai upaya transformasi nilai (*transformation of values*) yang menuntun manusia untuk hidup secara harmonis dalam keberagaman sosial, budaya, dan agama. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik dan multikultural, pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan besar untuk tidak sekadar mendidik generasi yang taat beragama, tetapi juga melahirkan insan yang terbuka, inklusif, dan menghargai perbedaan sebagai realitas sosial yang niscaya (*sunnatullah*). Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mengembangkan model pendidikan Islam multikultural yang mampu memadukan nilai-nilai

keislaman universal dengan semangat kebangsaan dan kemanusiaan global.

Konsep pendidikan Islam multikultural lahir dari kesadaran bahwa Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin—agama yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, ras, dan keyakinan. Ajaran Islam sejak awal menolak segala bentuk diskriminasi dan penindasan atas dasar identitas. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]:13, bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal (*lita'arafu*), bukan untuk saling meniadakan. Nilai ilahiah ini menjadi fondasi filosofis bagi pendidikan Islam yang berorientasi pada multikulturalisme. Dengan demikian, model pendidikan Islam multikultural merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari ajaran Islam, sekaligus menjawab tantangan pluralitas sosial di era modern.

Dalam praktiknya, pendidikan Islam di Indonesia sering kali masih dihadapkan pada dikotomi antara pendidikan normatif-teologis dan

pendidikan sosial-humanistik. Di satu sisi, terdapat kecenderungan untuk menekankan aspek dogmatis ajaran agama secara kaku; sementara di sisi lain, muncul kebutuhan untuk menjadikan pendidikan agama sebagai sarana membangun kesadaran sosial dan kebangsaan. Model pendidikan Islam multikultural hadir untuk menjembatani kedua kutub ini, dengan memandang bahwa iman dan kemanusiaan tidaklah bertentangan, melainkan saling melengkapi. Iman yang benar seharusnya melahirkan kasih sayang dan keterbukaan terhadap sesama manusia, sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya: *“Tidak beriman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”* (HR. Bukhari-Muslim).

Dalam konteks sosial kontemporer, urgensi pendidikan Islam multikultural semakin mengemuka seiring meningkatnya gejala intoleransi, polarisasi sosial, dan penyempitan makna keberagamaan di ruang publik. Hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN, 2025) menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan eksklusivitas di sejumlah lembaga

pendidikan Islam, terutama dalam hal pemahaman terhadap kelompok berbeda dan narasi identitas keagamaan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk merancang model pendidikan yang tidak hanya menanamkan doktrin agama, tetapi juga menumbuhkan empati sosial dan kesadaran multikultural.

Model pendidikan Islam multikultural tidak dapat dipahami sekadar sebagai metode pedagogik atau pendekatan pembelajaran, tetapi sebagai paradigma epistemologis dan praksis sosial yang memandang perbedaan sebagai kekayaan. Ia mengandaikan bahwa pendidikan harus menjadi ruang aman bagi semua peserta didik untuk mengekspresikan identitasnya, berdialog secara setara, serta belajar hidup bersama dalam perbedaan. Dalam hal ini, Alwasilah (2024) menegaskan bahwa pendidikan multikultural adalah “usaha sadar untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan sumber pembelajaran sosial.” Pandangan ini sangat sejalan dengan semangat pendidikan Islam yang menempatkan ilmu dan akhlak sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Dalam konteks pendidikan Islam, model multikultural mengandung dua dimensi utama: pertama, dimensi teologis-normatif, yaitu peneguhan kembali prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan universal; dan kedua, dimensi pedagogis-praktis, yaitu penerjemahan nilai-nilai tersebut dalam strategi, kurikulum, metode, dan budaya pembelajaran yang menghormati keberagaman peserta didik. Dengan demikian, pendidikan Islam multikultural tidak hanya bicara tentang apa yang diajarkan, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai itu dihidupkan dan diinternalisasi dalam keseharian peserta didik dan lembaga pendidikan.

Pengembangan model pendidikan Islam multikultural di Indonesia memiliki relevansi historis yang kuat. Tradisi Islam Nusantara sejak lama dikenal sebagai Islam yang ramah, moderat, dan menghargai budaya lokal. Tradisi ini berkembang melalui pesantren, surau, dan madrasah yang bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan. Menurut Azra (2023), "Islam di Indonesia tumbuh

“bukan melalui penaklukan, tetapi melalui akulturasi budaya dan dialog kemanusiaan.” Dengan demikian, pendidikan Islam multikultural bukanlah konsep asing, melainkan bagian integral dari warisan keislaman Nusantara yang perlu dihidupkan kembali dalam konteks modern.

Dalam masyarakat global yang kini terhubung oleh teknologi informasi dan mobilitas lintas budaya, model pendidikan Islam multikultural juga menjadi kebutuhan universal. UNESCO (2023) melalui laporan *Transforming Education for Peaceful Coexistence* menegaskan pentingnya pendidikan yang menumbuhkan “global citizenship,” yakni kesadaran untuk hidup damai dalam keragaman dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Prinsip ini sangat sejalan dengan visi Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin*. Oleh karena itu, pendidikan Islam multikultural dapat menjadi kontribusi nyata umat Islam terhadap pembangunan peradaban dunia yang damai dan berkeadilan.

Perumusan model pendidikan Islam multikultural tidak bisa dilakukan secara simplistik. Ia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual, mencakup aspek

kurikulum, pedagogi, budaya lembaga, serta partisipasi komunitas. Kurikulum harus dirancang untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, empati, dan kesadaran sosial. Proses pembelajaran harus mendorong dialog dan refleksi, bukan indoktrinasi. Budaya lembaga pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai keterbukaan, partisipasi, dan keadilan. Sementara itu, hubungan antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat perlu dibangun secara sinergis untuk memastikan bahwa nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan tidak berhenti di ruang kelas, tetapi hidup dalam praktik sosial sehari-hari.

Menurut Wahyudi & Nuryana (2024), keberhasilan model pendidikan Islam multikultural ditentukan oleh tiga pilar utama: *integrasi nilai, interaksi sosial, dan internalisasi praksis*. Integrasi nilai berarti menempatkan prinsip Islam moderat ke dalam struktur kurikulum dan visi lembaga; interaksi sosial berarti menciptakan ruang dialog dan kerja sama lintas perbedaan; dan internalisasi praksis berarti membentuk kebiasaan sosial yang merefleksikan nilai-nilai toleransi. Ketiga pilar ini menjadi kerangka berpikir yang akan diuraikan lebih dalam pada bab ini.

Sebagai bagian dari pembahasan yang lebih luas, Bab 8 ini akan menguraikan ragam model pendidikan Islam multikultural yang telah berkembang di Indonesia dan dunia internasional, baik dalam konteks formal (madrasah, pesantren, universitas Islam) maupun nonformal (komunitas dan organisasi sosial keagamaan). Bab ini juga akan menelaah dimensi teoritis dan aplikatif dari setiap model, serta memberikan analisis terhadap kelebihan, keterbatasan, dan tantangan implementasinya dalam konteks masyarakat global yang kompleks.

Struktur Bab ini akan mencakup empat bagian utama. Pertama, landasan filosofis dan epistemologis model pendidikan Islam multikultural, yang menjelaskan akar konseptual dan kerangka berpikir Islam dalam melihat keberagaman. Kedua, pendekatan-pendekatan model pembelajaran multikultural dalam pendidikan Islam, mencakup model reflektif, dialogis, integratif, dan partisipatif. Ketiga, evaluasi model pendidikan multikultural dan indikator keberhasilannya, yang menguraikan bagaimana nilai-nilai toleransi dapat diukur dan diinternalisasi secara berkelanjutan. Keempat,

implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan dan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, dengan menyoroti peran lembaga pendidikan, guru, dan komunitas dalam membangun ekosistem pendidikan yang damai dan berkeadaban.

Dengan demikian, Bab ini bukan hanya mengulaskan konsep teoretis tentang multikulturalisme dalam pendidikan Islam, tetapi juga menawarkan kerangka operasional bagi pelaksanaannya di berbagai konteks pendidikan. Harapannya, dari pembahasan ini dapat lahir suatu model pendidikan Islam multikultural yang relevan dengan konteks Indonesia—sebuah model yang mampu menumbuhkan generasi beriman, berilmu, berakhlak mulia, sekaligus menghargai kemajemukan dan berperan aktif dalam membangun perdamaian dunia.

Sebagaimana ditegaskan oleh Amin Abdullah (2025), “Pendidikan Islam masa depan bukan sekadar tentang pengajaran agama, tetapi tentang pembentukan peradaban yang menghargai kemanusiaan.” Karena itu, model pendidikan Islam multikultural merupakan manifestasi nyata dari cita-cita Islam sebagai agama pembawa

rahmat, yang tidak berhenti pada doktrin, tetapi hidup dalam praktik sosial yang meneguhkan keadilan, kedamaian, dan persaudaraan universal.

A. Model Integratif (Agama–Sosial–Kemanusiaan)

Pendidikan Islam pada hakekatnya bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi merupakan sistem yang holistik dan menyeluruh, yang bertujuan membentuk manusia paripurna (*insan kamil*) yang memiliki keseimbangan antara dimensi spiritual, intelektual, sosial, dan moral. Dalam masyarakat modern yang plural, multikultural, dan sarat dengan dinamika sosial-ekonomi, pendidikan Islam tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai pengajaran ritual semata, tetapi harus dikembangkan menjadi suatu model integratif yang memadukan nilai-nilai agama, sosial, dan kemanusiaan dalam satu kesatuan utuh yang harmonis. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa Islam sebagai rahmatan lil 'alamin tidak hanya menuntun manusia dalam pengabdian spiritual, tetapi juga memandu mereka untuk menghormati keberagaman, menegakkan keadilan sosial, dan membangun solidaritas yang

inklusif antarumat manusia, sehingga pendidikan Islam menjadi wahana pembentukan karakter dan etika sosial yang responsif terhadap tantangan kontemporer.

Menurut Tang, Adil, dan Rosmini (2023), kurikulum pendidikan Islam yang multikultural saat ini menekankan pada keterpaduan antara nilai-nilai spiritual keagamaan dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Kurikulum semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengajaran, tetapi juga sebagai *medium* internalisasi nilai-nilai toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial. Melalui kurikulum integratif, peserta didik tidak hanya dituntun untuk memahami doktrin keagamaan secara tekstual, tetapi juga belajar mengamalkan nilai-nilai Islam dalam konteks sosial nyata, sehingga lahirlah generasi Muslim yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga sensitif terhadap penderitaan sosial, adil dalam pergaulan, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas.

Model integratif ini menolak dikotomi yang sering kali membatasi antara ilmu agama dan ilmu sosial. Dalam paradigma integratif, ajaran agama

tidak dipandang sebagai ranah privat atau doktrin yang hanya berlaku dalam kehidupan spiritual, melainkan sebagai sumber etika sosial yang memandu manusia dalam mengelola kehidupan publik secara bijak dan harmonis. Pendekatan ini selaras dengan konsep *double movement* Fazlur Rahman (1982), yang menekankan bahwa pemahaman ajaran Islam harus bergerak dari konteks historis ke konteks sosial kontemporer agar nilai-nilai agama senantiasa relevan, adaptif, dan responsif terhadap realitas kemanusiaan. Artinya, pendidikan Islam tidak cukup menekankan hafalan atau penguasaan hukum semata, tetapi harus membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, kepekaan sosial, dan kesadaran kemanusiaan yang membimbing mereka untuk menegakkan keadilan dan kasih sayang dalam kehidupan nyata.

Nilai-nilai utama dalam model integratif ini mencakup konsep ta'awun (tolong-menolong), 'adl (keadilan), dan ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan). Dalam praktiknya, lembaga pendidikan Islam dapat mengintegrasikan kegiatan sosial seperti bakti sosial lintas agama, kerja sama pelestarian

lingkungan, kunjungan sosial, dan dialog lintas budaya ke dalam proses pembelajaran. Hal ini memastikan bahwa peserta didik tidak hanya memahami prinsip-prinsip agama dalam teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks sosial yang nyata. Penelitian Rahman dkk. (2024) menunjukkan bahwa pendidikan Islam berbasis multikultural dan integratif memiliki efek signifikan dalam membangun kesadaran sosial, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan, sekaligus memperkuat keterampilan praktis peserta didik dalam memecahkan masalah sosial secara konstruktif dan humanis.

Model integratif ini juga memiliki dimensi epistemologis yang sangat penting. Dengan menolak pemisahan tajam antara ilmu agama dan ilmu umum, pendekatan ini mengakui bahwa disiplin ilmu sosial, politik, ekonomi, dan budaya merupakan medan pengamalan nilai-nilai Islam. Misalnya, pelajaran fiqh atau akhlak tidak hanya berhenti pada pemahaman tentang hukum dan norma moral, tetapi harus mampu menjawab pertanyaan nyata: bagaimana prinsip 'adl diterapkan dalam kebijakan publik, bagaimana prinsip rahmah diwujudkan dalam pelayanan

kemanusiaan, atau bagaimana nilai toleransi dapat diterapkan dalam interaksi sosial lintas budaya dan agama. Dengan demikian, peserta didik belajar menempatkan pengetahuan agama dalam konteks kehidupan nyata yang kompleks dan dinamis, sehingga pendidikan Islam menjadi relevan dengan tantangan globalisasi dan pluralitas sosial.

Selain itu, implementasi model integratif ini harus didukung oleh pendekatan pedagogis yang kontekstual, dialogis, dan reflektif. Guru tidak lagi berperan sebagai figur otoritatif yang sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik menemukan relevansi ajaran Islam dengan kehidupan sosial mereka sendiri. Dengan bimbingan guru yang tepat, siswa mampu menginternalisasi nilai-nilai agama sekaligus mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk membangun hubungan antarindividu yang harmonis. Lembaga pendidikan Islam dengan model ini akan menjadi ruang transformasi sosial, tempat di mana agama, kemanusiaan, dan praktik sosial bertemu dalam harmoni nilai dan tindakan yang nyata.

B. Model Pembelajaran Berbasis Proyek Kebersamaan

Salah satu strategi paling efektif dalam implementasi pendidikan Islam multikultural adalah model pembelajaran berbasis proyek kebersamaan (*project-based collaborative learning*). Model ini berangkat dari asumsi bahwa nilai-nilai multikulturalisme tidak dapat dipelajari secara mendalam hanya melalui ceramah atau instruksi verbal, melainkan harus dialami secara langsung melalui interaksi dan kerja sama sosial. Proyek kebersamaan memungkinkan peserta didik untuk mengalami prinsip-prinsip keadilan, toleransi, empati, dan solidaritas secara praktis, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari perilaku sehari-hari.

Dalam proyek kebersamaan, siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan yang menuntut kerja sama lintas kelompok, baik antaragama, antarbudaya, maupun antar sekolah. Contoh konkret dari implementasi model ini mencakup kegiatan bakti sosial untuk membersihkan lingkungan, festival budaya, penelitian kolaboratif mengenai tradisi lokal, kampanye digital untuk menyebarluaskan pesan toleransi, dan program

pengabdian masyarakat lintas etnis. Farid dkk. (2024) menegaskan bahwa proyek-proyek sosial semacam ini terbukti efektif menumbuhkan kesadaran multikultural peserta didik, memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati, serta meningkatkan keinginan untuk hidup berdampingan dalam harmoni sosial.

Model pembelajaran berbasis proyek kebersamaan menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dari pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri makna dan relevansi nilai-nilai keberagaman melalui pengalaman nyata. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *experiential learning* yang menekankan belajar melalui pengalaman, refleksi, dan aksi nyata. Dengan demikian, siswa tidak hanya menerima konsep teori, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai Islam melalui praktik sosial yang nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan melekat dalam perilaku mereka.

Selain aspek kognitif, proyek kebersamaan juga mengintegrasikan dimensi afektif dan psikomotorik. Siswa tidak hanya mempelajari nilai toleransi secara intelektual, tetapi juga

mempraktikkannya melalui kerja sama, komunikasi efektif, dan tindakan sosial. Hal ini memperkuat karakter empati, kepedulian sosial, dan kemampuan beradaptasi dalam masyarakat plural, yang menjadi inti dari ajaran Islam rahmatan lil 'alamin. Ekasari, Alya, dan Puspika Sari (2025) menekankan bahwa pendidikan Islam melalui proyek kolaboratif dapat membentuk karakter sosial yang harmonis, mendorong keterampilan berpikir kritis, serta menumbuhkan kesadaran multikultural yang menjadi modal penting bagi generasi muda untuk berinteraksi secara konstruktif di masyarakat.

Implementasi proyek kebersamaan dapat dilakukan melalui beberapa tahap sistematis:

1. Identifikasi masalah sosial atau isu keberagaman yang relevan dengan lingkungan peserta didik.
2. Perencanaan proyek kolaboratif, dengan melibatkan siswa dari latar belakang berbeda secara aktif.
3. Pelaksanaan proyek lapangan, seperti kegiatan sosial, festival budaya, atau dialog lintas iman.

4. Refleksi bersama, di mana siswa menganalisis pengalaman, tantangan, serta nilai-nilai yang diperoleh selama proyek.
5. Publikasi hasil proyek, melalui laporan, pameran, media digital, atau kegiatan diseminasi lainnya untuk menyebarluaskan pemahaman multikultural.

Dengan model ini, peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijak secara sosial, empatik, dan responsif terhadap perbedaan. Dalam jangka panjang, model pembelajaran berbasis proyek kebersamaan menjadi sarana strategis untuk membentuk generasi Muslim yang toleran, moderat, dan mampu menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat plural, sesuai dengan prinsip Islam rahmatan lil 'alamin.

C. Model Reflektif dan Dialogis Antar Peserta Didik

Dalam kerangka pendidikan Islam multikultural, pendekatan reflektif dan dialogis merupakan instrumen epistemologis sekaligus pedagogis yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran diri (*self-awareness*) dan kesadaran sosial (*social-awareness*) peserta didik.

Model ini tidak sekadar mengajarkan pengetahuan normatif tentang keberagaman, tetapi lebih jauh menginternalisasi nilai-nilai Islam yang menekankan keterbukaan, penghargaan terhadap perbedaan, dan keadilan sosial melalui proses pembelajaran yang bersifat partisipatif dan humanis.

Pendidikan Islam yang berlandaskan refleksi dan dialog sesungguhnya berakar kuat dalam tradisi intelektual Islam klasik. Sejak masa para ulama besar seperti Al-Ghazali, Ibn Rushd, dan Al-Farabi, kegiatan berpikir kritis dan berdialog telah menjadi fondasi pembentukan insan kamil manusia paripurna yang mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal. Dalam konteks pendidikan modern, pendekatan reflektif-dialogis berfungsi untuk melatih peserta didik berpikir secara kritis dan etis, serta mengaitkan antara teks keagamaan dan realitas sosial yang kompleks.

Model reflektif-dialogis menolak paradigma pendidikan yang dogmatis dan satu arah. Sebaliknya, ia menekankan proses pembelajaran yang dinamis, di mana siswa diajak untuk berbicara, mendengarkan, dan merefleksikan pengalaman keberagaman di sekitarnya. Melalui

dialog yang terbuka dan mendalam, siswa tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga memahami realitas keberagaman secara eksistensial yakni bahwa perbedaan merupakan bagian integral dari ciptaan Allah SWT. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum [30]:22, "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi serta perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."

Dalam ruang kelas dialogis, guru berperan bukan sebagai otoritas tunggal, melainkan sebagai *fasilitator* yang menuntun proses berpikir kritis peserta didik. Guru menciptakan atmosfer akademik yang aman (*safe learning space*), di mana setiap siswa merasa dihargai untuk mengemukakan pendapat tanpa rasa takut dikritik atau disalahkan. Pendekatan semacam ini sangat relevan untuk menumbuhkan karakter toleran, karena toleransi tidak dapat diajarkan secara verbal, tetapi harus dialami secara langsung dalam proses interaksi sosial.

Yahdi (2025) menegaskan bahwa pendidikan agama Islam di era modern harus mampu

“mengakui sisi positif dan negatif dari keberagaman, dengan menempatkan dialog sebagai medium memahami makna perbedaan secara konstruktif dan kontekstual.” Dialog dalam pendidikan Islam bukan semata percakapan akademis, melainkan *ibadah intelektual* yang mempertemukan akal dan hati, logika dan empati. Melalui dialog, siswa belajar mengurai prasangka dan stereotip yang sering kali menjadi sumber konflik sosial di masyarakat.

Model reflektif-dialogis juga mengasah kemampuan metakognitif dan empatik peserta didik. Mereka tidak hanya memahami perbedaan secara kognitif, tetapi juga merasakan secara emosional apa yang dialami oleh orang lain. Dalam perspektif Islam, kemampuan reflektif ini sejalan dengan konsep *muhasabah*, yakni introspeksi diri terhadap hubungan manusia dengan Allah SWT dan sesamanya. Dengan demikian, refleksi bukan hanya tindakan intelektual, tetapi juga spiritual—suatu proses mengenal diri sebagai makhluk sosial dan hamba Tuhan yang berkewajiban menebar kedamaian.

Dalam praktiknya, model reflektif-dialogis dapat diterapkan melalui berbagai metode

pembelajaran partisipatif seperti *sharing circle*, debat akademik, *focus group discussion*, *jurnal refleksi pribadi*, atau simulasi kasus sosial keagamaan. Misalnya, siswa diminta menganalisis isu-isu aktual seperti intoleransi di media sosial, perbedaan pandangan fiqih dalam masyarakat, atau konflik antaragama dari perspektif nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. Proses refleksi kemudian dilakukan melalui penulisan *jurnal* atau diskusi kelompok untuk menilai kembali posisi dan persepsi masing-masing.

Guru perlu memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan dalam suasana empati dan saling menghormati. Setiap pendapat yang muncul diposisikan sebagai kontribusi terhadap pembelajaran kolektif, bukan sebagai bahan perdebatan untuk menang atau kalah. Di pesantren dan madrasah, pendekatan reflektif-dialogis dapat diintegrasikan dalam kegiatan pengajian tematik, kajian tafsir sosial Al-Qur'an, atau forum *halaqah kebangsaan* yang menghubungkan nilai keagamaan dengan isu kemanusiaan dan kebangsaan.

Hasil penelitian Supriyandi dkk. (2024) menunjukkan bahwa penerapan pendekatan

dialogis dalam pembelajaran agama Islam multikultural terbukti efektif dalam mengurangi stereotip negatif dan meningkatkan sikap inklusif antar siswa. Studi tersebut melaporkan bahwa peserta didik yang terlibat secara aktif dalam proses dialog terbimbing mengalami peningkatan kesadaran terhadap hak-hak orang lain serta menunjukkan komitmen yang lebih tinggi terhadap perdamaian sosial. Temuan ini menegaskan bahwa dialog bukan sekadar metode komunikasi, tetapi juga sarana transformasi kesadaran dan perilaku.

Model reflektif-dialogis tidak hanya menghasilkan pemahaman konseptual tentang multikulturalisme Islam, tetapi juga menumbuhkan kematangan spiritual yang mendalam. Peserta didik belajar bahwa Islam bukan sekadar kumpulan dogma dan aturan, melainkan jalan hidup (*way of life*) yang menuntut keterbukaan, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama. Melalui refleksi dan dialog, pendidikan Islam diarahkan untuk melahirkan generasi yang berpikir kritis, berjiwa empatik, dan mampu menjembatani perbedaan sebagai bagian dari rahmat Tuhan yang harus dirawat bersama.

D. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan

Penerapan Model

Setiap model pendidikan, termasuk pendidikan Islam multikultural berbasis refleksi dan dialog, memerlukan sistem evaluasi yang menyeluruh untuk mengukur efektivitas dan dampaknya terhadap peserta didik. Evaluasi dalam konteks ini tidak dapat dibatasi pada aspek kognitif semata, seperti penguasaan konsep teologis atau historis, tetapi harus mencakup transformasi afektif dan perilaku sosial yang nyata dalam kehidupan peserta didik.

Tujuan utama evaluasi pendidikan multikultural adalah menilai sejauh mana nilai-nilai Islam yang inklusif seperti toleransi, keadilan, empati, dan solidaritas sosial benar-benar diinternalisasi dan diwujudkan dalam tindakan. Oleh karena itu, instrumen evaluasi harus mencerminkan dimensi integral antara *knowing*, *feeling*, dan *doing*. Siswa dinilai tidak hanya berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang keberagaman, tetapi juga bagaimana mereka bersikap terhadap perbedaan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang majemuk.

Indikator keberhasilan penerapan model ini dapat diuraikan dalam beberapa aspek utama. Pertama, adanya peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam yang bersifat universal dan inklusif, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip keadilan sosial, serta semangat persaudaraan lintas perbedaan. Kedua, adanya perubahan sikap terhadap kelompok lain dari yang semula bersifat eksklusif dan stereotipis menuju sikap empatik dan apresiatif terhadap keberagaman. Ketiga, peningkatan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial lintas budaya dan lintas agama yang menunjukkan keterbukaan dan kemampuan bekerja sama. Keempat, munculnya kemampuan reflektif dalam menganalisis perbedaan dan konflik sosial dengan perspektif keislaman yang damai dan konstruktif. Kelima, terbentuknya komitmen moral terhadap nilai keadilan dan kemanusiaan universal yang menjadi inti ajaran Islam.

Gultom dan Lubis (2024) dalam penelitiannya di SMA Abdi Negara Binjai menemukan bahwa penerapan pendidikan Islam berbasis multikultural menghasilkan peningkatan signifikan dalam sikap toleransi, kerja sama lintas

kelompok, serta hubungan sosial yang harmonis antar siswa. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan multikultural tidak dapat diukur semata-mata melalui nilai ujian, tetapi melalui perubahan perilaku sosial dan kemampuan hidup berdampingan secara damai.

Evaluasi pendidikan multikultural sebaiknya bersifat partisipatif, melibatkan guru, siswa, dan masyarakat sebagai subjek penilai. Hal ini penting karena nilai-nilai sosial seperti toleransi dan inklusivitas hanya dapat dinilai melalui pengamatan terhadap praktik kehidupan nyata di luar kelas. Evaluasi formatif (selama proses berlangsung) berfungsi untuk memberikan umpan balik yang cepat terhadap pendekatan pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif (setelah proses selesai) menilai dampak jangka panjang terhadap perilaku sosial siswa dan budaya sekolah.

Selain itu, lembaga pendidikan Islam dapat mengembangkan *rubrik penilaian karakter moderat*, misalnya dengan indikator sikap menghargai pendapat berbeda, kemampuan berdialog secara sopan, serta partisipasi dalam kegiatan sosial lintas latar belakang. Penggunaan instrumen kualitatif

seperti observasi, wawancara reflektif, dan portofolio refleksi akan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang perkembangan karakter peserta didik.

Dalam jangka panjang, indikator tertinggi keberhasilan model reflektif-dialogis dalam pendidikan Islam multikultural adalah terbentuknya masyarakat Islam yang berkeadaban yakni masyarakat yang tidak hanya beriman dan berilmu, tetapi juga berakhlak sosial tinggi, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan berperan aktif dalam membangun perdamaian dunia. Pendidikan Islam yang demikian akan menjadi benteng moral peradaban dan sumber inspirasi bagi masyarakat global yang mendambakan harmoni di tengah pluralitas.

BAB 9

STUDI KASUS DAN BEST PRACTICES

Dalam upaya memahami secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip pendidikan toleransi dan multikultural dapat diimplementasikan secara nyata dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik madrasah, pesantren, maupun sekolah Islam terpadu, bab ini hadir sebagai ruang analisis yang menekankan pentingnya studi kasus dan praktik terbaik (best practices) sebagai sarana refleksi empiris, evaluasi kritis, serta inspirasi bagi pengembangan strategi pendidikan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat yang plural dan multikultural; karena meskipun kerangka teoretis mengenai pendidikan toleransi dan multikulturalisme telah dikaji secara mendalam dalam bab-bab sebelumnya, pemahaman yang mendalam mengenai penerapan nyata di lapangan memerlukan penelaahan langsung terhadap institusi, program, kegiatan, dan model pembelajaran yang telah terbukti berhasil menumbuhkan kesadaran, empati, dan

kemampuan hidup berdampingan di tengah keberagaman etnis, agama, budaya, dan sosial.

Studi kasus yang akan dibahas dalam bab ini tidak hanya menekankan deskripsi formal institusi, tetapi juga menelusuri proses, metodologi, dan praktik pedagogik yang digunakan oleh para pendidik, pimpinan, dan komunitas peserta didik dalam menginternalisasi nilai-nilai toleransi, keadilan sosial, dan kemanusiaan universal. Pendekatan ini memungkinkan pembaca untuk memahami bagaimana teori diterjemahkan menjadi praktik nyata, sekaligus bagaimana tantangan yang muncul dalam konteks kehidupan sosial dan budaya tertentu dapat dihadapi melalui inovasi pendidikan yang kontekstual, inklusif, dan partisipatif. Dengan kata lain, bab ini menekankan bahwa best practices bukan sekadar pencapaian administratif atau akademik, melainkan juga hasil dari proses pembelajaran sosial yang melibatkan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari guru, orang tua, santri atau siswa, hingga komunitas lokal sebagai bagian integral dari pendidikan karakter yang berorientasi pada penghormatan terhadap perbedaan.

Bab ini, secara keseluruhan, bertujuan untuk menunjukkan bahwa pendidikan toleransi yang efektif di lembaga Islam memerlukan integrasi antara teori, praktik, dan konteks sosial yang nyata; bahwa nilai-nilai multikulturalisme dan toleransi tidak dapat diajarkan hanya melalui ceramah atau transfer pengetahuan, tetapi harus dialami, diamalkan, dan direfleksikan secara nyata oleh peserta didik melalui pengalaman sosial, interaksi lintas identitas, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kolektif; serta bahwa keberhasilan implementasi pendidikan toleransi dapat diukur tidak hanya melalui indikator akademik, tetapi juga melalui perubahan sikap, perilaku, dan kesadaran sosial peserta didik yang menunjukkan kemampuan mereka untuk hidup berdampingan dengan damai, menghargai perbedaan, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama dalam masyarakat plural.

Dalam bab ini, pembaca akan diperkenalkan pada berbagai contoh lembaga pendidikan Islam yang telah berhasil menerapkan pendidikan toleransi secara konsisten, termasuk program-program inovatif di pesantren progresif, madrasah inklusif, dan sekolah Islam terpadu modern, yang

masing-masing menunjukkan bagaimana nilai-nilai keislaman yang universal dapat dipadukan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman, sehingga terbentuk generasi muslim yang moderat, berkarakter kuat, empatik, dan mampu menjadi agen perdamaian dan pembangunan sosial di tengah masyarakat yang majemuk dan dinamis.

A. Studi Kasus Lembaga Pendidikan Islam yang Menerapkan Nilai Toleransi

1. Potret Umum Implementasi Toleransi di Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran strategis yang sangat penting dalam membangun fondasi keberagamaan yang moderat, toleran, dan berkeadaban. Fungsi utama lembaga-lembaga ini tidak terbatas pada sekadar transmisi pengetahuan agama secara normatif, tetapi lebih luas lagi sebagai arena pembentukan karakter sosial yang menekankan nilai-nilai hidup berdampingan di tengah masyarakat yang plural dan multikultural. Dalam praktiknya, madrasah dan pesantren modern berusaha mengembangkan program pendidikan yang tidak hanya

mengutamakan penguasaan ilmu agama secara teoretis, tetapi juga menekankan internalisasi nilai-nilai sosial, moral, dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Menurut laporan Kementerian Agama Republik Indonesia (2024), terdapat tren peningkatan yang signifikan dalam jumlah lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum dan aktivitas ekstrakurikuler. Dari sekitar 82 ribu madrasah yang tersebar di seluruh nusantara, lebih dari 61% telah menerapkan kebijakan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan empati sosial. Implementasi ini mencakup berbagai dimensi: pengembangan mata pelajaran yang berorientasi multikultural, penanaman sikap hormat terhadap perbedaan, pembelajaran pengalaman sosial, hingga kegiatan kolaboratif lintas kelompok sosial dan agama. Fenomena ini menunjukkan kesadaran yang semakin kuat bahwa pendidikan Islam tidak dapat terlepas dari konteks sosial budaya yang plural, dan bahwa proses pembelajaran di madrasah maupun pesantren harus menekankan aspek

transformasi nilai, bukan sekadar penguasaan informasi.

2. Studi Kasus: Pesantren Tebuireng, Jombang

Pesantren Tebuireng, yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari, menjadi contoh nyata penerapan nilai toleransi yang integral dalam pendidikan Islam. Di bawah pengelolaan Yayasan Hasyim Asy'ari, pesantren ini mengembangkan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara penguasaan ilmu agama, pengembangan karakter, dan kesadaran sosial. Kurikulum Tebuireng tidak hanya mengajarkan peserta didik tentang hukum fiqih, tafsir Al-Qur'an, atau hadis, tetapi juga mengaitkan materi-materi tersebut dengan praktik nyata dalam interaksi sosial yang menghormati perbedaan, baik etnis, budaya, maupun keyakinan agama.

Dalam wawancara yang dimuat Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel (Najib, 2024), pimpinan pesantren menegaskan bahwa santri dibiasakan berdialog dengan tokoh lintas agama melalui kegiatan tahunan yang dinamakan "Dialog Kebangsaan Santri Nusantara." Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman teologis dan sosial mengenai pluralitas masyarakat Indonesia.

Selain itu, program sosial seperti “Santri Mengabdi di Desa Minoritas” menjadi agenda tetap sejak 2019, di mana santri diberi kesempatan berinteraksi dan bekerja sama dengan komunitas non-Muslim dalam proyek-proyek sosial. Evaluasi internal pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kesadaran santri terhadap pentingnya hidup berdampingan meningkat hingga 32% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan efektivitas program dalam menanamkan nilai toleransi melalui pengalaman praktis, bukan sekadar teori.

3. Studi Kasus: MAN 1 Yogyakarta

Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta juga merupakan contoh lembaga pendidikan yang berhasil mengintegrasikan nilai toleransi melalui Project Based Learning bertema “Multicultural Harmony.” Dalam kegiatan akademiknya, siswa dilibatkan dalam proyek kolaboratif lintas sekolah, termasuk berinteraksi dengan SMA Katolik dan sekolah Kristen di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program “Youth Interfaith Dialogue.” Program ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta didik tentang pentingnya dialog lintas agama, kesetaraan, dan

penghormatan terhadap perbedaan, selaras dengan prinsip tasamuh (toleransi) dan ‘adl (keadilan sosial) sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Mumtahanah [60]:8 dan QS. Al-Hujurat [49]:13. Hasil survei internal menunjukkan bahwa 87% siswa mampu memahami nilai keberagaman secara mendalam dan mengekspresikan pemahaman tersebut dalam interaksi sosial sehari-hari tanpa sikap eksklusif.

B. Contoh Praktik Baik di Pesantren, Madrasah, dan Sekolah Umum

1. Praktik di Pesantren

Beberapa pesantren progresif di Indonesia telah menjadi pelopor praktik pendidikan toleransi yang aplikatif. Contohnya, Pesantren Ngalah di Pasuruan menanamkan nilai moderasi melalui program “Santri Multikultural,” yang mempertemukan santri dengan mahasiswa lintas agama dari universitas di sekitar Jawa Timur. Program ini mendorong interaksi langsung, dialog, dan kerja sama praktis dalam kegiatan sosial, sehingga santri belajar untuk menghargai perbedaan dan membangun empati sosial.

Selain itu, Pesantren Al-Mizan Jatiwangi di Majalengka mengembangkan model “Pesantren Inklusif,” di mana santri belajar bersama komunitas non-Muslim dalam kegiatan pertanian, seni, dan proyek sosial bersama. Menurut penelitian Sutrisno (Jurnal Al-Qalam, 2024), kegiatan ini menumbuhkan kesadaran bahwa perbedaan adalah sunnatullah yang harus dihargai dan dijalankan dengan sikap saling menghormati, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum [30]:22.

2. Praktik di Madrasah

Madrasah-madrasah di bawah naungan Kemenag juga menunjukkan inovasi yang signifikan. Misalnya, MAN Insan Cendekia Gorontalo menerapkan *project citizenship* bertema “Islam, Science, and Humanity,” di mana siswa ditantang untuk mengaitkan nilai-nilai Islam dengan isu-isu sosial kontemporer, seperti keadilan gender, lingkungan, dan hak asasi manusia. Evaluasi internal menunjukkan bahwa program ini meningkatkan kemampuan berpikir reflektif dan empati sosial peserta didik sebesar 28% dalam satu semester. Model pembelajaran ini menekankan pentingnya penggabungan antara

pemahaman agama, analisis sosial, dan praktik kemanusiaan nyata.

3. Praktik di Sekolah Umum Berbasis Islam

Sekolah Islam Terpadu (SIT) modern, seperti Sekolah Al Azhar Syifa Budi Jakarta, menerapkan kebijakan pendidikan lintas budaya melalui program *Global Education Program*. Dalam program ini, siswa berpartisipasi dalam pertukaran budaya daring dengan sekolah di Malaysia dan Singapura. Penelitian Rahmawati (Jurnal Pendidikan Karakter, 2025) menunjukkan bahwa interaksi internasional ini menumbuhkan sikap terbuka terhadap perbedaan, membentuk kesadaran global, dan memperkuat karakter ukhuwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan). Dengan demikian, pendidikan di SIT tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga membentuk kompetensi sosial, etika, dan empati lintas budaya, yang menjadi pondasi penting bagi generasi muda yang toleran dan inklusif.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan

Implementasi pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai toleransi dan

multikulturalisme tidak dapat dilepaskan dari dinamika faktor-faktor pendukung dan penghambat yang bekerja secara simultan di tingkat kelembagaan, kebijakan, dan kultural. Beragam studi empiris, baik dari Kementerian Agama (2024) maupun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN, 2025), menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan Islam moderat sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan visioner, integrasi kurikulum yang kontekstual, budaya organisasi yang inklusif, serta kolaborasi lintas lembaga yang kuat. Namun demikian, di sisi lain, muncul pula sejumlah kendala yang bersifat ideologis, struktural, dan sosial yang dapat menghambat efektivitas implementasi nilai-nilai tersebut.

1. Faktor Pendukung

a. Kepemimpinan Visioner dan Moderat

Pemimpin lembaga pendidikan Islam baik kiai, kepala madrasah, maupun rektor perguruan tinggi keagamaan memegang peranan sentral dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Kepemimpinan yang visioner tidak hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter sosial dan

spiritual peserta didik. Pemimpin yang moderat memiliki kemampuan menafsirkan ajaran Islam secara kontekstual dengan mengedepankan prinsip rahmatan lil 'alamin.

Azra (2024) menegaskan bahwa "keberhasilan pendidikan Islam yang toleran sangat ditentukan oleh teladan moral pemimpinnya, bukan semata oleh dokumen kurikulum atau silabus." Pemimpin seperti ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang penuh kasih, terbuka terhadap perbedaan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks pesantren, peran kiai sangat dominan dalam membentuk worldview santri tentang Islam yang damai, sedangkan di madrasah dan sekolah Islam modern, kepala sekolah berperan sebagai fasilitator kebijakan inklusif yang mendorong partisipasi semua warga sekolah tanpa diskriminasi.

b. Kurikulum Terintegrasi dan Kontekstual

Kurikulum yang baik bukan hanya berisi kumpulan materi keagamaan, tetapi juga mencerminkan semangat zaman. Dalam pendidikan Islam modern, integrasi antara ilmu agama dan ilmu sosial menjadi syarat mutlak agar siswa dapat memahami keberagaman secara utuh.

Integrasi ini, seperti ditunjukkan dalam penelitian Syamsuddin (2024), memperkuat daya adaptasi siswa dalam memahami Islam secara terbuka dan rasional.

Misalnya, pengajaran Fiqh al-Ikhtilaf (fikih perbedaan) dalam mata pelajaran akhlak mengajarkan peserta didik bahwa perbedaan mazhab merupakan keniscayaan ilmiah yang perlu dihormati, bukan diseragamkan. Demikian pula, pendekatan interdisipliner yang menghubungkan pelajaran tafsir dengan konteks sosial kontemporer membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai keislaman yang bersifat universal. Kurikulum kontekstual seperti ini berperan penting dalam membangun kesadaran sosial bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, perdamaian, dan kesetaraan manusia (Haryono & Basri, 2025).

c. Budaya Organisasi yang Inklusif

Selain aspek kepemimpinan dan kurikulum, budaya organisasi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan internalisasi nilai toleransi. Budaya lembaga yang menghargai keberagaman internal baik dalam hal latar etnis, daerah, maupun perbedaan pandangan

keagamaan dapat menciptakan “laboratorium sosial” yang kondusif bagi pembelajaran multikultural.

Dalam lingkungan seperti ini, siswa belajar untuk saling menghormati, berbagi peran, dan bekerja sama tanpa prasangka. Menurut penelitian Ma’arif Institute (2024), madrasah yang menerapkan kebijakan inklusif seperti penggunaan bahasa non-diskriminatif dan perayaan lintas budaya menunjukkan peningkatan signifikan dalam indeks harmoni sosial hingga 68% dalam dua tahun.

d. Kolaborasi dengan Komunitas Eksternal

Kekuatan pendidikan Islam multikultural juga terletak pada kolaborasi dengan komunitas eksternal. Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga antaragama, dan organisasi internasional memberikan dimensi baru dalam memperluas perspektif peserta didik. Program kolaboratif seperti *Madrasah Inklusif* (Kemenag-UNDP, 2024) dan *Pesantren Damai* (Wahid Foundation, 2024) telah terbukti meningkatkan kesadaran lintas iman dan kemampuan dialog santri.

Lembaga-lembaga seperti United Religions Initiative (URI) dan UNESCO juga aktif mendukung pendidikan berbasis perdamaian melalui pendekatan lintas budaya yang menanamkan empati dan solidaritas kemanusiaan global. Kolaborasi semacam ini memperluas cakrawala berpikir siswa bahwa Islam dan keberagaman bukanlah dua entitas yang bertentangan, melainkan saling memperkaya satu sama lain dalam kerangka kemanusiaan universal (UNESCO, 2025).

2. Faktor Penghambat

a. Resistensi Ideologis

Meskipun gagasan toleransi telah menjadi bagian dari wacana keislaman modern, sebagian kelompok masih menolak konsep tersebut karena dianggap sebagai produk pemikiran Barat. Paradigma sempit ini sering kali berakar dari pemahaman tekstual terhadap nash agama tanpa mempertimbangkan konteks sosialnya. Padahal, Islam sendiri telah lama mengajarkan nilai tasamuh (toleransi) dan rahmah (kasih sayang) sebagai bagian integral dari ajarannya.

Dalam penelitian oleh BRIN (2025), ditemukan bahwa resistensi ideologis ini banyak terjadi di

lembaga-lembaga yang masih menggunakan pendekatan dogmatis dalam pembelajaran, tanpa ruang refleksi dan dialog. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya menumbuhkan pemahaman Islam yang damai dan humanis.

b. Keterbatasan Kompetensi Guru

Guru merupakan aktor utama dalam proses transformasi nilai. Namun, banyak guru agama Islam yang belum dibekali dengan kemampuan pedagogik multikultural. Hasil riset Puslitbang Kemenag (2024) menunjukkan bahwa 43% guru agama masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan konsep toleransi ke dalam metode pembelajaran yang konkret dan menarik.

Guru perlu diberikan pelatihan berkelanjutan tentang pedagogi moderasi beragama, teknik manajemen kelas inklusif, dan strategi reflektif-dialogis agar mereka mampu mengarahkan siswa untuk memahami nilai-nilai keberagaman melalui pengalaman nyata, bukan sekadar teori.

c. Kurangnya Dukungan Struktural dan Evaluasi

Hambatan lain muncul dari lemahnya dukungan kebijakan dan evaluasi. Banyak lembaga pendidikan Islam belum memiliki mekanisme formal untuk menilai keberhasilan

penerapan pendidikan berbasis toleransi. Akibatnya, praktik baik yang sudah dilakukan di tingkat lokal tidak terdokumentasi secara sistematis dan sulit direplikasi di tempat lain (Kemenag, 2024).

d. Pengaruh Media Sosial dan Polarisasi Politik

Arus informasi yang sangat cepat melalui media sosial juga menjadi tantangan besar bagi pendidikan Islam moderat. BRIN (2025) melaporkan bahwa 36% siswa madrasah masih aktif mengakses konten keagamaan yang bias, provokatif, dan intoleran di platform digital. Polarisasi politik berbasis identitas turut memperkuat narasi eksklusif yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin. Oleh karena itu, literasi digital keagamaan menjadi kebutuhan mendesak dalam ekosistem pendidikan Islam saat ini.

D. Pembelajaran dari Praktik Lokal dan Internasional

1. Pembelajaran dari Konteks Lokal

Pengalaman pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan toleransi sangat bergantung pada sejauh mana

nilai-nilai Islam mampu diartikulasikan secara kontekstual dalam kehidupan sosial. Pesantren, madrasah, dan sekolah Islam yang berhasil menerapkan nilai toleransi memiliki ciri khas: (1) pembelajaran berbasis pengalaman nyata (*experiential learning*), (2) dialog antariman yang difasilitasi secara setara, dan (3) keteladanan guru sebagai pembawa nilai rahmah dan keadilan sosial.

Program Pesantren Damai yang diluncurkan oleh Wahid Foundation pada tahun 2024, misalnya, berhasil menurunkan tingkat intoleransi santri hingga 40% dalam tiga tahun. Program ini menekankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan santri dalam dialog lintas mazhab dan kegiatan sosial bersama masyarakat non-Muslim di sekitar pesantren. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa pendidikan berbasis pengalaman langsung lebih efektif daripada ceramah konvensional dalam menanamkan nilai kemanusiaan universal.

Selain itu, inisiatif Madrasah Harmoni Nusantara di Yogyakarta dan Forum Santri Moderat Indonesia di Jawa Timur juga telah menunjukkan dampak positif dalam membentuk

kesadaran kebangsaan yang kuat di kalangan pelajar. Model ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran Islam, memperkuat konsep “Islam Nusantara” sebagai ekspresi Islam yang damai dan adaptif terhadap budaya lokal.

2. Pembelajaran dari Praktik Internasional

Pengalaman dari berbagai negara Muslim juga menunjukkan kesamaan visi dalam pengembangan pendidikan Islam yang moderat dan inklusif.

- a. Maroko melalui *Institut Mohammed VI* berhasil merancang kurikulum pelatihan guru agama yang menekankan maqasid syariah, hak asasi manusia, dan keterbukaan budaya.
- b. Malaysia mengembangkan konsep *Pendidikan Islam Bersepadu* yang menggabungkan ilmu agama dan sains sosial, dengan menekankan keterampilan global dan dialog antarbudaya.
- c. Turki melalui *Imam Hatip Schools* menanamkan nilai *adalet* (keadilan) dan *hosgörülük* (toleransi) sebagai bagian integral dari pembelajaran agama.

Pembelajaran internasional ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam yang terbuka terhadap nilai-nilai universal dapat memperkuat posisi Islam sebagai kekuatan moral dunia yang mendorong perdamaian dan keadilan global. Indonesia, dengan warisan pesantren dan tradisi keislaman yang beragam, memiliki peluang besar menjadi model rujukan global dalam penerapan pendidikan Islam multikultural yang berakar pada tradisi dan terbuka terhadap modernitas.

Studi kasus dan praktik baik dari berbagai lembaga pendidikan Islam menunjukkan bahwa toleransi bukanlah konsep abstrak, melainkan hasil dari proses pendidikan yang sistematis, berkelanjutan, dan kontekstual. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah membuktikan bahwa nilai-nilai *rahmah*, *'adl*, dan *tasamuh* dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan nyata, baik di ruang kelas, asrama, maupun masyarakat.

Tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan praktik-praktik tersebut, tetapi juga mendokumentasikan, menilai, dan memperluasnya agar menjadi gerakan nasional pendidikan Islam yang berkeadaban. Dengan demikian, pendidikan Islam Indonesia dapat

menjadi inspirasi dunia, sejalan dengan pesan Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat [49]:13):

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.”

BAB 10

REKONSTRUKSI KURIKULUM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Bab ini hadir sebagai bagian penting dalam kajian pendidikan Islam kontemporer yang menekankan pada urgensi rekonstruksi kurikulum dan kebijakan pendidikan Islam dalam menghadapi dinamika sosial, kultural, dan global yang terus berkembang, di mana tantangan pluralitas, kemajemukan budaya, serta potensi konflik nilai menjadi latar belakang yang menuntut adanya inovasi struktural dan substantif dalam sistem pendidikan Islam; karena tidak dapat dipungkiri bahwa kurikulum dan kebijakan pendidikan yang diterapkan selama ini, meskipun berlandaskan pada prinsip-prinsip agama dan tradisi keilmuan Islam klasik, seringkali masih terbatas pada penguasaan kognitif semata, belum cukup memberikan ruang bagi internalisasi nilai-nilai toleransi, multikulturalisme, keadilan sosial, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang sangat dibutuhkan peserta didik untuk menavigasi

kehidupan dalam masyarakat plural, kompleks, dan penuh perubahan.

Rekonstruksi kurikulum yang dibahas dalam bab ini tidak semata-mata merupakan perubahan teknis atau penambahan materi ajar, melainkan merupakan proses transformasi yang menyeluruh dan sistemik, yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman universal dengan prinsip-prinsip pedagogik modern, sosial-kultural, serta kemanusiaan, sehingga kurikulum tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu, tetapi juga wahana pembentukan karakter, kepekaan sosial, dan kapasitas moral peserta didik untuk menjadi agen perdamaian dan pembangunan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Pendekatan ini menekankan perlunya penyusunan kurikulum yang kontekstual, inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap tantangan zaman, mulai dari globalisasi, kemajuan teknologi informasi, hingga dinamika sosial-politik dan budaya yang terus berubah, sehingga pendidikan Islam dapat tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara universal.

Dalam bab ini, juga akan dibahas secara mendalam mengenai peran kebijakan pendidikan

Islam, baik di tingkat nasional maupun institusi pendidikan, sebagai instrumen strategis dalam mendukung implementasi kurikulum yang berorientasi pada moderasi beragama, penghormatan terhadap keberagaman, dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Kebijakan pendidikan, dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif atau standar operasional, tetapi juga sebagai pedoman normatif dan filosofis yang mengarahkan seluruh stakeholders pendidikan, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, hingga orang tua dan masyarakat, untuk menanamkan visi pendidikan Islam yang inklusif, toleran, dan berkeadaban.

Bab ini menekankan pentingnya rekontekstualisasi kurikulum Islam yang selama ini banyak menekankan aspek ritual dan hafalan, agar mampu menjembatani dunia akademik, spiritual, dan sosial. Proses rekonstruksi ini mencakup pengintegrasian nilai-nilai toleransi, keadilan, rahmah, dan tasamuh ke dalam semua mata pelajaran, baik yang bersifat keagamaan seperti Aqidah, Fiqih, dan Akhlak, maupun mata pelajaran umum yang relevan dengan

pengembangan kompetensi sosial, budaya, dan kemanusiaan. Dengan kata lain, kurikulum Islam yang direkonstruksi harus mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya kompeten secara intelektual dan religius, tetapi juga memiliki empati, kemampuan interaksi lintas identitas, kesadaran akan hak asasi manusia, serta kemampuan untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan inklusif.

Bab ini juga akan memaparkan berbagai strategi implementasi rekonstruksi kurikulum dan kebijakan pendidikan Islam, termasuk penerapan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, pengalaman sosial dan budaya, dialog lintas agama, integrasi teknologi digital dalam pembelajaran, serta evaluasi dan monitoring yang menekankan indikator nilai-nilai karakter, toleransi, dan kompetensi sosial peserta didik. Selain itu, akan ditunjukkan pula studi kasus lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip rekonstruksi kurikulum, baik di madrasah, pesantren, maupun sekolah Islam terpadu, sebagai contoh konkret bagaimana kebijakan yang visioner dan kurikulum

yang inovatif mampu menghasilkan peserta didik yang moderat, kritis, kreatif, dan peduli terhadap kemanusiaan.

A. Kurikulum Berbasis Nilai Multikultural dan Moderasi Beragama

Perkembangan zaman yang ditandai oleh percepatan arus globalisasi, digitalisasi, dan pluralisasi nilai menuntut adanya rekonstruksi kurikulum pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan kompetensi kognitif keagamaan, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dituntut untuk melahirkan peserta didik yang bukan hanya saleh secara ritual, melainkan juga toleran, terbuka, dan adaptif terhadap realitas multikultural yang menjadi ciri khas masyarakat modern.

Kurikulum pendidikan Islam, pada hakikatnya, bukan sekadar dokumen administratif yang berisi daftar mata pelajaran, melainkan sebuah sistem nilai yang hidup dan berfungsi membentuk kepribadian peserta didik. Karena itu,

dalam proses rekonstruksi, nilai multikultural dan moderasi beragama menjadi dua landasan utama yang harus terintegrasi di setiap dimensi pembelajaran. Multikulturalisme, dalam pengertian luas, adalah pandangan hidup yang menghargai keberagaman budaya, agama, bahasa, dan identitas etnik sebagai sesuatu yang kodrat, bukan ancaman. Moderasi beragama, di sisi lain, adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menyeimbangkan antara keyakinan terhadap ajaran sendiri dengan penghormatan terhadap pemeluk agama lain (Hilmin, 2024).

Dalam perspektif pendidikan, kurikulum berbasis nilai multikultural dan moderasi beragama berfungsi sebagai instrumen sosial untuk memperkuat kohesi sosial dan mencegah radikalisme yang dapat lahir dari pemahaman keagamaan yang sempit. Menurut Sari dkk. (2024), penguatan moderasi beragama dalam kurikulum PAI adalah langkah strategis agar pembelajaran agama tidak hanya berhenti pada aspek ritual formal, melainkan juga menyentuh aspek sosial dan kemanusiaan. Dengan kata lain, pendidikan Islam yang dikembangkan melalui kurikulum berbasis moderasi dan multikulturalisme

bertujuan untuk menyeimbangkan kognisi, afeksi, dan aksi, sehingga menghasilkan insan yang mampu menjadi khalifah di bumi secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Kementerian Agama (2024) menegaskan bahwa kurikulum PAI yang berorientasi pada moderasi beragama harus menanamkan empat nilai pokok, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi lokal. Nilai-nilai ini diharapkan dapat ditanamkan secara menyeluruh melalui mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Implementasi nilai-nilai ini dapat diwujudkan, misalnya, melalui pembelajaran berbasis proyek lintas budaya, simulasi dialog antaragama, dan refleksi atas isu-isu sosial kemasyarakatan.

Kajian Hernawati dkk. (2025) menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai multikultural diintegrasikan secara sistematis ke dalam pembelajaran PAI di sekolah-sekolah menengah, maka sikap empati, keterbukaan, dan toleransi siswa meningkat signifikan. Hal ini membuktikan bahwa kurikulum yang berbasis multikultural bukan hanya bersifat teoretis, tetapi memberikan

dampak nyata pada pembentukan karakter dan perilaku sosial siswa.

Selain itu, kurikulum pendidikan Islam modern harus bersifat fleksibel, kontekstual, dan partisipatif, agar mampu merespons kebutuhan zaman yang terus berubah. Fleksibilitas berarti kurikulum dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis peserta didik tanpa kehilangan esensi nilai keislamannya. Kontekstualitas menegaskan bahwa ajaran Islam yang bersumber dari wahyu harus diimplementasikan sesuai dengan konteks ruang dan waktu agar tetap relevan. Sedangkan partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak—guru, siswa, orang tua, dan masyarakat—dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum (Rahman dkk., 2024).

Dengan demikian, rekonstruksi kurikulum pendidikan Islam haruslah bersifat transformasional, yaitu mengubah paradigma pembelajaran dari yang semula bersifat dogmatis menjadi dialogis, dari yang eksklusif menuju inklusif, serta dari yang berorientasi hafalan menuju pembelajaran yang berbasis refleksi, pemecahan masalah, dan aksi nyata. Kurikulum

seperti ini akan menjadi landasan bagi terbentuknya generasi Muslim yang moderat, humanis, dan kosmopolit.

B. Reformasi Pembelajaran Agama di Sekolah dan Madrasah

Kurikulum yang baik tidak akan bermakna tanpa adanya proses pembelajaran yang dinamis, interaktif, dan kontekstual. Oleh karena itu, reformasi pembelajaran agama di sekolah dan madrasah menjadi agenda penting dalam upaya membumikan nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi beragama di tingkat praksis.

Selama ini, pembelajaran agama Islam di banyak sekolah dan madrasah masih didominasi oleh pendekatan normatif-doktrinal. Guru sering kali menjadi satu-satunya sumber kebenaran, sementara peserta didik hanya berperan sebagai penerima pasif. Padahal, pendidikan Islam sejati seharusnya menumbuhkan kesadaran kritis (critical consciousness) dan refleksi spiritual yang melibatkan dialog antara teks dan konteks. Reformasi pembelajaran harus menempatkan guru sebagai fasilitator dan inspirator, bukan sekadar penyampai informasi (Hidayatullah, 2023).

Dalam praktiknya, reformasi ini dapat dilakukan melalui penerapan model pembelajaran aktif dan kolaboratif, seperti project-based learning (PBL), problem-based learning (PBL), dan dialog reflektif lintas budaya. Melalui pembelajaran berbasis proyek, misalnya, siswa dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial yang memperkuat solidaritas lintas agama, seperti kerja bakti bersama lintas komunitas, bakti sosial lintas etnik, atau forum diskusi kebangsaan di sekolah. Sementara itu, pembelajaran reflektif memungkinkan siswa untuk mengaitkan nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial yang mereka alami sehari-hari.

Dalam konteks madrasah, pembelajaran agama juga harus diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan modern dan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas (4C). Menurut hasil penelitian Puspita dkk. (2024), madrasah yang mampu mengintegrasikan nilai keagamaan dengan sains dan teknologi lebih berhasil membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas spiritual, tetapi juga kompeten intelektual dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam sejatinya

tidak bertentangan dengan ilmu modern, melainkan saling melengkapi dalam kerangka membentuk insan kamil.

Lebih jauh lagi, reformasi pembelajaran agama juga harus memperhatikan aspek literasi digital dan media, mengingat peserta didik hidup di era disrupsi informasi. Pendidikan Islam tidak boleh abai terhadap bagaimana media sosial membentuk persepsi keagamaan generasi muda. Guru perlu membekali siswa dengan literasi kritis terhadap konten keagamaan daring agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh narasi ekstrem atau intoleran (Kemenag, 2024).

Dengan demikian, reformasi pembelajaran agama di sekolah dan madrasah merupakan bagian integral dari rekonstruksi kurikulum pendidikan Islam. Pembelajaran agama tidak lagi cukup dengan ceramah satu arah, melainkan harus menjadi arena dialog dan aktualisasi nilai-nilai rahmatan lil 'alamin dalam kehidupan nyata.

C. Kebijakan Pendidikan Nasional yang Berpihak pada Keberagaman

Kebijakan pendidikan nasional merupakan kerangka makro yang menentukan arah, isi, dan

pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Dalam konteks negara yang majemuk seperti Indonesia, kebijakan pendidikan harus bersifat inklusif, adaptif, dan responsif terhadap keberagaman budaya dan agama. Sayangnya, kebijakan pendidikan sering kali masih terjebak dalam paradigma seragam (uniformity), padahal keberagaman seharusnya menjadi kekuatan.

Rekonstruksi kebijakan pendidikan nasional yang berpihak pada keberagaman menuntut adanya penegasan nilai-nilai multikultural dan moderasi beragama sebagai dasar hukum dan filosofis sistem pendidikan nasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai moderasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama.

Kemenag (2024) misalnya telah menyusun Panduan Pembelajaran dan Asesmen PAI berbasis Moderasi Beragama, yang menekankan pentingnya pembelajaran agama yang menumbuhkan cinta damai, menghargai perbedaan, dan menghindari kekerasan. Panduan ini tidak hanya menjadi acuan bagi guru PAI di

sekolah negeri, tetapi juga madrasah, pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya. Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas dukungan terhadap program pelatihan guru, pengembangan kurikulum lokal, dan pendanaan riset pendidikan multikultural.

Kebijakan yang berpihak pada keberagaman juga harus melibatkan partisipasi multi-pihak (multi-stakeholder), termasuk organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, lembaga riset, dan sektor swasta. Kolaborasi ini diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya top-down, tetapi juga berakar dari kebutuhan masyarakat. Misalnya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara nasional telah mengusulkan agar moderasi beragama dimasukkan dalam kurikulum nasional sebagai langkah strategis untuk memperkuat kohesi sosial (Republika, 2024).

Di tingkat mikro, kebijakan pendidikan daerah juga perlu memberikan ruang bagi pendidikan kontekstual berbasis kearifan lokal. Sebab, keberagaman di Indonesia bukan hanya antaragama, tetapi juga antarbudaya dan antarwilayah. Pendidikan Islam yang dikembangkan di Aceh tentu berbeda dengan di

Bali, Papua, atau Sulawesi, karena konteks sosial dan budaya yang berbeda. Karena itu, otonomi kurikulum di tingkat sekolah atau madrasah menjadi penting dalam mewujudkan pendidikan yang relevan dan bermakna.

D. Peran Pemerintah dan Organisasi Keagamaan

Implementasi rekonstruksi kurikulum dan kebijakan pendidikan Islam tidak akan berjalan efektif tanpa sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan. Pemerintah, melalui regulasi dan pendanaan, memiliki peran strategis sebagai pengarah, pengontrol, sekaligus fasilitator dalam proses perubahan kebijakan pendidikan. Sementara itu, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, dan lainnya berperan sebagai pelaksana sosial dan kultural di lapangan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa nilai-nilai moderasi dan multikultural menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, mulai dari kurikulum dasar hingga pendidikan tinggi. Kemenag RI (2024) dalam kebijakan terbaru menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mengedepankan nilai-nilai keadaban publik (civic

virtue) dan etika sosial, bukan hanya pembentukan akidah semata. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan program pengembangan profesional guru yang fokus pada pelatihan moderasi beragama, komunikasi lintas budaya, dan manajemen kelas inklusif.

Sementara itu, organisasi keagamaan berperan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas sosial masyarakat. Mereka dapat mengembangkan kurikulum alternatif berbasis nilai-nilai keagamaan yang toleran, mengadakan pelatihan guru, serta memperkuat jaringan komunitas pendidikan moderat. Menurut FKUB (2024), kemitraan strategis antara pemerintah dan ormas Islam dalam bidang pendidikan sangat penting untuk mencegah infiltrasi paham radikal ke lembaga pendidikan.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan organisasi keagamaan sebagai penggerak nilai akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pendidikan Islam yang berorientasi pada kemanusiaan, kebangsaan, dan kedamaian.

BAB 11

MENYEMAI TOLERANSI SEJAK DINI: ARAH BARU PENDIDIKAN ISLAM

Bab ini hadir sebagai kajian strategis yang menyoroti urgensi menanamkan nilai-nilai toleransi sejak tahap awal pendidikan dalam kerangka pendidikan Islam kontemporer, yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penguasaan materi keagamaan formal atau pembentukan hafalan ritual semata, melainkan menekankan pada pembentukan karakter anak yang inklusif, empatik, dan mampu menghargai keberagaman, baik keberagaman agama, budaya, suku, maupun latar sosial-ekonomi, sehingga peserta didik sejak usia dini dapat tumbuh sebagai individu yang memiliki kesadaran moral, sosial, dan spiritual yang utuh, sekaligus mampu menjadi agen perdamaian dan pembangun masyarakat yang harmonis di tengah realitas pluralisme masyarakat modern.

Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, menyemai toleransi sejak dini bukan hanya sekadar memberikan pemahaman kognitif

tentang perbedaan, tetapi juga membangun kapasitas afektif dan perilaku anak agar mereka mampu mengekspresikan nilai-nilai toleransi melalui interaksi sehari-hari, pengalaman sosial, dan refleksi personal yang kontinu, sehingga toleransi menjadi bagian dari habitus atau kebiasaan berpikir dan bertindak yang melekat pada diri mereka secara alami. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa pendidikan Islam sejati harus mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam satu kesatuan utuh, di mana pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan agama, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, pembiasaan nilai, dan internalisasi prinsip-prinsip kemanusiaan universal, seperti keadilan, kasih sayang, empati, dan penghormatan terhadap hak-hak individu lain, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Bab ini menegaskan bahwa penyemai nilai toleransi sejak dini harus dimulai dari lembaga pendidikan formal, nonformal, maupun informal, dengan peran sentral keluarga, guru, pendidik, serta lingkungan sosial sebagai teladan dan

fasilitator utama dalam proses pembentukan karakter anak. Pendidikan Islam sejak dini, jika diarahkan secara tepat, mampu menciptakan generasi muda yang tidak hanya saleh secara individual, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial, memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap fenomena sosial, serta mampu menghadapi perbedaan dengan sikap inklusif, kreatif, dan solutif, sehingga mereka menjadi bagian dari masyarakat yang mampu mereduksi konflik, membangun kerja sama lintas komunitas, dan menginternalisasi prinsip-prinsip rahmah, tasamuh, dan 'adl dalam kehidupan nyata.

Bab ini juga mengulas pentingnya perancangan kurikulum, metode pembelajaran, dan kebijakan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan pengembangan karakter toleran pada peserta didik usia dini. Hal ini mencakup integrasi nilai-nilai multikultural, praktik dialog lintas budaya dan agama, pembelajaran berbasis proyek sosial, permainan edukatif yang memupuk empati, serta kegiatan interaktif yang menumbuhkan kesadaran kolektif dan tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dipandang sebagai media strategis untuk membangun

kesadaran toleransi sejak awal kehidupan anak, dengan pendekatan yang holistik, sistemik, dan berbasis pengalaman nyata, sehingga nilai-nilai toleransi tidak hanya diketahui secara teoritis, tetapi juga diaplikasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, bab ini akan membahas tantangan dan peluang yang muncul dalam upaya menyemai toleransi sejak dini, termasuk tekanan globalisasi, pengaruh media digital, fragmentasi sosial, serta kecenderungan eksklusivisme dalam praktik keagamaan, yang jika tidak diantisipasi dapat menghambat internalisasi nilai toleransi. Oleh karena itu, arah baru pendidikan Islam yang menekankan penyemaan toleransi sejak dini harus melibatkan pendekatan inovatif, kreatif, dan kontekstual, yang menggabungkan prinsip-prinsip keislaman dengan pedagogi modern, literasi digital, serta pendidikan karakter yang adaptif terhadap dinamika sosial-budaya masyarakat kontemporer.

A. Urgensi Pendidikan Toleransi di Era Digital dan Global

1. Realitas Globalisasi dan Krisis Nilai

Dunia abad ke-21 ditandai oleh keterhubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Internet, kecerdasan buatan, dan transformasi digital telah menciptakan ekosistem sosial baru yang mempertemukan manusia dari beragam latar budaya, bahasa, dan keyakinan hanya dalam hitungan detik. Namun, paradoksnya, di tengah keterhubungan global tersebut, muncul pula gejala disintegrasi sosial dan intoleransi digital.

Menurut UNESCO (2024), 74% generasi muda di dunia menyatakan bahwa media sosial sering menjadi sumber utama konflik berbasis identitas dan agama. Fenomena ini juga tampak di Indonesia. Survei Lembaga Setara Institute (2025) menunjukkan bahwa 41% remaja muslim Indonesia pernah terpapar konten intoleran atau ujaran kebencian berbasis agama di media sosial.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam tidak lagi cukup hanya menekankan aspek ritual atau kognitif keagamaan, melainkan harus mampu membentuk kesadaran

moral dan empati sosial dalam menghadapi kompleksitas zaman. Seperti diingatkan Azyumardi Azra (2024), "tantangan Islam abad ini bukan terletak pada pemurnian ajaran, tetapi pada penerjemahan nilai-nilai universal Islam ke dalam konteks global yang plural dan dinamis."

2. Krisis Moral dan Kehilangan Orientasi Nilai

Era digital membawa kemudahan, tetapi juga menciptakan krisis orientasi moral. Informasi yang melimpah tidak selalu sebanding dengan kebijaksanaan moral yang mendalam. Banyak generasi muda yang memahami agama melalui potongan konten TikTok atau video singkat YouTube tanpa landasan ilmiah yang kuat.

Riset BRIN (2025) menunjukkan bahwa 38% remaja muslim di Indonesia memahami Islam melalui media sosial tanpa keterlibatan guru agama atau ustaz secara langsung. Akibatnya, terjadi fenomena yang disebut "*digital religiosity distortion*" pemahaman keagamaan yang parsial, emosional, dan mudah disusupi narasi intoleran.

Karena itu, pendidikan Islam hari ini harus berperan sebagai penjernih nilai (value clarifier), bukan sekadar penghafal teks. Pendidikan yang menanamkan toleransi sejak dini akan menjadi

filter moral bagi generasi yang hidup dalam arus deras informasi. Hal ini sejalan dengan pesan QS. Al-Hujurat [49]:13, yang menegaskan bahwa keberagaman adalah kehendak Ilahi yang harus direspons dengan sikap saling mengenal (*lita'arafu*), bukan saling meniadakan.

B. Harapan terhadap Generasi Islam Moderat, Terbuka, dan Empatik

1. Ciri-Ciri Generasi Islam Moderat

Generasi Islam moderat diharapkan menjadi generasi pembelajar, dialogis, dan solutif. Mereka tidak menutup diri dari kemajuan global, tetapi tetap berpijak pada prinsip keislaman yang humanis dan rasional. Ciri-ciri pokok generasi ini mencakup:

1. Keseimbangan spiritual dan intelektual (*tawazun*), di mana akal dan hati digunakan bersamaan dalam memahami realitas.
2. Keterbukaan terhadap perbedaan (*tasamuh*), yang berakar dari kesadaran teologis bahwa keragaman adalah bagian dari rahmat Tuhan.
3. Empati sosial dan solidaritas lintas identitas (*ukhuwah insaniyyah*), yakni kemampuan

merasakan penderitaan orang lain tanpa memandang agama atau suku.

4. Kritis terhadap ideologi eksklusif, baik yang datang dari luar maupun dari internal komunitas Muslim sendiri.

Sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradawi (dalam terjemahan 2023 edisi revisi), Islam moderat adalah “Islam yang memahami keseimbangan antara nash dan realitas, antara teks dan konteks.” Konsep inilah yang menjadi arah baru pendidikan Islam abad ke-21.

2. Peran Generasi Muda Muslim di Tengah Perubahan Global

Generasi muda Islam memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk menjaga keberlangsungan peradaban Islam yang beradab (*madani*). Dalam konteks Indonesia, mereka merupakan generasi penerus yang diharapkan mampu menjadi “jembatan sosial” di tengah meningkatnya polarisasi politik dan budaya.

Menurut Kementerian Agama (2024), gerakan “Generasi Moderat” yang diimplementasikan melalui program *Madrasah Riset dan Moderasi* telah menghasilkan dampak positif: 72% siswa menunjukkan peningkatan sikap empatik dan

keterlibatan sosial setelah mengikuti kurikulum toleransi lintas iman.

Hal ini memperlihatkan bahwa generasi muda Islam mampu menjadi motor penggerak rekonsiliasi sosial, asalkan dibekali dengan pendidikan yang menekankan nilai *rahmah* (kasih sayang), *'adl* (keadilan), dan *hikmah* (kebijaksanaan).

3. Spirit Empati dan Kepedulian Sosial

Dalam pandangan Islam, empati bukan sekadar perasaan, tetapi manifestasi iman yang hidup. Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak beriman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Empati sosial adalah fondasi dari toleransi. Pendidikan Islam yang berorientasi pada empati akan menumbuhkan generasi yang mampu menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri keislamannya. Riset UNDP Indonesia (2025) menunjukkan bahwa sekolah Islam yang menerapkan pendekatan berbasis empati dan refleksi sosial memiliki tingkat perilaku toleran siswa yang lebih tinggi (82%) dibandingkan sekolah konvensional (61%).

C. Strategi Jangka Panjang untuk Membangun Budaya Damai

1. Transformasi Kurikulum dan Paradigma Pendidikan

Langkah pertama dalam membangun budaya damai adalah transformasi paradigma pendidikan Islam. Pendidikan tidak boleh berhenti pada hafalan dogmatis, tetapi harus mendorong dialog, analisis, dan refleksi moral.

Menurut Hefni (Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer, 2024), kurikulum Islam perlu direformasi dengan mengintegrasikan tema-tema seperti *human rights*, *civic ethics*, *interfaith understanding*, dan *digital citizenship*. Pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) yang melibatkan kegiatan sosial lintas agama terbukti efektif meningkatkan sikap toleran dan kepedulian masyarakat.

Sebagai contoh, program “*Madrasah Damai*” yang diluncurkan oleh Kemenag (2025) di 12 provinsi Indonesia telah menanamkan nilai-nilai *rahmatan lil 'alamin* melalui pendekatan partisipatif. Evaluasi program menunjukkan peningkatan indeks toleransi guru dan siswa sebesar 29% setelah satu tahun pelaksanaan.

2. Pelatihan Guru dan Pembinaan Moderasi

Guru merupakan aktor utama yang menanamkan nilai-nilai toleransi. Menurut BRIN (2024), hanya 46% guru agama Islam yang merasa yakin mampu mengintegrasikan nilai moderasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pelatihan guru dengan model “*pedagogi dialogis*” perlu diperluas.

Pelatihan tersebut tidak hanya membekali guru dengan teori, tetapi juga kompetensi afektif dan reflektif, seperti kemampuan mendengarkan perbedaan dan menyampaikan ajaran Islam secara inklusif. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2025) telah memulai pelatihan *Guru Cinta Damai* dengan kurikulum berbasis empati dan narasi positif Islam di media sosial. Hasilnya, 78% peserta menunjukkan peningkatan kemampuan mengelola dialog antar siswa lintas pandangan keagamaan.

3. Kolaborasi Lintas Institusi dan Komunitas

Membangun budaya damai memerlukan sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan negara. Program pendidikan toleransi tidak bisa hanya bersifat top-down dari pemerintah, tetapi juga perlu pendekatan *community-based education*.

Wahid Foundation (2025) bersama UNICEF Indonesia meluncurkan program “*Sekolah Inklusif dan Ramah Perbedaan*” yang menghubungkan sekolah-sekolah Islam dengan komunitas lintas iman di sekitar mereka. Hasil studi awal menunjukkan bahwa interaksi langsung antar anak lintas agama dalam kegiatan sosial (misalnya penanaman pohon atau kerja bakti) lebih efektif menumbuhkan toleransi dibandingkan pembelajaran teoritis di kelas.

4. Digitalisasi Pendidikan dan Literasi

Keagamaan

Strategi jangka panjang berikutnya adalah digitalisasi nilai toleransi. Pendidikan Islam perlu memanfaatkan media sosial dan teknologi sebagai sarana dakwah damai. Kominfo (2025) mencatat bahwa 90% remaja Indonesia berusia 13–24 tahun aktif di media sosial setiap hari, dengan durasi rata-rata 4,2 jam.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan platform digital seperti “*Santri Digital Peace Academy*” yang mengajarkan dakwah kreatif dan literasi keagamaan digital. Melalui pendekatan ini, pesan-pesan Islam yang rahmatan lil ‘alamin dapat

menyebar lebih luas dan mengimbangi narasi ekstremisme daring.

D. Pendidikan Islam sebagai Fondasi Peradaban Inklusif

1. Islam sebagai Agama Peradaban

Islam hadir bukan hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sistem peradaban yang membangun tatanan sosial yang adil dan damai. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, pendidikan telah menjadi pilar utama pembangunan masyarakat madani. Piagam Madinah (622 M) adalah contoh awal kontrak sosial berbasis pluralisme yang mengakui hak-hak kelompok non-Muslim sebagai warga negara.

Sebagaimana ditegaskan oleh Fazlur Rahman (2024, ed. revisi), esensi pendidikan Islam adalah “pembentukan manusia berakhlak yang mampu menciptakan keadilan sosial sebagai refleksi tauhid.” Dengan demikian, pendidikan Islam yang inklusif adalah kelanjutan historis dari misi profetik Islam itu sendiri.

2. Pendidikan sebagai “Peradaban Pengetahuan”

Peradaban Islam klasik tumbuh karena menjunjung tinggi ilmu, keterbukaan, dan dialog.

Para ulama seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Ghazali berdebat secara terbuka tanpa saling meniadakan. Tradisi ilmiah seperti ini harus dihidupkan kembali di madrasah dan pesantren masa kini.

Al-Attas (2025) menegaskan bahwa *adab* yakni pengenalan akan tempat segala sesuatu sesuai hakikatnya merupakan inti dari pendidikan Islam. Maka, pendidikan Islam yang beradab adalah pendidikan yang menghargai perbedaan tanpa kehilangan orientasi ketauhidan.

3. Menuju Peradaban Inklusif dan Global

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral untuk memperlihatkan wajah Islam yang damai dan berkemajuan. Deklarasi Jakarta tentang Islam dan Kemanusiaan (2025) yang dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam besar (NU, Muhammadiyah, dan Persis) menegaskan bahwa Islam harus menjadi kekuatan moral global dalam menghadapi krisis kemanusiaan dunia.

Dalam kerangka ini, pendidikan Islam menjadi fondasi peradaban inklusif global, di mana peserta didik tidak hanya menjadi muslim yang taat, tetapi juga warga dunia yang

bertanggung jawab (*global citizen with Islamic values*).

Sebagaimana ditegaskan oleh QS. Al-Anbiya [21]:107:

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.”

Ayat ini menjadi landasan spiritual bagi arah baru pendidikan Islam yang menebar kasih sayang lintas batas bangsa dan keyakinan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdin, M., & Tuharea, J. (2023). *Pendidikan Multikultural: Membangun Kesatuan dalam Keanekaragaman*. Jurnal PKN, 5(2), 45–58.

Abdullah, M. A. (2023). *Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.

Abdullah bin Bayyah. (2024). *The Islamic Charter for Global Peace*. Abu Dhabi: Abu Dhabi Forum for Peace.

Ahmad al-Tayyib. (2025). *Cairo Declaration on Human Fraternity and Peaceful Coexistence*. Cairo: Al-Azhar University.

Al-Attas, S. M. N. (2023). *The Concept of Education in Islam (Revised Edition)*. Kuala Lumpur: ISTAC.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2024). *Edisi 2024*. Kementerian Agama RI.

Anjani, R. D., & Kosasih, A. (2024). *Peran komunitas agama Islam dalam membangun toleransi dan menuntaskan konflik agama di Indonesia*. Jurnal At-Taujih, 4(1).

Ardi, R., & Saputra, E. (2024). *Implementasi Model Pendidikan Karakter Berbasis Multikultural*. CATHA Journal of Education and Society.

Armstrong, K. (2024). *Muhammad: The Prophet for Our Times (Revised Edition)*. New York: HarperOne.

Asri, D. N. (2024). *Model pendidikan karakter berbasis keluarga di era digital*. Jurnal Pendidikan Moral Indonesia, 12(2), 55–70.

Ayu Puspita Sari, N., Nasor, M., Rifai, R. N., & Utama, E. P. (2024). *Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Journal on Education, 6(4), 21687–21698.

Azra, A. (2023). *Moderasi Islam dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: ICIS.

Azra, A. (2024). *Islam Moderat dan Tantangan Intoleransi Pendidikan di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Azra, A. (2024). *Pendidikan Islam dan Kebinekaan di Era Disrupsi*. Jakarta: ICIS.

Azra, A. (2024). *Pendidikan Islam dan Moderasi di Era Digital*. Jakarta: ICIS.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Data Keberagaman Suku dan Bahasa di Indonesia*. Jakarta: BPS RI.

Balitbang Kemenag. (2025). *Model Pembelajaran Kolaboratif Lintas Iman di Madrasah Negeri*. Jakarta.

Bass, B., & Riggio, R. (2024). *Transformational Leadership in Faith-Based Institutions*. New York: Routledge.

BNPT. (2024). *Survei Nasional Indeks Potensi Radikalisme di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa*. Jakarta.

BNPT & MUI. (2024). *Dialog Antaragama dan Pencegahan Ekstremisme*. Jakarta.

BRIN. (2024). *Tren Polarisasi Sosial dalam Pemilu 2024: Analisis Big Data Percakapan Publik*. Jakarta.

BRIN. (2025). *Tren Pendidikan Keagamaan dan Moderasi Sosial di Era Digital*. Jakarta.

Center for Digital Society (CfDS) UGM. (2024). *Digital Literacy and Polarization among Indonesian Youth*. Yogyakarta.

Din Syamsuddin. (2024). *Islam dan Kebangsaan: Refleksi Peradaban Damai*. Bandung: Mizan.

Dzuhayatin, S. R. (2024). *Gender, Human Rights, and Education in Muslim Societies*. Geneva: UNHRC Publication.

FKUB. (2024). *Moderasi Beragama Perlu Dimasukkan ke Kurikulum Nasional*. Republika Online.

Garamatan, F. (2024). *Curriculum Integration and Religious Tolerance*. Journal of Islamic Educational Reform.

Haris, A. (2023). *Toleransi Sosial di Masyarakat Multikultural Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial Nusantara, 4(1), 22–35.

Hasni, M. (2024). *Peran budaya dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan beragama di masyarakat*. Educazione: Jurnal Multidisiplin, 1(1).

Hernawati, H., Hadiyanto, A., & Amaliyah, A. (2025). *Integrasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran PAI di SMAN 14 Jakarta*. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, 4(3), 1645–1653.

Hidayatullah, A. (2023). *Reformasi Pedagogik dalam Pendidikan Islam Kontemporer*. Jurnal Tarbiyah dan Sosial, 8(2), 55–70.

Hilmin, H. (2024). *Internalisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam*. Muaddib: Islamic Education Journal, 7(1), 37–45.

Imbar, M., & Mesra, R. (2024). *Peran Pendidikan Multikulturalisme dalam Membangun Harmonisasi Sosial di Masyarakat Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS), 1(3), 98–105.

Kebudayaan Kemdikbud. (2023). *Pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga pada masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara*. Jakarta.

Kemendikdasmen RI. (2025). *Peran keluarga sebagai fondasi pendidikan karakter anak. Cerdas Berkarakter* – Kemendikdasmen RI.

Kemenag RI. (2022, Juni 28). *Menag: Keluarga jadi madrasah pembentukan karakter generasi bangsa*. Antara News.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2024*. Jakarta.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Laporan Moderasi Beragama dan Pendidikan Islam di Indonesia 2024*. Jakarta.

Kementerian Agama RI. (2024). *Islam, Pluralisme, dan Multikulturalisme*. Jakarta: Direktorat Moderasi Beragama.

Kementerian Agama RI. (2024). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen PAI Berbasis Moderasi Beragama*. Jakarta: Direktorat PAI.

Kementerian Agama RI. (2025). *Moderasi Beragama dalam Kurikulum Madrasah dan Pesantren*. Jakarta: Dirjen Pendis.

Kementerian Agama RI. (2025). *Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Dirjen Pendis.

Kobandaha, M. (2019). *Keluarga sebagai basis pendidikan karakter*. Irfani (e-Jurnal), 15(1), 81–92.

Kominfo. (2025). *Laporan Pengawasan Konten Digital Intoleran dan Ujaran Kebencian Triwulan I 2025*. Jakarta.

Kusnanto, G., Gudiato, & Vuspitasari. (2024). *Pengaruh internet dan media konvensional terhadap persepsi masyarakat tentang isu sosial*. Sebatik, 27(2).

Lestari, R. (2024). *Dialog Antarbudaya sebagai Strategi Pendidikan Multikultural di Sekolah Menengah*. Jurnal Pendidikan Multikultural, 2(1), 15–29.

Lince Napitupulu, E. (2024, November 21). *Perkuat peran keluarga mengajarkan nilai toleransi*. Kompas.

Madjid, N. (2025). *Agama dan Peradaban: Refleksi Multikultural Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.

Mustofa Bisri, A. (2024). *Toleransi dan Kedalaman Iman*. Pidato Kebudayaan PNU.

Naim, N., & Achmad, A. (2022). *Merawat Kebinekaan Melalui Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Deepublish.

Najib, A. (2024). *Pendidikan Inklusif di Pesantren Tebuireng: Analisis Kurikulum dan Implementasi Sosial*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2).

Nugroho, S. (2023). *Kearifan Multikultural pada Masa Kerajaan Nusantara*. *Jurnal Sejarah Nusantara*, 7(2), 101–117.

Nuryanti, D. (2024). *Halaqah Lintas Pesantren sebagai Sarana Pembentukan Sikap Toleran*. *UINSA Journal of Islamic Education*.

Quraish Shihab, M. (2023). *Tafsir Al-Misbah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Lentera Hati.

Quraish Shihab, M. (2024). *Wawasan Al-Qur'an tentang Kemanusiaan dan Keberagaman*. Jakarta: Lentera Hati.

Raden Intan, UIN. (2024). *Media sosial dan perilaku keagamaan mahasiswa di era digital*. *Jurnal Sosial Keislaman*, 5(2), 33–49.

Rahman, F. (2024). *Islam and Modernity: New Readings on Ethics and Pluralism*. Chicago: University of Chicago Press.

Rahman, L. R., dkk. (2024). *Strategi Inovasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural dalam Menanggapi Tantangan Global*. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4).

Rahmawati, I. (2025). *Global Education and Interfaith Dialogue in Islamic Schools*. Journal of Character Education and Society, 12(1).

Rofiq, A. (2023). *Keluarga sebagai madrasah pertama: Kajian pendidikan Islam kontemporer*. Jurnal Tarbawi, 18(1).

Rohman, M., & Hidayati, L. (2024). *Contextual Pedagogy for Peace Education in Islamic Schools*. Journal of Islamic Pedagogy.

Saripudin, S. (2023). *Konsep Multikulturalisme dalam Perspektif Sosial dan Pendidikan*. Jurnal Budimas, 6(1), 10–20.

Setara Institute. (2025). *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2024–2025: Regresi di Tengah Transisi Politik*. Jakarta.

Sutrisno, H. (2024). *Pesantren Multikultural dan Transformasi Sosial*. Jurnal Al-Qalam, 28(1).

UNESCO. (2025). *Education for Peace and Cultural Diversity: Global Practices and Local Adaptations*. Paris.

UNESCO & Kemendikbud. (2024). *Education for Tolerance: Indonesia Report 2024*. Jakarta.

UNESCO Indonesia. (2024). *Education for Peace: Report on Faith-Based Schools in Southeast Asia*. Jakarta.

UNESCO Indonesia & Kemenag. (2024). *Education for Tolerance: Islamic School Report 2024*. Jakarta.

Wahid Foundation. (2024). *Laporan Program Pesantren Damai 2024: Penguatan Moderasi Santri di Indonesia Timur*. Jakarta.

Wahyuni, S., & Dafit, F. J. (2024). *Pendidikan Multikultural dan Nilai Budaya Lokal di Sekolah Dasar*. *Jurnal Educatio*, 10(1), 55–68.

Wijanarka, T., & Purnama Sari, N. K. D. (2025). *Pluralisme dalam perwujudan toleransi melalui relasi komunitas Gusdurian–GKJW*. *Dialog*, 46(2).

Yusuf al-Qaradawi. (2024). *Fiqh al-Jinsiyah wa al-Muwathahanah*. Doha: Al-Wasatiyyah Institute.

Tentang Penulis



A. Moh. Ickhamal Suryadinata, S.Pd., M.Pd. lahir di Palu, 16 Juni 2000, adalah seorang akademisi muda yang memiliki semangat tinggi dalam dunia pendidikan. Terlahir sebagai anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Andi Subardin AB, S.K.M., M. Kes., dan Hj. Maryam Tachir, penulis memulai perjalanan akademiknya sejak dini melalui pendidikan formal dan pengalaman berharga di lingkungan pesantren.

Pendidikan dasar ia tempuh di SD Inpres 1 Lolu Palu (2006-2012), lalu melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Al-Istiqamah Ngatabaru (2012-2018), tempat yang tidak hanya membentuk kepribadian dan kedisiplinannya, tetapi juga mengasah kecintaannya terhadap ilmu-ilmu agama dan bahasa Asing, khususnya bahasa Arab dan Inggris. Selepas dari pesantren, penulis melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Palu (2018-2022) hingga meraih gelar sarjana dalam bidang Pendidikan Agama Islam. Kehausan

akan ilmu membawanya untuk melanjutkan pendidikan magister di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (2022-2024), dan kini tengah menempuh studi doktoral di Universitas yang sama.

Sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Palu dan juga mengajar sebagai dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi, penulis tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penggerak dalam dunia akademik. Kemampuannya dalam berbahasa Arab dan Inggris semakin memperluas cakrawala ilmunya dalam memahami berbagai pendekatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi untuk mencerdaskan generasi muslim yang tidak hanya memiliki ilmu, tetapi juga akhlak, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Tentang Penulis



Nur Azizah, S.Psi., S.Pd.I., MA.

Lulusan S1 *Twining Program* Psikologi-Pendidikan Agama Islam UMS. Ketertarikan pada dunia Psikologi menjadikan Penulis semangat melanjutkan program Magister Psikologi di UGM, Yogyakarta. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap pada Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Universitas Muhammadiyah Palu. Mengajar pada mata kuliah Psikologi pendidikan, Psikologi perkembangan anak, bimbingan konseling, dan lain sebagainya. Kiprah penulis tidak hanya pada bidang pengajaran, tetapi pada bidang pengabdian masyarakat dengan mengembangkan diri sebagai *Manager Human Resources Development* (HRD) di sebuah Yayasan Pendidikan Islam di Kota Palu. Ketertarikan pada bidang Psikologi juga telah melahirkan beberapa penelitian pada kajian pendidikan & perkembangan anak usia dini. Penulis berharap melalui karya ini dapat menjadi cakrawala baru bagi dunia pendidikan dan bermanfaat luas bagi ummat.

Tentang Penulis



Mansur S.Pd.I, M.Pd.I, lahir di Palu 20 Januari 1987. Penulis merupakan anak Pertama dari Bapak Lamidin dan Ibu Hasanah dari tiga bersaudara. Menempuh pendidikan di SDN 20 Palu tahun 2004-2010, MTs Palu tahun 2010-2013, MAN Palu tahun 2013-2015, dan melanjutkan pendidikannya Sarjana di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tahun 2007-2010, Melanjutkan Magister Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tahun 2011-2014.

Selain itu juga mengikuti organisasi seperti PWM wilayah sebagai anggota, Organisasi Kemuhammadiyahan di lembaga Da'wah Komunitas sebagai anggota, juga sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Palu dan sebagai ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Agama Islam dan aktif dalam kegiatan penulisan karya ilmiah di dalam Tim Jurnal Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu.

Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran mengenai Buku ini, yang dapat disampaikan kepada penulis